



BUPATI MANGGARAI TIMUR

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2017**



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan diawal tahun 2017. Dari analisis 29 sasaran pembangunan, ada 42 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih sebagai tolak ukur penilaian Kinerja tahun 2017. Pada tahun 2017, sebanyak 33,33 % dari total IKU yang ada atau sebanyak 14 IKU yang pencapaiannya lebih besar (>) dari nilai 90 % (90-100). IKU dimaksud sebagai berikut :

1. Jumlah Kompetisi yang diselenggarakan;
2. Persentase Desa Siaga Aktif dalam Pemberantasan Penyakit;
3. Persentase Kasus Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Jumlah Media Penyebaran Informasi Penanggulangan Bahaya Narkoba;
5. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
6. Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
7. Mengurangi Luasan Kawasan Kumuh pada Desa dan Perkotaan;
8. Pemantauan Status Mutu Air;
9. Rasio Ruang Terbuka Hijau;
10. Persentase Pengurangan Resiko Terhadap Bencana;
11. Persentase Penanganan Pasca Bencana;
12. Jumlah UMKM yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan;
13. Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
14. Persentase OPD yang menyampaikan dokumen LAKIP yang terintegrasi dan tepat waktu.

Dan sebanyak 38,10 % dari total IKU yang ada atau sebanyak 16 IKU yang pencapaiannya lebih besar (>) dari nilai 100 % (lebih dari seratus). IKU dimaksud sebagai berikut :

1. Meningkatnya Angka Melek Huruf;
2. Persentase PTK S-1
3. Angka Kematian Balita Per 1000 KH;
4. Persentase Peserta KB Aktif;
5. Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik;
6. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi;
7. Persentase Tersedianya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari;
8. Rasio Panjang Jaringan Irigasi;
9. Jumlah Arus Penumpang dalam Kurun Waktu Tertentu;

10. Jumlah Produksi Perikanan;
11. Nilai Tukar Petani;
12. Ketersediaan Pangan Utama;
13. Jumlah Kunjungan Wisatawan;
14. Jumlah Koperasi Aktif;
15. Jumlah Investasi Yang Masuk ; dan
16. Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Sementara sebanyak 23,80 % dari total IKU yang ada atau sebanyak 10 IKU yang pencapaiannya lebih kecil (<) dari nilai 90 %. IKU dimaksud sebagai berikut :

1. Angka Kematian Bayi per 1.000 KH;
2. Angka Kematian Ibu per 100.000 KH;
3. Persentase PMKS Skala Kab/Kota yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya;
4. Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan;
5. Persentase Penanganan Sampah;
6. Ketaatan Terhadap RTRW (Dokumen TataRuang);
7. Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan;
8. Luas Areal Tanaman Perkebunan Unggulan yang Ditingkatkan;
9. Jumlah Populasi Ternak; dan
10. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Sebanyak 04,77 % IKU dari total IKU yang ada atau sebanyak 2 IKU yang pencapaiannya belum bisa diketahui hasilnya dikarenakan sedang dalam proses. IKU tersebut diantaranya :

1. Angka Usia Harapan Hidup;
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai Timur belum dapat diperoleh dikarenakan Badan Pusat Statistik (BPS) selaku instansi terkait belum merilis Angka Usia Harapan Hidup terbaru untuk tahun 2017
2. Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan;
Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan untuk tahun anggaran 2017 masih dalam proses audit oleh BPK

IKU dan Indikator yang belum mencapai target disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Kondisi ini menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang. Di sisi lain menjadi bahan evaluasi akuntabilitas

kinerja bagi pemangku kepentingan, penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program, dan kegiatan serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan di tahun – tahun berikutnya. Sementara pencapaian indikator kinerja lainnya yang turut mendukung pencapaian IKU tetap disajikan dalam pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017. Pencapaian IKU tahun 2017 sebesar 102,33%, sementara pencapaian tiga tahun terakhir terhadap RPJMD sebesar 98,20 %. Pencapaian terhadap RPJMD sudah sesuai dengan target. Masih ada sebagian IKU dan Indikator belum mencapai target dan ada sebagian sudah mencapai atau bahkan sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	i
Daftar isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 SEJARAH PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	2
1.4 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH	2
1.4.1 Batas Administrasi	2
1.4.2 Luas Wilayah	3
1.4.3 Topografi	3
1.5 GAMBARAN UMUM PENDUDDUK	6
1.6 ISU STRATEGIS KAB. MANGGARAI TIMUR	6
1.7 KERAGAMAN SDM KAB. MANGGARAI TIMUR	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
2.1 RENCANA STRATEGIS KAB. MANGGARAI TIMUR	14
2.1.1 Visi dan Misi	14
2.1.2 Tujuan	17
2.1.3 Sasaran	17
2.1.4 Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja RPJMD 2014 - 2019	19
2.1.4.1 Strategi Pembangunan	19
2.1.4.2 Arah Kebijakan Pembangunan	19
2.1.4.3 Program untuk Pencapaian Sasaran	20
2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017	24
2.2.1 Rencana Anggaran Tahun 2017	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH	33
3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017	33
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	42
3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017	95
BAB IV PENUTUP	102
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	3
Tabel 1.2 Luas Wilayah Daratan dan Persentase Menurut Kemiringan Tanah Per Kecamatan... 3	
Tabel 1.3 Luas Wilayah dan Persentase Menurut Ketinggian Diatas Permukaan Laut Per Kecamatan	4
Tabel 1.4 Perbandingan Data APK dan APM 2016 dan 2017	7
Tabel 1.5 : Ciri Korban : Januari – Desember 2017	11
Tabel 1.6 : Ciri Pelaku : Januari – Desember 2017	11
Tabel 1.7 : Bentuk Kekerasan, Tempat kejadian dan Jenis Pelayanan Yang Diberikan	12
Tabel 1.8 : Komposisi ASN Berdasarkan Pendidikan	12
Tabel 1.9 : Komposisi ASN Berdasarkan Agama	13
Tabel 1.10: Komposisi ASN Berdasarkan Golongan	13
Tabel 1.11: Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan	13
Tabel 2.1 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	24
Tabel 2.2 : Rencana Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2017	26
Tabel 2.3 : Rencana Anggaran Tahun 2017	27
Tabel 2.4 : Rencana Anggaran Indikator Kinerja Utama Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017	29
Tabel 3.1 : Realisasi Capaian IKU Bupati Manggarai Timur Tahun 2014 – 2017 (Tiga Tahun Terakhir)	34
Tabel 3.2 : Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2017	38
Tabel 3.3 : Meningkatnya Angka Melek Huruf Masyarakat	42
Tabel 3.4 : Jumlah PTK yang S – 1	43
Tabel 3.5 : Jumlah Kompetisi Olah Raga yang Diselenggarakan	44
Tabel 3.6 : Angka Usia Harapan Hidup	45
Tabel 3.7 : Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Balita	47
Tabel 3.8 : Persentase Desa Siaga Aktif dalam pemberantasan penyakit	49
Tabel 3.9 : Persentase Peserta KB Aktif	50
Tabel 3.10: Persentase Kasus Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	52
Tabel 3.11: Jumlah Media Penyebaran Informasi Penanggulangan Bahaya Narkoba	53
Tabel 3.12: Persentase PMKS Skala Kab./Kota yang menerima program Pemberdayaan Sosial	55
Tabel 3.13: Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM	58

Tabel 3.14: Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	59
Tabel 3.15: Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	60
Tabel 3.16: Rasio Panjang Jaringan Irigasi	63
Tabel 3.17: Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	64
Tabel 3.18: Jumlah Arus Penumpang dan Angkutan Umum yang Melayani	65
Tabel 3. 19: Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pemantauan Status Mutu Air, dan Rasio Ruang Terbuka Hijau	67
Tabel 3.20: Tertanggulangnya Bencana Secara Dini dan Komprehensif	69
Tabel 3.21: Tabel Ketaatan terhadap RTRW	71
Tabel 3.22: Produksi dan Produktivitas Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Pternakan, dan Perikanan)	72
Tabel 3.23: Produksi dan Produktifitas komoditi tanaman pangan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 dan 2017	73
Tabel 3.24: Target dan Realisasi Populasi Ternak di Kab. Manggarai Timur Tahun 2017	74
Tabel 3.25: Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2017	75
Tabel 3.26: Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2017	76
Tabel 3.27: Nilai Tukar Petani	77
Tabel 3.28: Ketersediaan Pangan Utama	78
Tabel 3.29: Tabel Analisa Ketersediaan Pangan Utama	79
Tabel 3.30: Data Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita per Hari Tahun 2017	80
Tabel 3.31: Jumlah Cadangan Pangan di Kabupaten Manggarai Timur	81
Tabel 3.32: Capaian Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan, dan Akses Pangan Tahun 2017	81
Tabel 3.33: Konsumsi Aktual dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017	82
Tabel 3.34: Rekapitulasi Hasil Uji Cepat Rapid Test Kit Formalin, Boraks, dan Pestisida	83
Tabel 3.35: Jumlah Kunjungan Wisatawan	85
Tabel 3.36: Daya Saing Koperasi dan UMKM	86
Tabel 3.37: Jumlah Investasi yang Masuk	87
Tabel 3.38: Indikator Turunan Pendukung Iku Jumlah Investasi Yang Masuk	87
Tabel 3.39: Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	89
Tabel 3.40: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	92
Tabel 3.41: Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	93
Tabel 3.42: Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	94

Tabel 3.43: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 201795

Tabel 3.44: Anggaran dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017 98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Persentase Angka Melek Huruf Per Tahun	42
Gambar 3.2 Jumlah PTK yang S 1	44
Gambar 3.3 Jumlah Kompetisi yang Diselenggarakan	45
Gambar 3.4 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai Timur	46
Gambar 3.5 Angka Kematian Ibu dan Anak Kabupaten Manggarai Timur 2017	47
Gambar 3.6 Grafik Jumlah Desa Siaga Aktif	50
Gambar 3. 7 Grafik Jumlah Peserta KB Aktif	51
Gambar 3.8 Grafik Perlindungan perempuan dan Anak	52
Gambar 3.9 Grafik Media Penyebaran Informasi Penanggulangan Bahaya Narkoba	55
Gambar 3.10 Grafik Persentase PMKS Skala Kabupaten/ Kota yang menerima Program Pemberdayaan Sosial	57
Gambar 3.11 Grafik Jumlah Kelompok Binaan LPM	58
Gambar 3.12 Grafik Persentase Jalan Dengan Kondisi Baik	60
Gambar 3.13 Grafik Persentasi Rumah Tinggal Bersanitasi	61
Gambar 3.14 Grafik Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok	62
Gambar 3.15 Grafik Rasio Panjang Jaringan Irigasi	64
Gambar 3.16 Grafik Jumlah Arus Penumpang	66
Gambar 3.17 Grafik Angkutan Umum	67
Gambar 3.18 Grafik Persentase Penanganan Sampah	68
Gambar 3.19 Grafik Pemantauan Status Mutu Air	68
Gambar 3.20 Grafik Rasio Ruang Terbuka Hijau	68
Gambar 3.20 Grafik Persentase Pengurangan Resiko Terhadap Bencana	70
Gambar 3.21 Grafik Persentase Penanganan Pasca Bencana	70
Gambar 3.22 Grafik Ketaatan Terhadap RTRW	71
Gambar 3.23 Grafik Nilai Tukar Petani	78
Gambar 3.24 Grafik Kondisi Keamanan Pangan semester	83
Gambar 3.25 Grafik Ketersediaan Pangan Utama	84
Gambar 3.26 Grafik Kunjungan Wisatawan	85
Gambar 3.27 Grafik Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	86
Gambar 3.28 Grafik Jumlah Investasi Yang Masuk	89
Gambar 3.29 Grafik RasioDaya Serap Tenaga Kerja	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2017 merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Proses dan sistematika penyusunan LAKIP berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LAKIP merupakan alat akuntabilitas dan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan padanya. LAKIP juga bertujuan mewujudkan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah disusun dan ditetapkan secara periodik. Dengan demikian laporan ini dapat dipergunakan sebagai umpan balik bagi upaya peningkatan Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur pada masa yang akan datang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP adalah:

1. Proses dan mekanisme efektif untuk mendorong seluruh Aparat Pemerintah Daerah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *good Governance (Civil Governance, Corporate Governance, dan State Governace)* dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat azas.
2. Instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Sarana efektif meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur.
4. Media untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan/kegagalan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
5. Wahana untuk mendorong penyempurnaan struktur Organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja dan prosedur pelayanan, berdasarkan permasalahan nyata dalam pelaksanaan tata manajemen Pemerintahan.

1.3 SEJARAH PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Spirit desentralisasi mendorong daerah - daerah memperjuangkan pemekaran provinsi dan kabupaten/kota di bawah payung semangat otonomi daerah. Daerah diberi kewenangan luas untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing – masing. Semangat ini pula mendorong masyarakat dan pemangku kepentingan di Manggarai Timur berjuang memekarkan diri dari Kabupaten Manggarai sebagai Kabupaten Induk.

Perjuangan itu terwujud pada tahun 2007, dimana Kabupaten Manggarai Timur menjadi salah satu Kabupaten daerah otonom baru di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Manggarai. Pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2007 tentang pembentukan daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagai daerah otonom dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara *defacto*, Kabupaten Manggarai Timur secara resmi menjadi salah satu daerah otonom baru pada tanggal 23 November 2007 yaitu sejak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melantik Penjabat Bupati Manggarai Timur. Dalam perjalanan selanjutnya, Roda Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dikendalikan oleh seorang Penjabat Bupati Manggarai Timur, dengan memanfaatkan sumber pembiayaan pembangunan yang sangat terbatas yaitu bersumber dari hibah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai sebagai kabupaten induk. Dengan keterbatasan akses pembiayaan pembangunan dan aktivitas pemerintahan tersebut, tentunya semua aspek pembangunan dan pelayanan tugas pemerintahan tidak berjalan maksimal, sehingga fokus utama yang menjadi tugas pokok Penjabat Bupati Manggarai Timur sejak tahun 2007 – 2008 adalah persiapan perangkat daerah otonom termasuk Lembaga Legislatif (DPRD), persiapan dan fasilitasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

Sejak tahun anggaran 2009, Kabupaten Manggarai Timur baru memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara otonom, dan pada tahun bersamaan juga baru memiliki Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) secara definitif di daerah otonomi baru bernama Manggarai Timur.

1.4 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

1.4.1 Batas Administrasi

Merujuk pada RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014 – 2019 bahwa Kabupaten Manggarai Timur terletak di bagian barat pulau Flores dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan dengan Laut Sawu

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Ngada
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Manggarai.

1.4.2 Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Manggarai timur secara keseluruhan baik daratan dan laut 2.643,93 Km² atau 264.393 ha. Secara administrasi wilayah Kabupaten Manggarai Timur di bagi menjadi 9 Kecamatan 17 Kelurahan 156 Desa dimana pusat pemerintahan ada di Borong Kecamatan Borong, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Manggarai Timur

NO	KECAMATAN	IBU KOTA	LUAS WILAYAH DARATAN (HA)	LUAS WILAYAH LAUT (HA)	TOTAL LUAS WILAYAH (HA)
1	Borong	Borong	28.202	2.180	30.382
2	Ranamese	GoloMongkok	20.824	2.000	22.824
3	Poco Ranaka	Mano	10.423	-	10.423
4	Poco Ranaka Timur	Lawir	10.423	-	10.423
5	Lamda Leda	Benteng Jawa	35.943	2.680	38.623
6	Sambil Rampas	Pota	40.009	2.390	42.399
7	Elar	Lengko Elar	32.825	1.300	34.125
8	Elar Selatan	Wukir	23.934	-	23.934
9	Kota Komba	Wae Lengga	49.194	2.090	51.284
Manggarai Timur		Borong	251.855	12.538	264.393

Sumber: BP3 Kabupaten Manggarai Timur, 2017.

1.4.3 Topografi
Kondisi Topografi

a) Kemiringan Lahan

Wilayah Kabupaten Manggarai Timur sebagian besar berada pada kemiringan 15% - 40%. Untuk lebih jelasnya kondisi kemiringan lahan wilayah Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2 Luas Wilayah Daratan dan Persentase Menurut Kemiringan Tanah Per Kecamatan

KECAMATAN	LERENG								TOTAL LUAS(HA)
	0-2 % (ha)	%	2-15 % (ha)	%	15-40 % (ha)	%	> 40 % (ha)	%	
01. Borong	207	1,92	2.577	39,18	4.632	13,59	20.786	10,37	28.202
02. Rana Mese	281	2,61	1.902	28,92	3.421	10,04	15.220	7,59	20.824

KECAMATAN	LERENG								TOTAL LUAS(HA)
	0-2 % (ha)	%	2-15 % (ha)	%	15-40 % (ha)	%	> 40 % (ha)	%	
03. Poco Ranaka	--	-	285	4,33	2.827	8,29	7.389	3,69	10.501
04. P.Ranaka Timur	--	-	282	4,29	2.807	8,24	7.334	3,66	10.423
05. Lamba Leda	996	9,24	384	5,84	3. 832	11,24	30.731	15,33	35.943
06. Sambu Rampas	8 .344	77,42	-	-	943	2,77	30.722	15,33	40.009
07. Elar	411	3,81	-	-	-	-	32.414	16,17	32.824
08. Elar Selatan	300	2,78	-	-	-	-	23.624	11,79	23.934
09. Kota Komba	238	2,21	1. 147	17,44	15. 624	45,84	32. 185	16,06	49. 193
	10.777	100	6.577	100	34.086	100	200.415	100	251.855

Sumber : BP3Kabupaten Manggarai Timur,2017

b) Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Manggarai Timur sebagian besar berada di atas 100 meter dpl.

Untuk lebih jelasnya kondisi ketinggian lahan wilayah Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3 Luas Wilayah dan Persentase Menurut Ketinggian Diatas Permukaan Laut Per Kecamatan

KECAMATAN	Ketinggian Dari Muka Laut								TOTAL LUAS (HA)
	0-100 (m)	%	100-500 (m)	%	500-100 (m)	%	> 1000 (m)	%	
01. Borong	4.211	14,93	9.310	33,01	6.590	23,37	8.091	28,69	28.202
02. Rana Mese	1.130	5,43	7.321	35,16	5.143	24,70	7.230	34,72	20.824
03. Poco Ranaka	0	0,00	402	3,83	6.475	61,66	3.624	34,51	10.501
04. P.Ranaka Timur	0	0,00	384	3,68	5.838	56,01	4.201	40,31	10.423
05. Lamba Leda	4.887	13,60	18.867	52,49	11.269	31,35	920	2,56	35.943
06. Sambu Rampas	8.452	21,13	19.971	49,92	8.926	22,31	2.660	6,65	40.009
07. Elar	4.550	13,86	12.440	37,90	12.421	37,84	3.413	10,40	32.824
08. Elar Selatan	0	0,00	10.528	43,99	11.103	46,39	2.303	9,62	23.934
09. Kota Komba	7589	15,43	18293	37,19	12975	26,38	10336	21,01	49193
Jumlah	30.819	12,24	97.516	38,72	80.740	32,06	42.778	16,99	251.853

Sumber : Bp3Kabupaten Manggarai Timur,2017

Kondisi Geologi

a) Struktur dan Karakteristik

Keadaan geologi Kabupaten Manggarai Timur mempunyai kondisi geologi yang cukup kompleks. Satuan geologi yang dijumpai dalam wilayah ini dibagi dalam 4 jenis yaitu :

1. *Intermediate basic* (basa menengah)
2. *Neogen*
3. *Alluvium terrace deposite and coral reefs* (alluvium undak dan terumbu coral)
4. *Silific efusives* (efisiva berasam kersik)

Wilayah Manggarai Timur bagian selatan sepanjang arah Barat – Timur banyak ditemukan jenis *Intermediate Basic* (basa menengah). Sedangkan pada bagian utara banyak ditemukan batuan kapur pada formasi *neogen*. Jenis tanah di Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari :

- *Latosol*

Tanah latosol semula tergolong tanah mineral yang sudah mempunyai perkembangan profil dalam horizon terselubung merah hingga kuning, liat, lemah hingga gumpal. Jenis tanah ini meliputi 3 golongan yaitu : latosol coklat, latosol coklat merah dan latosol merah kuning.

- *Mediterranean*

Tanah mempunyai lapisan solum yang tebal. Kadar unsur basa yang terkandung umumnya tinggi, daya menahan airnya sedang, sehingga kepekaan terhadap erosi juga sedang.

- *Litosol*

Merupakan tanah mineral dengan sedikit perkembangan diatas batuan kukuh, dengan kedalaman profil kurang dari 50 cm.

b) Potensi Geologi

Dari jenis tanah di atas, potensi geologi di Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut:

- *Latosol*

Golongan latosol coklat memiliki kemampuan dan potensi yang baik, karena kadar NPK cukup tersedia. Jenis latosol coklat merah dan latosol merah kuning memiliki kemampuan untuk pertanian sangat kecil, karena terdapat indikasi kekurangan sulfur.

- *Mediterranean*

Sifat-sifat fisik dan kimianya baik sehingga nilai produksinya cukup tinggi dan apabila persediaan air cukup untuk pengolahan/tumbuh tanam, maka jenis tanah ini dapat dimanfaatkan untuk persawahan.

- *Litosol*

Jenis tanah ini mempunyai hambatan kedangkalan profil disertai kadang-kadang kurangnya air, kemungkinan digunakan sebagai lahan pertanian sangat terbatas. Penyebaran untuk jenis tanah litosol banyak dijumpai di Kecamatan Poco Ranaka dan Kecamatan Borong. Jenis tanah mediteran banyak dijumpai menyebar, khususnya banyak dijumpai di kawasan bagian utara.

Selain potensi diatas, terdapat juga potensi geologi berupa kawasan rawan bencana alam dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan rawan bencana alam gunung berapi merupakan wilayah sekitar puncak gunung berapi yang rawan terhadap luncuran gas beracun, lahar panas dan dingin, luncuran awan panas dan semburan api, dan tempat lalunya tumpahan benda-benda lain akibat letusan gunung berapi yang terletak di Kecamatan Poco Ranaka.

1.5 GAMBARAN UMUM PENDUDUK

Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan daerah. Luas Wilayah Kabupaten Manggarai Timur 2.518,55 Km² dengan jumlah penduduk, merujuk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur tahun 2017 sebanyak 295.624 jiwa. Secara umum distribusi penduduk dan tingkat kepadatannya relatif tidak merata jika dilihat dari kepadatan penduduk. Di beberapa kecamatan distribusinya cenderung meningkat. Distribusi penduduk Kabupaten Manggarai Timur terfokus di Kota Borong sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi.

1.6 ISU STRATEGIS KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Isu strategis pembangunan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Relatif Rendah

- Kemajuan suatu daerah memerlukan infrastuktur sumber daya manusia yang baik. Infrastruktur dimaksud adalah pendidikan yang tinggi, sehat jasmani dan rohani serta bergizi. Kemampuan masyarakat untuk berdaya saing tinggi merupakan kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran daerah. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih menemui hambatan, antara lain dilihat dari masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, baik yang disebabkan oleh masih buruknya kondisi kesehatan lingkungan, perilaku masyarakat yang belum mengikuti pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan belum optimalnya upaya-upaya penanggulangan penyakit.
- Angka Kematian bayi per 1000 kh dengan target 9,5/1000 KH, realisasi 8,17 /1000 kh (44 Kasus) dari 5.399 kelahiran Hidup, capaian kinerja 116,27 %. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 8,48/1000KH (48 kasus) 6.180

Kelahiran Hidup, tahun 2017 adanya penurunan angka kematian bayi yaitu penurunan sebanyak 0,31/1000 KH (4 kasus). Hal ini menunjukkan adanya kemajuan yaitu berkurangnya kematian bayi setiap 1000 KH dan telah terselamatkan 4 bayi. Menurunnya Angka Kematian Bayi ini, diharapkan mencapai maksimal 9,98/1000KH.

- Angka Kematian balita per 1000 kh dengan target 0,65/1000 kh, realisasi 2,41/1000 KH (47 kasus) dari 5.399 Kelahiran Hidup, capaian kinerja 26,97%. Jika dibandingkan dengan persentase realisasi tahun 2016 0,67/1000 KH (2 kasus) dari 6.180 kelahiran hidup. Terjadinya peningkatan Angka kematian Balita di tahun 2017 sebesar 1,74/1000 KH (45 Kasus) Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kematian balita setiap 1000 KH dan tidak terselamatkan 45 Balita. Angka Kematian Balita ini, diharapkan mencapai maksimal 0,65/1000KH.
- Angka Kematian ibu per 100.000 KH dengan target 160/100.000 KH, realisasi 186/100.000 KH (11 kasus) dari 5.399 Kelahiran Hidup, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 162/100.000 KH (10 kasus) dari 6.180 kelahiran Hidup, Indikator ini mengalami peningkatan Angka Kematian Ibu walaupun jumlah kasus yang meningkat tetapi jumlah kelahiran hidup berkurang di Tahun 2017, dimana tahun 2016 di antara 100.000 KH ada 161 ibu yang meninggal dan di tahun 2017 di antara 100.000 KH ada 161 ibu yang meninggal.
- Dari segi taraf pendidikan masyarakat, kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan harus terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Data pada tahun 2017 lihat tabel di bawah ini :

Tabel 1.4 Perbandingan Data APK dan APM 2016 dan 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016		Tahun 2017	
		APK	APM	APK	APM
1	SMP/MTs	95,54	83,29	96,87	83,84
2	SD/MI	99,92	97,10	99,93	97,23

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

- Jumlah siswa SMP/MTs 20.331, penduduk berusia 13-15 tahun sebanyak 20.989 orang; dan Jumlah siswa SD/MI 42.959, penduduk berusia 7-12 tahun sebanyak 42.987 orang. Kemampuan keberaksaraan secara umum terus mengalami peningkatan, tetapi disparitas kemampuan antar kelompok masih relatif tinggi. Disparitas ini dapat terlihat, antara lain, pada masih rendahnya kemampuan keberaksaraan kelompok penduduk perempuan, miskin, dan banyak warga yang tinggal di pedesaan masih mengalami buta huruf. Selain itu, perluasan akses pada

jenjang pendidikan tinggi (PT) perlu diikuti dengan adanya jaminan kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas dan relevansi, APK PT yang tinggi akan mengakibatkan pengangguran terdidik yang besar sehingga berpotensi menimbulkan gejolak sosial.

2. Belum Terpenuhinya Infrastruktur Dasar

Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan, pada tahun 2017 ditargetkan panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa/Lingkungan) sebesar 69,49%. Berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur tahun 2017 diketahui jalan dalam kondisi baik sepanjang 1.511,53 KM dari total panjang jalan 2.033,2 KM atau 74,34% dari target 71,95%. Dengan demikian terjadi peningkatan 2,40% atau dengan pencapaian 103,33%. Capaian kinerja yang dicapai menunjukkan kinerja yang baik dengan predikat Sangat Baik.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/jam). Indikator panjang jalan dalam kondisi baik digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Indikator ini dihitung dengan menghitung panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan panjang seluruh jalan kabupaten di Kabupaten Manggarai Timur dikali dengan 100%. Total panjang jalan Kabupaten Manggarai Timur adalah 1.281,29 KM. Pada tahun 2015 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Manggarai Timur 839,50 KM atau 65,52%. Dari target pencapaian tahun 2016 sebesar 63,19% telah dilakukan peningkatan jalan sehingga panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik menjadi 1.462,88 KM atau 71,95 % meningkat 181,59 KM dengan capaian 103,53%.

3. Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, adalah perkembangan penduduk miskin. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dapat diartikan bahwa pendapatan penduduk semakin meningkat. Jumlah dan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2009 adalah 25, 51% dengan angka garis kemiskinan 58.975 jiwa dengan total jumlah penduduk 248.655 jiwa, sementara tahun 2010 meningkat 25,94 % dengan angka garis kemiskinan 182.641 jiwa dengan total jumlah penduduk 254.400 jiwa .

Pada sisi lain produktivitas ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh kondisi terbatasnya kesempatan kerja. Tingginya jumlah pencari kerja yang tidak dibarengi

dengan perluasan lapangan kerja yang tersedia terbatas antara lain dapat dilihat dari jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Jumlah penduduk miskin sebagai peserta yang memiliki kartu Indonesia Sehat (KIS) atau menjadi peserta JKN sebanyak 172.878 jiwa , mereka ini sudah mendapat bantuan dari pemerintah.

4. Minimnya Jiwa Wira Usaha dan Terbatasnya Kesempatan Kerja

Pada tahun 2013 total seluruh kelompok IKM yang statusnya meningkat dan memiliki izin usaha sebanyak 700 IKM sementara untuk koperasi aktif sebesar 41 koperasi. Jumlah koperasi dan UKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya, sehingga kinerja UKM masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja UKM tersebut disebabkan terutama oleh kekurangmampuan UKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan ketidakmampuan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UKM. Tingkat kinerja yang demikian ini berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif lainnya, yang meliputi sumber-sumber informasi, pasar, dan faktor produksi. Masih terbatasnya sumber daya finansial juga merupakan masalah utama bagi usaha mikro. Usaha mikro yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana. Karena itu, usaha mikro ini sangat sulit untuk memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan. Penguasaan teknologi, manajemen, informasi, dan pasar masih jauh dari memadai. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, UKM memerlukan biaya yang relatif besar dan kemandirian manajemen pengelolanya.

5. Penurunan Kualitas Lingkungan

Kegiatan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam, sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan. Kondisi lahan kritis di wilayah Kabupaten Manggarai Timur masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian, mengingat masih ditemukan sekitar 19.595 ha luasnya lahan kritis yang memerlukan penanganan.

6. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Yang Belum Dikelola Maksimal

Kawasan Flores Barat (termasuk Manggarai Timur) memiliki potensi sumber daya alam yang cukup signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kabupaten Manggarai Timur memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Potensi sumber daya alam yang utama adalah potensi pertanian, kelautan dan

pariwisata yang bisa menjadi modal dan pemicu pembangunan wilayah Kabupaten Manggarai Timur, namun produktivitas pengelolaan ketiga sektor tersebut masih belum maksimal. Ketiga sektor ini jika digarap dengan serius dan profesional maka potensi-potensi unggulan tersebut perannya tidak saja hanya sebatas pada peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tapi akan mampu memberikan efek bagi sektor lainnya.

7. Reformasi Birokrasi Belum Berjalan Optimal

Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh masih rendahnya kompetensi dan Sumber Daya Manusia aparatur. Rendahnya kompetensi ditandai dengan masih rendahnya komitmen dan integritas, rendahnya kemampuan atas tugas dan tanggung jawabnya, dan lemahnya inisiatif dan inovasi. Upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan salah satu tuntutan penting pada awal reformasi. Namun prevalensi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme semakin meningkat dan menjadi permasalahan di seluruh lini pemerintahan dari pusat hingga daerah. Tuntutan akan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang berdaya guna, produktif dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta sistem yang transparan, akuntabel dan partisipatif masih memerlukan solusi tersendiri.

Masih belum jelasnya standar kinerja yang dapat diukur untuk menentukan mutu output yang dihasilkan aparatur. Hal tersebut terkait dengan asumsi bahwa seberapa pun kualitas dari output kegiatan yang dilaksanakan, tidak akan memberikan perubahan terhadap penghargaan kepada aparatur yang bersangkutan, kondisi ini terkait dengan motivasi, dan motivasi dalam hal ini dapat dilihat dari dua hal yakni, kebutuhan terhadap implementasi sanksi baik *reward* maupun *punishment*. Pengawasan sebagai bagian dari proses interaksi pembelajaran sekaligus memberikan wahana dijalankannya sistem sanksi, penghargaan tidak atau belum berjalan sebagaimana diharapkan.

8. Masih Terjadinya Ketidakadilan Peran Gender

Kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu saja terjadi. Meminimalisir masalah seperti perlu melibatkan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Peran perempuan sejauh ini untuk kontes Manggarai Timur masih rendah. Kurang berperannya kaum perempuan akan memperlambat proses pembangunan atau bahkan perempuan dapat menjadi beban pembangunan itu sendiri. Disadari bahwa keberhasilan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat

sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan. Pada pelaksanaannya sampai saat ini peran serta kaum perempuan belum dioptimalkan. Untuk itu program pemberdayaan perempuan telah menjadi agenda dan memerlukan dukungan semua pihak. Namun dibalik harapan tersebut justru dilapangan masih saja kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap terjadi, lihat tabel di bawah ini:

Tabel 1.5 : Ciri Korban : Januari – Desember 2017

N o	Kecamatan			Jenis Kelamin		Usia			Pendidikan				
		Baru	Jumlah	L	P	0-17	18-24	25+	Tdk sekolah	S.D	SLT P	SLT A	P. Tinggi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Borong	8	8	-	8	1	1	6	2	1	3	-	2
2	Rana Mese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Poco Ranaka	3	3	-	3	-	-	3	-	3	-	-	-
4	Lamba Leda			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sambi Rampas	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
6	Elar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Elar Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kota Komba	5	5	-	5	2	-	3	-	2	3	-	-
9	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		17	17	-	17	3	2	12	2	6	7	-	2

Sumber : Dinas P2KBP3AKabupaten Manggarai Timur 2017

Tabel 1.6 : Ciri Pelaku : Januari – Desember 2017

N o	Kecamatan	Jumlah Kasus Baru		Ciri Pelaku																	
				Jenis Kelamin		Usia			Pendidikan					Pekerjaan		Hubungan dg Korban				Kebangsaan	
		Baru	Jml	L	P	0-17	18-24	25 +	Tdk Sekolah	S. D	SL TP	SLT A	P. Tinggi	Td k bek er ja	Be ker ja	Orang tua	Kelu arga	Suami /Isteri	Lai n nya	In d o n es ia	A si n g
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Borong	8	8	8	-	-	1	7	-	1	2	3	2	-	8	-	1	7	-	-	-
2	Rana Mese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Poco Ranaka	3	3	3	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
4	Lamba Leda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sambi Rampas	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
6	Elar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Elar Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kota Komba	7	7	7	-	-	1	6	-	4	1	2	-	-	7	-	4	3	-	-	-
9	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		19	19	19	-	-	2	17		8	3	6	2	-	19	1	5	13	-	19	-

Sumber : Dinas P2KBP3AKabupaten Manggarai Timur 2017

Tabel 1.7: Bentuk Kekerasan, Tempat kejadian dan Jenis Pelayanan Yang Diberikan

No	Desa	Jumlah Kasus		Tindak Kekerasan						Tempat Kejadian			Pelayanan yang diberikan				
		Baru/ Berulang / Rujukan	Jml	Fisik	Psikis	Seksual	Eks-ploitasi	Penel antara n	Lainn ya	Ruma h tangga	Temp at kerja	Lainn ya	Penanga nan Pengadu an	Pelaya nan Keseha tan	Reh abili tasi Sosi al	Bant uan Huk um	Pem ulan gan & Rein tegra si
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Borong	8	8	5	-	1	-	2	-	8	-	-	8	-	-	-	-
2	Rana Mese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Poco Ranaka	3	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-
4	Lamba Leda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sambi Rampas	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
6	Elar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Elar Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kota Komba	5	5	1	-	3	-	1	-	5	-	-	5	-	-	-	-
9	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	17	9	-	5	-	3	-	17	-	-	17	-	-	-	-

Sumber : Dinas P2KBP3AKabupaten Manggarai Timur 2017

1.7 KERAGAMAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Merujuk pada data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017 menunjukkan bahwa Kondisi Aparatur Sipil Negeri (ASN) Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan 31 Desember 2017 berjumlah 4.011 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Komposisi ASN Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.8 Komposisi ASN Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SD	11	0	11
2	SLTP	36	3	39
3	SMK	159	95	254
4	SMA	258	102	360
5	SPG	239	121	360
6	SGO	47	12	59
7	PGA	39	31	70
8	D1	4	42	46
9	D2	199	99	298
10	D3	263	410	673
11	D4	0	0	0
12	S1	1123	652	1775
13	S2	29	9	38
14	KEDOKTERAN	11	13	24
15	APOTEKER	2	2	4
JUMLAH		2420	1591	4011

Sumber : BKPSDM Kabupaten Manggarai Timur 2017

2. Komposisi ASN Berdasarkan Agama

Tabel 1.9 Komposisi ASN Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KATOLIK	2283	1485	3768
2	ISLAM	126	97	223
3	PROTESTAN	8	6	14
4	HINDU	3	3	6
5	BUDHA	0	0	0
JUMLAH		2420	1591	4011

Sumber : BKPSDM Kabupaten Manggarai Timur 2017

3. Komposisi ASN Berdasarkan Golongan

Tabel 1.10 Komposisi ASN Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	I/a	0	0	0
	I/b	4	0	4
	I/c	11	0	11
	I/d	8	1	9
JUMLAH GOL.1				24
2	II/a	140	97	237
	II/b	102	45	147
	II/c	166	126	292
	II/d	117	128	245
JUMLAH GOL.2				921
3	III/a	345	310	655
	III/b	286	325	611
	III/c	320	172	492
	III/d	316	166	482
JUMLAH GOL.3				2240
4	IV/a	535	214	749
	IV/b	45	5	50
	IV/c	24	2	26
	IV/d	1	0	1
JUMLAH GOL.4				826
TOTAL PNS				4011

Sumber: BKPSDM Kabupaten Manggarai Timur 2017

4. Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.11 Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan

NO	ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	II A	1	0	1
2	II B	30	3	33
3	III A	49	2	51
4	III B	72	8	80
3	IV A	259	106	365
4	IV B	44	12	56
JUMLAH		455	131	586

Sumber: BKPSDM Kabupaten Manggarai Timur 2017

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH MANGGARAI TIMUR

2.1.1 Visi dan Misi

Visi merupakan mimpi yang harus diwujudkan. Cita – cita ideal yang menjadi target yang harus dicapai. Visi merupakan gambaran masa depan yang ideal yang menjadi dasar/arah/pondasi dalam proses perencanaan. Karena itu, visi merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai atau direalisasikan. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Tahun 2009-2029 yang merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah setiap lima tahun yang memuat arah kebijakan dan target pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, maka perumusan visi dan misi harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut.

Visi Kabupaten Manggarai Timur perlu dipahami dan didukung bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para *stakeholder* dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan visi dilakukan dengan menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada kurun waktu 5 tahun yang telah lewat. Dengan demikian visi Kabupaten Manggarai Timur dirumuskan sebagai berikut :

VISI :

“TERWUJUDNYA MANGGARAI TIMUR YANG LEBIH SEJAHTERA, CERDAS, KREATIF, INOVATIF, SEHAT, RAMAH LINGKUNGAN, DEMOKRATIS, BERMARTABAT DENGAN MENJUNJUNG TINGGI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENUJU MASYARAKAT YANG LEBIH MANDIRI”

Visi tersebut di atas kaya makna, menyeluruh dan terpadu. Asumsi dasar visi pembangunan dimaknai sebagai berikut:

1. Lebih Sejahtera, adalah kondisi suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial, serta secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi diatas rata rata kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Kreatif dan Inovatif, adalah suatu kondisi masyarakat yang mampu mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan;
3. Ramah Lingkungan, adalah sikap masyarakat dalam melaksanakan pembangunan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

4. Demokratis, mencerminkan keterwakilan proses dan substansi agenda-agenda pembangunan yang dilakukan secara rasional dan objektif dengan mempertimbangkan aspek keterbukaan, partisipasi publik, kesamaan dan keadilan;
5. Bermartabat adalah sikap dan kondisi masyarakat yang taat dan patuh terhadap norma hukum, adat dan budaya lokal, demokratis dan ramah lingkungan;
6. Menjunjung Hukum dan Hak Asasi Manusia, adalah suatu kondisi masyarakat yang taat terhadap hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; dan
7. Mandiri adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

Sementara misi merupakan komponen yang paling mendasar bagi pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sehingga mampu menyatukan segenap komponen-komponen dasar dalam organisasi dalam mencapai Visi. Rumusan misi mencerminkan upaya untuk mewujudkan visi, maka perlu ada upaya untuk menjabarkan rumusan visi secara nyata dalam berbagai kondisi yang diperkirakan akan menandai atau mengindikasikan terwujudnya visi tersebut. Semakin rinci dan jelas gambaran visi, akan semakin terarah pula rumusan-rumusan misi dalam mewujudkan visinya. Untuk mencapai visi tersebut diatas maka misi Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai Timur Yang Produktif Dan Berdaya Saing

Kemandirian sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing merupakan pra-syarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu : pendidikan yang bermutu tinggi di semua strata, pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan peningkatan derajat kesehatan yang tinggi dan merata ke seluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumber daya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender. Dengan demikian diharapkan sumber daya manusia Manggarai Timur memiliki daya saing yang dapat memajukan daerahnya sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri.

2.Membuka Isolasi Daerah dan Membangun Infrastruktur secara Merata

Jaringan infrastruktur wilayah yang handal sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi. Karena itu, pemerintah daerah perlu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru dalam mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh Manggarai Timur. Terpenuhiya kebutuhan perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya juga merupakan syarat mutlak yang harus diwujudkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Manggarai Timur. Meratanya pembangunan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan di seluruh Manggarai Timur akan mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

3.Menumbuhkembangkan Ekonomi Rakyat Melalui Optimalisasi Keunggulan Lokal

Misi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan unsur penting menuju kemandirian daerah melalui pengembangan keunggulan lokal berbasis desa. Usaha ekonomi mikro dapat dimulai pada lapisan masyarakat di akar rumput melalui skala rumah tangga yang kemudian akan didorong untuk mengembangkan daya saing yang sehat dalam dunia usaha. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan yang berkualitas secara merata ke seluruh pelosok daerah serta menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

4.Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel yang Berkarakter Melayani

Manajemen pemerintahan akan sangat menentukan kemajuan sebuah daerah dalam berkompetisi di otonomi daerah. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional adalah merupakan persyaratan penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan kepercayaan masyarakat dan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa sehingga pada gilirannya akan memperoleh dukungan dan partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

2.1.2 Tujuan

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut :

1. Misi Membangun Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai Timur Yang Produktif Dan Berdaya Saing, dengan tujuan :
 - a. Mewujudkan Pendidikan yang Merata, Unggul dan Terjangkau;
 - b. Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olah Raga;
 - c. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat secara Berkelanjutan;
 - d. Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga;
 - e. Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin;
 - f. Pelestarian Seni Budaya Manggarai.
2. Misi Membuka Isolasi Daerah dan Membangun Infrastruktur secara Merata, dengan tujuan :
 - a. Meningkatkan Infrastruktur Secara Merata dan Membuka Keterisolasian Daerah Terpencil Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - b. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Penanggulangan Bencana yang Handal;
 - c. Mewujudkan Penataan Ruang yang Terpadu dan Berkelanjutan.
3. Misi Menumbuhkembangkan Ekonomi Rakyat Melalui Optimalisasi Keunggulan Lokal, dengan tujuan :
 - a. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Sinergitas Program – Program Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. Menumbuhkembangkan Ekonomi Daerah.
4. Misi Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel yang Berkarakter Melayani, dengan tujuan:
 - a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Bersih; dan
 - b. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dan aparat terhadap Hukum dan HAM.

2.1.3 Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Misi Membangun Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai Timur Yang Produktif Dan Berdaya Saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan Akses Pendidik Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang Merata Kepada Masyarakat.
 - b. Meningkatkan Mutu Pendidikan, dan Tenaga Kependidikan.
 - c. Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dan Meningkatkan Prestasi Olah raga.

- d. Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat yang Bermutu, Merata dan Terjangkau.
 - e. Menurunnya Kematian Ibu Baru Melahirkan dan Anak Baru Lahir.
 - f. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Melalui Promosi, Pemberdayaan dan Penyehatan Lingkungan.
 - g. Terkendalinya Jumlah Penduduk.
 - h. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - i. Meningkatnya Pemahaman Anggota Keluarga terhadap Bahaya Narkoba.
 - j. Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin.
 - k. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
2. Misi Membuka Isolasi Daerah dan Membangun Infrastruktur secara Merata, dengan sasaran :
- a. Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata.
 - b. Terwujudnya Infrastruktur Air Bersih, Drainase dan Sanitasi yang Berkualitas dan Merata.
 - c. Terwujudnya Pengelolaan Irigasi yang Optimal.
 - d. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
 - e. Seluruh Kawasan Dapat Diakses Oleh Sarana Transportasi Publik yang Nyaman dan Lancar.
 - f. Manggarai Timur Menjadi Kabupaten yang Hijau, yang Bersih, Sehat dan Ramah Lingkungan.
 - g. Tertanggulangnya Bencana Secara Dini dan Komprehensif.
 - h. Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.
3. Misi Menumbuhkembangkan Ekonomi Rakyat Melalui Optimalisasi Keunggulan Lokal, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan).
 - b. Meningkatnya Nilai Tambah Hasil dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan).
 - c. Meningkatkan Ketahanan Pangan.
 - d. Meningkatnya Jumlah Pengunjung Objek Wisata.
 - e. Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM.
 - f. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Berinvestasi.
 - g. Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja.

4. Misi Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel yang Berkarakter Melayani, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Sinergis dan Terarah.
 - b. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.
 - c. Meningkatnya Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Daerah.

2.1.4 Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja RPJMD 2014 - 2019

2.1.4.1 Strategi Pembangunan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup : (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah. Secara umum, strategi kebijakan pembangunan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014– 2019, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah:

1. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
2. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungan;
3. Percepatan pembangunan daerah dengan mengembangkan ekonomi lokal; dan
4. Tata Kelola Pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik.

2.1.4.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Manggarai Timur menitik beratkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan pembangunan diperlukan adanya strategi daerah yang kemudian akan menetapkan menjadi arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Manggarai Timur merupakan derivasi/turunan dari arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJM Provinsi) dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.

Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Manggarai Timur periode tahun 2014 – 2019 adalah :

1. Peningkatkan mutu pendidikan;
2. Pengentasan kemiskinan;
3. Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Kesempatan Berusaha/iklim usaha;
5. Peningkatan Mutu Infrastruktur dan membuka akses daerah yang terisolasi;
6. Penataan Lingkungan; dan
7. Pelayanan Publik.

2.1.4.3 Program untuk Pencapaian Sasaran

Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Adapun penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Peningkatkan mutu pendidikan;
 - a. Urusan Wajib Pendidikan, melalui program :
 - (1) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan;
 - (2) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
 - (3) Program Pendidikan Menengah; dan
 - (4) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
 - b. Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga:
 - (1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; dan
 - (2) Program Pengembangan Keragaman Budaya.
 - c. Urusan Wajib Perpustakaan dan Arsip:
 - (1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
 - (2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen atau Arsip; dan
 - (3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
2. Pengentasan kemiskinan:
 - a. Urusan Wajib Pendidikan, melalui program :
 - (1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
 - b. Urusan Wajib Kesehatan, melalui program :
 - (1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - (2) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; dan
 - (3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

- c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum, melalui program :
 - (1) Program Pengembangan Perumahan;
 - (2) Program Lingkungan Hidup Sehat Perumahan;
 - (3) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; dan
 - (4) Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- d. Urusan Wajib Keluarga Berencana, melalui program :
 - (1) Program KB.
- e. Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melalui program :
 - (1) Program Penataan Administrasi Kependudukan.
- f. Urusan Wajib Tenaga Kerja, melalui program :
 - (1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
- g. Urusan Wajib Sosial, melalui program :
 - (1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Padat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
- h. Urusan Wajib Koperasi dan UKM, melalui program :
 - (1) Program Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Menengah Yang Kondusif;
 - (2) Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Menengah Yang Kondusif;
 - (3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - (4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- i. Urusan Pilihan Pertanian, melalui program :
 - (1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; dan
 - (2) Peningkatan Ketahanan Pangan.
- j. Urusan Pilihan Industri, melalui program :
 - (1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- 3. Pelayanan Kesehatan;
 - a. Urusan Wajib Kesehatan:
 - (1) Program Peningkatan Sumber Daya Masyarakat;
 - (2) Program Pengadaan, Peningkatan Sarpras RSUD;
 - (3) Program Pemeliharaan Sarpras RSUD;
 - (4) Program Peningkatan Manajemen RSUD;
 - (5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - (6) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - (7) Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - (8) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 - (9) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

- (10) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- (11) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarpras Pukesmas/Pustu dan jaringannya; dan
- (12) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
- b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum, melalui program :
 - (1) Program Pembangunan Fasilitas Umum.
- 4. Peningkatan Kesempatan Berusaha/Iklim Usaha;
 - a. Urusan Wajib Pertanahan:
 - (1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
 - b. Urusan Pilihan Perindustrian :
 - (1) Program Pengembangan Industri IKM.
 - c. Urusan Pilihan Pertanian:
 - (1) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
 - (2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
 - (3) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
 - (4) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
 - (5) Program Pengembangan Konservasi Wilayah Pesisir;
 - (6) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Lapangan/Pengamat Hama Pertanian;
 - (7) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian;
 - (8) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian;
 - (9) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan;
 - (10) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
 - (11) Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik (SPP Mano); dan
 - (12) Program pendidikan menengah (SPP Mano).
 - d. Urusan Pilihan Perdagangan :
 - (1) Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport; dan
 - (2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
- 5. Peningkatan Mutu Infrastruktur Sebagai Kota Jasa:
 - a. Urusan Wajib Pekerjaan Umum:
 - (1) Program pembangunan jalan dan jembatan;
 - (2) Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
 - (3) Rehabilitas/pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - (4) Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
 - (5) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; dan
 - (6) Program Pengendalian banjir.

- b. Urusan Lingkungan Hidup:
 - (1) Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
- c. Urusan Pilihan Kehutanan:
 - (1) Program rehabilitasi hutan dan lahan.
- 6. Penataan Lingkungan:
 - a. Urusan Wajib Tata Ruang:
 - (1) Program Perencanaan tata ruang;
 - (2) Program Pemanfaatan ruang.
 - b. Urusan Wajib Lingkungan:
 - (1) Program Program Peningkatan pelayanan dan pengelolaan kebersihan;
 - (2) Program Pengembang kinerja pengelolaan persampahan;
 - (3) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - (4) Program Pembangunan/pemeliharaan taman;
 - (5) Program Penataan areal pemakaman;
 - (6) Program Kualitas kebersihan lingkungan;
 - (7) Program Penataan dan pemeliharaan PJU; dan
 - (8) Program Pengendalian, pencemaran Lingkungan Hidup.
 - c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum :
 - (1) Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; dan
 - (2) Program pengembangan fasilitas umum.
 - d. Urusan Wajib Kesehatan:
 - (1) Program Lingkungan Sehat.
- 7. Pelayanan Publik :
 - a. Urusan Perencanaan :
 - (1) Program pengembangan data dan informasi.
 - b. Urusan Pemerintahan Umum:
 - (1) Program Penataan Kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan;
 - (2) Program Peningkatan penataan organisasi pemerintah daerah;
 - (3) Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah;
 - (4) Peningkatan pelayanan dan kapasitas pemerintah kecamatan; dan
 - (5) Program Peningkatan pelayanan prima terpadu.
 - c. Urusan Komunikasi dan Informasi:
 - (1) Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.
 - d. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil:
 - (1) Program penataan administrasi kependudukan.

- e. Urusan Kepegawaian:
- (1) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
 - (2) Program Pembinaan dan pengembangan aparatur; dan
 - (3) Program Peningkatan informasi dan kedudukan hukum pegawai.

2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja dan targetnya. Lihat tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran	IKU	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Akses Pendidik Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang Merata Kepada Masyarakat	Meningkatnya Angka Melek Huruf	%	98,20
2.	Meningkatnya Mutu Pendidikan, dan Tenaga Kependidikan	Jumlah PTK yang S – 1	Orang	1502
3.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dan Meningkatnya Prestasi Olah raga	Jumlah Kompetisi Olah Raga yang Diselenggarakan	Kali	1
4.	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat yang Bermutu, Merata dan Terjangkau	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	67,8
5.	Menurunnya Kematian Ibu Baru Melahirkan dan Anak Baru Lahir	Angka Kematian Bayi per 1.000KH	Jumlah bayi mati / Lahir hidup	9.5/1000 KH
		Angka Kematian Balita per 1.000KH	Jumlah balita mati / Lahir hidup	0,65/100 0 KH
		Angka Kematian Ibu per 1000 KH	Jumlah ibu mati / Lahir hidup	160/100.000 KH
6.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Melalui Promosi, Pemberdayaan dan Penyehatan Lingkungan	Persentase Desa Siaga Aktif dalam Pemberantasan Penyakit	%	100
7.	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Persentase Peserta KB Aktif	%	65
8.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Kasus Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	100
9.	Meningkatnya Pemahaman Anggota Keluarga terhadap Bahaya Narkoba	Jumlah Media Penyebaran Informasi Penanggulangan Bahaya Narkoba	Media	3 Media

10.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin	Persentase PMKS Skala Kabupaten/Kota yang menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usia Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis lainnya	%	75
11.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok	2
12.	Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	%	71,95
13.	Terwujudnya Infrastruktur Air Bersih, Drainase dan Sanitasi yang Berkualitas dan Merata	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	81,76
		Persentase Tersedianya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari	%	55,20
14.	Terwujudnya Pengelolaan Irigasi yang Optimal	Rasio Panjang Jaringan Irigasi	%	55,40
15.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	%	82,15
		Mengurangi luasan kawasan kumuh pada desa dan perkotaan	M ²	1.170
16.	Seluruh Kawasan Dapat Diakses Oleh Sarana Transportasi Publik yang Nyaman dan Lancar	Jumlah Arus Penumpang dalam Kurun Waktu Tertentu	Orang	22.190
		Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan	%	55
17.	Manggarai Timur Menjadi Kabupaten yang Hijau, yang Bersih, Sehat dan Ramah Lingkungan	Persentase Penanganan Sampah	%	8,24
		Pemantauan Status Mutu Air	%	100
		Rasio Ruang Terbuka Hijau	%	42,74
18.	Tertanggulangnya Bencana Secara Dini dan Komprehensif	Persentase Pengurangan Resiko terhadap Bencana	%	100
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100
19.	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfatan dan Pengendalian Tata Ruang	Ketaatan terhadap RTRW (Tata Ruang)	%	85,5
20.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan)	Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan	Ton/Ha	31,12
		Luas areal tanaman perkebunan yang ditingkatkan	Ha	350
		Jumlah produksi perikanan	Ton	3.230,3

		Jumlah Populasi Ternak	Ekor	143.059
21.	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)	Nilai Tukar Petani	Nilai	34,28
22.	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	%	117
23.	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Objek Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	8.000
24.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Orang	25
		Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	145
25.	Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Investasi Yang Masuk	Rp.	5.000.000.000
26.	Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	%	1 : 100
27.	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Sinergis dan Terarah	Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	ADA	ADA
28.	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase organisasi Perangkat Daerah yang Menyampaikan dokumen LAKIP yang Terintegrasi dan Tepat Waktu	%	100
		Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan	Opini	WTP
29.	Meningkatnya Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	24 M

2.2.1 Rencana Anggaran Tahun 2017

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung . Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Rencana Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	308.014.929.987,38	55,58
2	Belanja Langsung	246.212.929.519,00	44,42
	Jumlah	554.227.859.506,38	100,00

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

Sementara Jumlah Anggaran yang direncanakan untuk kepentingan tahun anggaran 2017 yang mendanai Belanja pembangunan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran 2017
1	2	3
1	PENDAPATAN	934,957,641,753.11
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
3	Pendapatan Pajak Daerah	11,132,796,498.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	2,146,000,000.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,498,720,325.00
6	Lain-lain PAD yang Sah	69,275,403,117.00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	90,052,919,940.00
8	PENDAPATAN TRANSFER	
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	
10	Dana Bagi Hasil Pajak	8,756,872,477.00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1,606,867,826.00
12	Dana Alokasi Umum	499,269,564,000.00
13	Dana Alokasi Khusus	188,294,916,431.00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	697,928,220,734.00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	
16	Dana Otonomi Khusus	0.00
17	Dana Penyesuaian	126,092,079,000.00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	126,092,079,000.00
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	18,523,232,479.11
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	18,523,232,479.11
23	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	20,884,422,079.11
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
25	Pendapatan Hibah	2,361,189,600.00
26	Pendapatan Dana Darurat	0
27	Pendapatan Lainnya	0
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	2,361,189,600.00
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	
30	BELANJA	805,707,490,481.38
31	BELANJA OPERASI	
32	Belanja Pegawai	308,014,929,987.38
33	Belanja Barang	246,212,929,519.00
34	Bunga	
35	Subsidi	
36	Hibah	30,219,305,550.00
37	Bantuan Sosial	500,000,000.00
38	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	584,947,165,056.38

39	BELANJA MODAL	220,460,325,425.00
40	Belanja Tanah	0
41	Belanja Peralatan dan Mesin	31,244,207,229.00
42	Belanja Gedung dan Bangunan	73,135,875,610.00
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	105,213,279,947.00
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	10,866,962,639.00
45	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	220,460,325,425.00
46	BELANJA TAK TERDUGA	
47	Belanja Tak Terduga	300,000,000.00
48	Jumlah Belanja Tak Terduga (55)	300,000,000.00
49	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	
50	TRANSFER	181,791,827,031.30
51	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1,000,449,000.00
52	Transfer Bagi Hasil Pajak	850,000,000.00
53	Transfer Bagi Hasil Lainnya	150,449,000.00
54	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	180,791,378,031.30
55	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	178,142,970,791.30
56	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2,648,407,240.00
57	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL (61 s/d 63)	180,791,378,031.30
58	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	
59	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	(52,541,675,759.57)
60	PEMBIAYAAN	10,000,000,000.00
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
62	Pengunaan SILPA	62,179,797,757.57
63	Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Lainnya	361,878,002.00
64	Jumlah Penerimaan (72 s/d 73)	62,541,675,759.57
65	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
66	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10,000,000,000.00
67	Pemberian Pinjaman (dana bergulir)	0
68	Jumlah Pengeluaran (77 s/d 78)	10,000,000,000.00
69	PEMBIAYAAN NETTO (74 - 79)	52,541,675,759.57
70	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 80)	(0.00)

Adapun Rencana Anggaran Indikator Kinerja Utama pada Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rencana Anggaran Indikator Kinerja Utama Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

No.	Sasaran	IKU	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Akses Pendidik Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang Merata Kepada Masyarakat	Meningkatnya Angka Melek Huruf	150.000.000,00
2.	Meningkatnya Mutu Pendidikan, dan Tenaga Kependidikan	Jumlah PTK yang S – 1	24.873.737.350,00
3.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dan Meningkatnya Prestasi Olah raga	Jumlah Kompetisi Olah Raga yang Diselenggarakan	939.321.684,00
4.	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat yang Bermutu, Merata dan Terjangkau	Angka Usia Harapan Hidup	101.047.213.874,00
5.	Menurunnya Kematian Ibu Baru Melahirkan dan Anak Baru Lahir	Angka Kematian Bayi per 1.000KH	36.725.000,00
		Angka Kematian Balita per 1.000KH	281.025.000,00
		Angka Kematian Ibu per 1000 KH	36.725.000,00
6.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Melalui Promosi, Pemberdayaan dan Penyehatan Lingkungan	Presentase Desa Siaga Aktif dalam Pemberantasan Penyakit	916.346.000,00
7.	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Presntase Peserta KB Aktif	5.011.409.634,00
8.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Presentase Kasus Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	248.292.500,00
9.	Meningkatnya Pemahaman Anggota Keluarga terhadap Bahaya Narkoba	Jumlah Media Penyebaran Informasi Penanggulangan Bahaya Narkoba	20.000.000,00

10.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin	Persentase PMKS Skala Kabupaten/Kota yang menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usia Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenisnya	1.103.201.549,00
11.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	3.832.723.250,00
12.	Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata	Presentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	56.948.946.187,00
13.	Terwujudnya Infrastruktur Air Bersih, Drainase dan Sanitasi yang Berkualitas dan Merata	Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi	6.865.861.750,00
		Presentase Tersedianya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari	17.568.591.263,00
14.	Terwujudnya Pengelolaan Irigasi yang Optimal	Rasio Panjang Jaringan Irigasi	24.174.506.000,00
15.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	5.847.124.500,00
		Mengurangi luasan kawasan kumuh pada desa dan perkotaan	582.683.750,00
16.	Seluruh Kawasan Dapat Diakses Oleh Sarana Transportasi Publik yang Nyaman dan Lancar	Jumlah Arus Penumpang dalam Kurun Waktu Tertentu	215.700.000,00
		Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan	4.109,225,000,00
17.	Manggarai Timur Menjadi Kabupaten yang Hijau, yang Bersih, Sehat dan Ramah Lingkungan	Persentase Penanganan Sampah	1.777.686.000,00
		Pemantauan Status Mutu Air	178.859.000,00

		Rasio Ruang Terbuka Hijau	427.288.300,00
18.	Tertanggulangnya Bencana Secara Dini dan Komprehensif	Persentase Pengurangan Resiko terhadap Bencana	927.646.000,00
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	18.037.000.000,00
19.	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfatan dan Pengendalian Tata Ruang	Ketaatan terhadap RTRW (Tata Ruang)	179.286.500,00
20.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan)	Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan	235.190.000,00
		Jumlah Produktivitas Produk Perkebunan	358.337.500,00
		Jumlah Produksi Perikanan	1.781.101.000,00
		Jumlah Populasi Ternak	1.305.338.000,00
21.	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)	Nilai Tukar Petani	-
22.	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	1.958.762.050,00
23.	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Objek Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.521.099.500,00
24.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	76.500.000,00
		Jumlah Koperasi Aktif	1.162.425.000,00
25.	Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Investasi Yang Masuk	1.058.969.000,00
26.	Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	597.114.275,00
27.	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Sinergis dan Terarah	Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.051.457.921,00

28.	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menyampaikan dokumen LAKIP yang Terintegrasi dan Tepat Waktu dalam Kerangka Peningkatan Nilai LAKIP	109.892.000,00
		Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan	5.261.720.000,00
29.	Meningkatnya Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.721.269.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahunan dianalisis berdasarkan pengukuran yang berdasarkan target, realisasi dan prosentase untuk menilai sejauh mana kemajuan atau kemunduran capaian kinerja masing-masing indikator. Kinerja yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan, sasaran, serta Visi dan Misi organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi dan membandingkan dengan realisasi tahun 2016 serta dengan RPJMD.

Bagian ini memaparkan data-data LAKIP terutama Indikator Kinerja yang disajikan dalam bentuk narasi singkat terkait target , (capaian) realisasi dan persentasi tahun 2017 serta perbandingannya dengan realisasi tahun 2016. Paparan data indikator yang merupakan turunan dari sasaran-sasaran yang telah ditargetkan, dilaksanakan serta direalisasikan pada tahun anggaran 2017. Bagian ini mencakupi, *pertama* : Pemaparan capaian IKU tiga tahun terakhir, *kedua* : pemaparan capaian IKU tahun 2017 yang diikuti dengan Evaluasi dan Analisisasi Capaian Kinerja, dan *ketiga* : Akuntabilitas Kinerja Keuangan. Ketiga poin ini yang ditampilkan di bawah ini.

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang ada dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi tahun 2017 dan menilai realisasi pencapaian tiga tahun terakhir ketika dibandingkan dengan target lima tahunan RPJMD. Penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 untuk mengukur kinerja selama tiga tahun terakhir; tabel 3.2 untuk mengukur Pencapaian Kinerja Tahun 2017 dibandingkan dengan target kinerjanya, target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Untuk melihat pencapaian selama tiga tahun terakhir, termasuk tahun 2017 dapat dilihat dalam dua tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Realisasi Capaian IKU Bupati Manggarai Timur Tahun 2014 – 2017 (Tiga Tahun Terakhir)

No.	Sasaran	IKU	2015	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)
					Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Akses Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang Merata Kepada Masyarakat	Meningkatnya Angka Melek Huruf	94,21	99,33	98,20	99,30	101,12	97,03	104,21
2.	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Jumlah PTK yang S – 1	4233	1459	1502	2909	193,68	1552	187,43
3.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dan Meningkatnya Prestasi Olah raga	Jumlah Kompetisi yang Diselenggarakan	1	1	1	1	100	4/6	66,66
4.	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat yang Bermutu, Merata dan Terjangkau	Angka Usia Harapan Hidup	57	67,39	67,8	-	-	68	-
5.	Menurunnya Kematian Ibu Baru Melahirkan dan Anak Baru Lahir	Angka Kematian Ibu per 100.000KH	162/100 000 KH	162/10 0000 KH	160/100 0000 KH	186/100000 0 KH	86,02	160/100000 KH (Target pengukuran MDGS)	86,02 (Terhadap pengukura n MDGS)
		Angka Kematian Bayi per 1.000KH	8,48/100 0KH	8,48/10 00 KH	9,5/1000 KH	8,17/1000 KH	116,27	9.5/1000KH (Target pengukuran MDGS)	116,27 (Terhadap pengukura n MDGS)
		Angka Kematian Balita per 1.000KH	0,32/100 0 KH	0,65/10 00 KH	0,65/100 00 KH	2,41/1000 KH	26,97	0,65/1000 KH (Target pengukuran MDGS)	26,97 (Terhadap pengukura n MDGS)
6.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Melalui Promosi, Pemberdayaan dan Penyehatan Lingkungan	Persentase Desa Siaga Aktif dalam Pemberantasan Penyakit	58,49	91,4	91,4	91,4	100	100	91,4
7.	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Persentase Peserta KB Aktif	72	80,7	65	76	116	62,5	116
8.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Kasus Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100	100	100	100	100	80

9.	Meningkatnya Pemahaman Anggota Keluarga terhadap Bahaya Narkoba	Jumlah Media Penyebaran Informasi Penanggulangan Bahaya Narkoba	3	3	3	3	100	9/15	80
10.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin	Persentase PMKS SkalaKab./Kota yang menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usia Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis lainnya	20	23	75	25	25	80	45
11.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	2	2	2	2	100	10	60
12.	Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	66	71,95	71,95	74,34	103,33	67,87	109,53
13.	Terwujudnya Infrastruktur Air Bersih, Drainase dan Sanitasi yang Berkualitas dan Merata	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	81,60	81,76	81,76	84,68	103,58	92,6	91,44
		Persentase Tersedianya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari	52,34	55,20	55,20	55,24	100,08	55,20/100	100.07
14.	Terwujudnya Pengelolaan Irigasi yang Optimal	Rasio Panjang Jaringan Irigasi	9.051,6 M	5540	5540	8194	147,92	21011/15917	112,05
15.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	-	420	326	326	100	978	33,33
		Mengurangi luasan kawasan kumuh pada desa dan	-	-	1170	1170	100	1887	62

		perkotaan							
16.	Seluruh Kawasan Dapat Diakses Oleh Sarana Transportasi Publik yang Nyaman dan Lancar	Jumlah Arus Penumpang dalam Kurun Waktu Tertentu	108000 (50 %)	22735	22190	23759	107,07	22750	60,79
		Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan	22,25 (89 %)	28,32	55	35	63,64	75/53,26	46
17.	Manggarai Timur Menjadi Kabupaten yang Hijau, yang Bersih, Sehat dan Ramah Lingkungan	Persentase Penanganan Sampah	5,36	7,47	8,24	6,49	78,76	5,5/7.47	135,83
		Persentase Pemantauan Status Mutu Air	2 (100 %)	99,7	100	100	100	100	100
		Rasio Ruang Terbuka Hijau	42,74	42,74	42,74	42,74	100	42,74	100
18.	Tertanggulangnya Bencana Secara Dini dan Komprehensif	Persentase Pengurangan Resiko terhadap Bencana	100	100	100	100	100	100	80
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	100	100	100	100	100	100	80
19.	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfatan dan Pengendalian Tata Ruang	Ketaatan terhadap RTRW (Tata Ruang)	74	74	85,5	70	82	90	77,77
20.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan)	Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan	55,18	19,75	31,12	19,17	61,60	69,97	72,08
		Luas areal tanaman perkebunan unggulan yang ditingktkan	413	7825	350	100	28,57	10500	84,24
		Jumlah produksi perikanan	2480,6	4.250,05	3230,3	4.408,34	136,46	3.500	125,95
		Jumlah Populasi Ternak	103.39	120837	143.059	107.624	75,23	142.870	80,096
21.	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)	Nilai Tukar Petani	103	100,24	100,24	104,8	104,55	33,62	97,61

22.	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	129	150	117	137	117,09	80	417,66
23.	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Objek Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	10844	12839	8000	14435	180	9000	185
24.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Jumlah UMKM yang Ada	25	25	25	25	100	245	90
		Jumlah Koperasi Aktif	54	86	145	171	117	60/91.9	66,66
25.	Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Investasi Yang Masuk	21.336.545.345	5.100.000.000	5.000.000.000	13,7M	274	53.000.000.000	75,73
26.	Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	100	1:85	1 : 100	1:87,5	97,36	1:150	87,5
27.	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Sinergis dan Terarah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	ADA	ADA	ADA	ADA	100	ADA	ADA
28.	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase OPD yang Menyampaikan LAKIP yang Terintegrasi dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100
		Opini BPK dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WTP	BELUM	BELUM	WTP	WDP
29.	Meningkatnya Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24.445.304.048,98	19.678.696.908.90	24.000.000.000,00	85.117.394.766,71	354,66	27.000.000.000	315,24

Pencapaian Kinerja Tahun 2017 dibandingkan dengan target kinerjanya, target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 , ditunjukkan tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	2017			2018	
				Target	Realisasi	Capaian	Target (RPJMD)	PK
1.	Meningkatnya Akses Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang Merata Kepada Masyarakat	Meningkatnya Angka Melek Huruf	%	98,20	99,30	101,12	97,03	97,03
2.	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Jumlah PTK yang S – 1	Orang	1502	2909	193,68	1552	1527
3.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dan Meningkatnya Prestasi Olah raga	Jumlah Kompetisi yang Diselenggarakan	Kali	1	1	100	6	1
4.	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat yang Bermutu, Merata dan Terjangkau	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	67,8	-	-	68	68
5.	Menurunnya Kematian Ibu Baru Melahirkan dan Anak Baru Lahir	Menekan Angka Kematian Ibu	Jumlah bayi mati/ lahir hidup	160/1000000 KH	186/1000000 KH	86,02	160/100000 KH (Target pengukuran MDGS)	162/ 100.000 KH
		Menekan Angka Kematian Bayi	Jumlah balita mati/ lahir hidup	9,5/1000 KH	8,17/1000 KH	116,27	9.5/1000KH (Target pengukuran MDGS)	9,3/ 1.000 KH
		Menekan Angka Kematian Balita	Jumlah ibu mati/ lahir hidup	0,65/10000 KH	2,41/1000 KH	26,97	0,65/1000 KH (Target pengukuran MDGS)	0,65/ 1.000 KH
6.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Melalui Promosi, Pemberdayaan dan Penyehatan Lingkungan	Persentase Desa Siaga Aktif dalam Pemberantasan Penyakit	%	100	91,4	100	100	100
7.	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Persentase Peserta KB Aktif	%	65	76	116	62,5	65
8.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Persentase Kasus Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	100	100	100	100	100

	Anak							
9.	Meningkatnya Pemahaman Anggota Keluarga terhadap Bahaya Narkoba	Jumlah Media Penyebaran Informasi Penanggulangan Bahaya Narkoba	Media	3	3	100	9/15	-
10.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin	Persentase PMKS SkalaKab./Kota yang menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usia Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis lainnya	%	25	75	25	80	80
11.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok	2	2	100	10	2
12.	Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	%	71,95	74,34	103,33	67,87	75,04
13.	Terwujudnya Infrastruktur Air Bersih, Drainase dan Sanitasi yang Berkualitas dan Merata	Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	81,76	84,68	103,58	92,6	91,44
		Presentase Tersedianya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari	%	55,20	55,24	100,08	55,20/100	58,25
14.	Terwujudnya Pengelolaan Irigasi yang Optimal	Rasio Panjang Jaringan Irigasi	%	55,40	81,94	147,92	21011/15917	75,24
15.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Unit	326	326	100	978	326

		Mengurangi luasan kawasan kumuh pada desa dan perkotaan	Unit	1170	1170	100	1887	-
16.	Seluruh Kawasan Dapat Diakses Oleh Sarana Transportasi Publik yang Nyaman dan Lancar	Jumlah Arus Penumpang dalam Kurun Waktu Tertentu	Orang	22190	23759	107,07	22750	22.190
		Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan	%	55	35	63,64	75/53,26	55
17.	Manggarai Timur Menjadi Kabupaten yang Hijau, yang Bersih, Sehat dan Ramah Lingkungan	Persentase Penanganan Sampah	%	8,24	6,49	78,76	5,5/7.47	8,24
		Persentase Pemantauan Status Mutu Air	%	100	100	100	100	100
		Rasio Ruang Terbuka Hijau	%	42,74	42,74	100	42,74	42,74
18.	Tertanggulangnya Bencana Secara Dini dan Komprehensif	Persentase Pengurangan Resiko terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	100	100	100
19.	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfatan dan Pengendalian Tata Ruang	Ketaatan terhadap RTRW (Tata Ruang)	%	85,5	70	82	90	90
20.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan)	Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan	Ton/Ha	31,12	19,17	61,60	69,97	4,12
		Luas areal tanaman perkebunan unggulan yang ditingtkan	Ha	350	100	28,57	10500	85
		Jumlah produksi perikanan	Ton	3230,3	4.408,34	136,46	3.500	3.500
		Jumlah Populasi Ternak	Ekor	143.059	107.624	75,23	142.870	143,070
21.	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil dan Daya Saing Produk	Nilai Tukar Petani	Nilai	100,24	104,8	104,55	33,62	100,24

	Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, dan Pernakanan)							
22.	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	%	117	137	117,09	80	126%
23.	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Objek Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	8000	14435	180	9000	9000
24.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Orang	25	25	100	245	25
		Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	145	171	117	60/91.9	200
25.	Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Investasi Yang Masuk	Rupiah	5.000.000.000	13,7M	274	53.000.000.00 0	6 M
26.	Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	%	1 : 100	1:87,5	97,36	1:150	1: 150
27.	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Sinergis dan Terarah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	ADA	ADA	ADA	100	ADA	ADA
28.	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Presentase OPD yang Menyampaikan LAKIP yang Terintegrasi dan Tepat Waktu	%	85-100 (A)	BELUM	BELUM	100	100
		Opini BPK dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini	WTP	BELUM	BELUM	WTP	WTP
29.	Meningkatnya Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rupiah	24.000.000.000,00	85.117.394.766,71	354,66	27.000.000.00 0	27.000. 000.000

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Bagian ini menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja berdasarkan data – data indikator yang terkait IKU dan sasaran. Penyajian di sub bagian ini disajikan per sasaran strategis.

1. Meningkatnya Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Merata Kepada Masyarakat

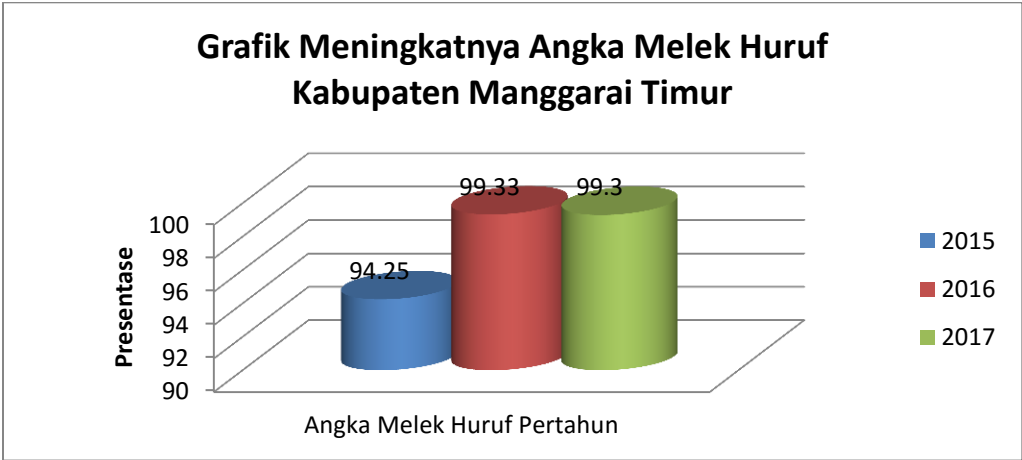
Terkait dengan sasaran di atas, ada dua IKU yang menjadi komponen utama yang menentukan naik atau turunnya capaian kinerja dari sasaran ini.

Tabel 3.3 Meningkatnya Angka Melek Huruf Masyarakat

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Angka Melek Huruf Masyarakat	99,33	98,20	99,30	101,12	97,03	104,21

Mengukur kesuksesan sasaran ini dapat dilihat dari IKU yang terdiri dari beberapa point penjelasan di bawah ini:

- a. Prosentase Peningkatan Angka Melek Huruf. Angka kenal huruf yang ditargetkan adalah 98,20 % penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf dibagi jumlah seluruh penduduk usia yang sama. Realisasi : target 98,20, realisasi 99,30 % atau sebesar 101,12 % dari target. Realisasi Keuangan dari Indikator ini didukung oleh: Kegiatan Penyelenggaraan Paket A setara SD dengan pagu Rp. 50.000.000, realisasi keuangan dari Paket A setara SD tidak terserap karena jumlah peserta yang akan mengikuti ujian tidak ada (tidak ada yang mendaftar sebagai peserta). Kegiatan Penyelenggaraan Paket B setara SMP dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000, realisasi keuangan sebesar Rp. 35.232.000,- atau 35,23% .



Gambar 3.1 Persentase Angka Melek Huruf Per Tahun
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

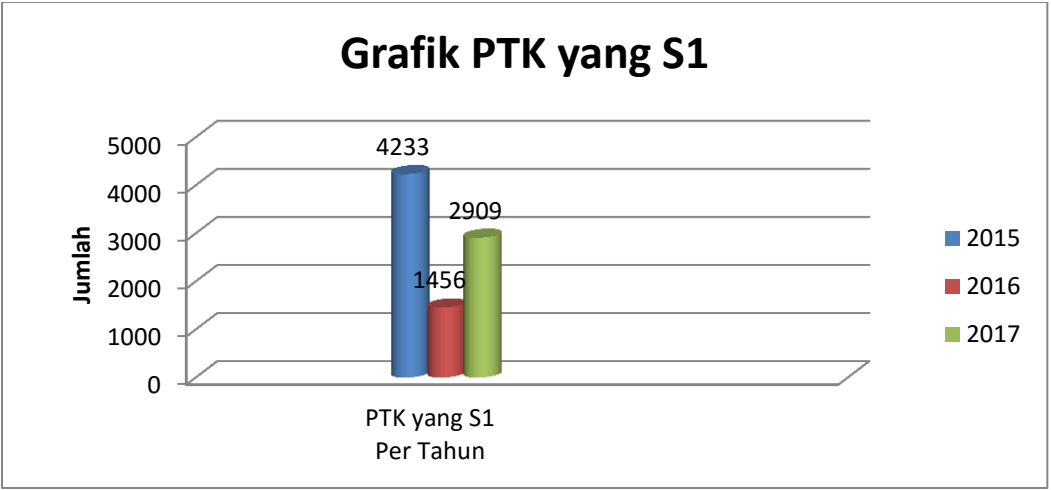
- b. **Permasalahan.** Faktor Administrasi, dalam hal ini, lebih dititikberatkan kepada keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017. Keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan sangat mempengaruhi daya serap OPD terhadap anggaran.
- c. **Solusi.** Dengan melihat hambatan yang ada, maka solusi yang sangat diperlukan dalam menyelesaikan segenap program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur adalah penataan faktor sumber daya manusia dan faktor administrasi. Untuk faktor sumber daya manusia, ke depan sangat diharapkan adanya Jumlah tenaga yang memadai dengan ditunjang oleh kompetensi yang sesuai dengan Tupoksi. Kompetensi yang sesuai dengan tupoksi wajib didukung dengan kemampuan memahami deskripsi pekerjaan sekaligus latar belakang spesifikasi pekerjaan/kualifikasi keahlian individu.

2. **Meningkatnya Mutu Pendidikan, dan Tenaga Kependidikan**

Tabel 3.4 Jumlah PTK yang S – 1

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
2.	Jumlah PTK yang S – 1	1459	1502	2909	193,68	1552	187,43

- a. Jumlah PTK S-1 : Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Target capaian yang tinggi dibuat dengan suatu dasar bahwa di Manggarai Timur dibuka kelas kuliah peningkatan kualifikasi guru dan disambut dengan antusiasme yang besar dari guru-guru. Pada tahun ini, Dinas menargetkan 70% atau 3.801 guru SD/Midan SMP/MTs dari total 4.734 Guru SD dan SMP akan memenuhi kualifikasi tenaga pendidik. Didukung oleh program: peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (PMPTK) kegiatan: pelaksanaan sertifikasi pendidik dengan anggaran Rp. 77.800.000,- dan kegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pagu Rp. 59.087.350,- dan kegiatan pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik dengan anggaran Rp. 24.736.850.000,-



Gambar 3.2 Jumlah PTK yang S 1
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

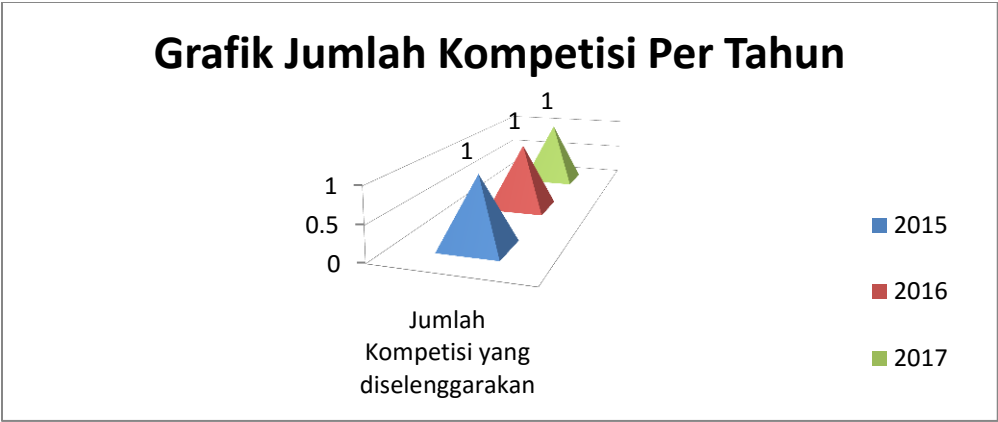
- b. **Permasalahan.** Sekalipun sudah berhasil dari segi jumlah namun masih membutuhkan pembenahan dari segi teknis. Kualitas guru perlu ditingkatkan.
- c. **Solusi.** Perlu peningkatan kemampuan guru melalui diklat dan Bimtek yang sejalan dengan kebutuhan guru.

3. Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olah raga

Tabel 3.5 Jumlah Kompetisi Olah Raga yang Diselenggarakan

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
3.	Jumlah Kompetisi Olah Raga yang Diselenggarakan	1	1	1	100	4/6	60

- a. Mengukur kesuksesan sasaran ini dapat dilihat dari IKU yang terdiri dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut.
Jumlah penyelenggaraan kompetisi Olah Raga di Kabupaten Manggarai Timur ditargetkan 5 kompetisi. Pelaksanaannya hanya 1 kali kegiatan O2SN SD dan SMP dengan anggaran Rp. 939.321.684,00 dengan realisasi Rp. 889.191.600,00. Jumlah Kompetisi yakni dari target yang ditetapkan yaitu 1 kali dan capaian targetnya 1 kali dengan prosentase capaian 100%.



Gambar 3.3 Jumlah Kompetisi yang Diselenggarakan
Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

- b. **Permasalahan.** Kemampuan keuangan daerah untuk pengembangan olah raga masih sangat terbatas sehingga fasilitas Olah Raga masih sangat kurang sementara semangat masyarakat sebenarnya cukup baik bila ada rangsangan dari pihak pemerintah atau swasta. Selain itu Organisasi Kepemudaan belum dibentuk dan dibina secara serius, rendahnya kreatifitas di kalangan pemuda serta terbatasnya fasilitas pendukung kegiatan pemuda. Kualitas pendidikan di kalangan pemuda masih rendah.Tidak adanya klub – klub olah raga yang professional sehingga bakat – bakat pemuda di bidang olah raga belum di bina secara maksimal dan professional.
- c. **Solusi.** Pemerintah daerah perlu mendorong masyarakat, dunia swasta dan pihak terkait lainnya untuk bersama – sama membangun olah raga di daerah. Pemuda perlu dibimbing dan diberi pelatihan secara mendasar dan kontinyu dalam bidang Olah Raga dan Kepemimpinan; Dibentuknya organisasi kepemudaan yang komperhensif dan professional; Pemerintah Kabupaten Manggarai timur perlu memfasilitasi Pemuda untuk menyalurkan bakat – bakatnya dalam bidan Olah Raga, Organisasi atau Kelembagaan; Perlu dibangun fasilitas olah raga yang memadai; Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga melakukan kompetisi olah raga yang melibatkan pemuda; serta diadakannya lomba kreasi seni lukis dan jenis perlombaan lainnya.

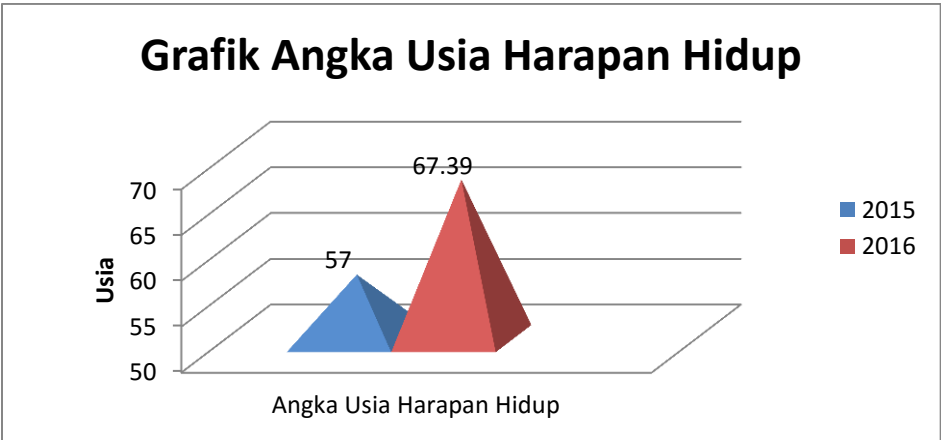
4. **Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat yang Bermutu, Merata dan Terjangkau**

Tabel 3.6 Angka Usia Harapan Hidup

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
4.	Angka Usia Harapan Hidup	67,39	67,8	-	-	68	-

Mengukur kesuksesan sasaran ini dapat dilihat dari IKU yang terdiri dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sampai dengan saat ini baik Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur maupun Badan Statistik belum merilis Angka Usia Harapan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017. Data yang ada masih merujuk pada data tahun 2016, dimana Angka Usia Harapan Hidup tahun 2016 dengan target 67,4 tahun, realisasi 67,39 tahun dengan capaian kinerja 99,10 %. Namun sampai dengan penyusunan laporan ini Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai Timur belum dapat diketahui karena Badan Pusat Statistik (BPS) selaku instansi terkait belum merilis Angka Usia Harapan Hidup terbaru untuk tahun 2017. Indikator ini belum mencapai target angka usia harapan hidup karena rata-rata kematian di pra usia lanjut, hal ini disebabkan oleh penyakit yang banyak menimbulkan kematian, seperti penyakit menular (diare, TB, DBD, dll). Dan kematian tertinggi disebabkan oleh penyakit tidak/ menular (hipertensi, penyakit jantung dan pembuluh darah dan penyakit anemia) serta sttus gizi masyarakat baik itu Gizi lebih dan Gizi kurang.



Gambar 3.4 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai Timur
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

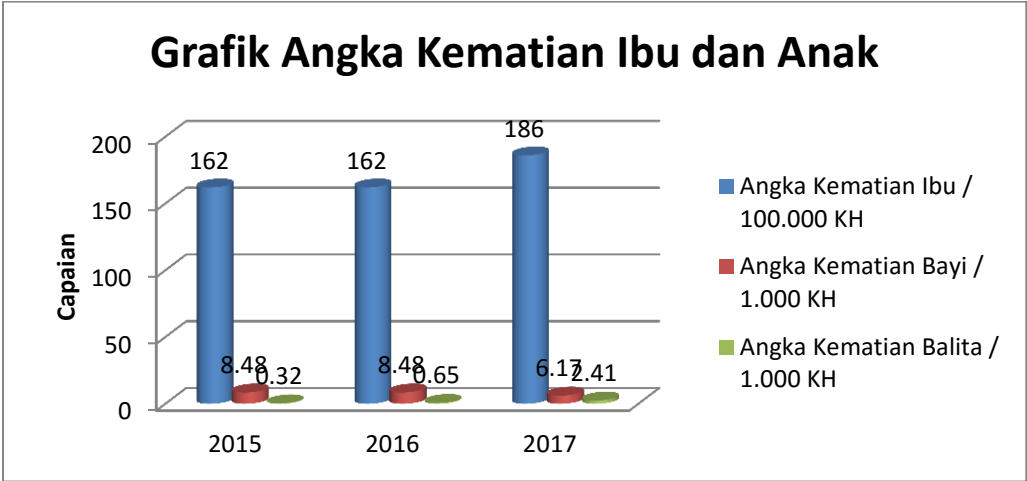
- b. **Permasalahan.** Indikator ini belum mencapai target angka usia harapan hidup karena rata-rata kematian di usia pra usia lanjut, hal ini disebabkan oleh penyakit yang banyak diderita dan menimbulkan kematian dengan cepat sangat seperti penyakit menular (diare, TB, DBD, dll) dan kematian tertinggi disebabkan oleh penyakit tidak\ menular (hipertensi, penyakit jantung dan pembuluh darah dan penyakit anemia) serta status gizi masyarakat baik itu Gizi lebih dan Gizi kurang.
- c. **Solusi.** Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya asupan gizi yang baik untuk mengurangi timbulnya penyakit yang menurunkan fungsi tubuh.

5. Menurunnya Kematian Ibu Baru Melahirkan dan Anak Baru Lahir

Tabel 3.7 Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Balita

No.	IKU	2016	2017			Target Pengukuran MDGS	Capaian s/d 2017 Terhadap Pengukuran MDGS
			Target	Realisasi	%		
5.	Angka Kematian Ibu per 100.000KH	162/100000	160/100000 KH	186/100000 KH	86,02	160/100000 KH	86,02
	Angka Kematian Bayi per 1.000KH	8,48/1000 KH	9,5/1000 KH	8,17/1000 KH	116,27	9,5/1000 KH	116,27
	Angka Kematian Balita per 1.000KH	0,65/1000 KH	0,65/1000 KH	2,41/1000 KH	26,97	0,65/1000 KH	26,97

Mengukur kesuksesan sasaran ini dapat dilihat dari IKU yang terdiri dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut.



Gambar 3.5 Angka Kematian Ibu dan Anak Kabupaten Manggarai Timur 2017
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

1. Angka Kematian bayi per 1000 kh dengan target 9,5/1000 KH, realisasi 8,17 /1000 kh (44 Kasus) dari 5.399 kelahiran Hidup, capaian kinerja 116,27 %. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 8,48/1000 KH (48 kasus) 6.180 Kelahiran Hidup, tahun 2017 adanya penurunan angka kematian bayi yaitu penurunan sebanyak 0,31/1000 KH (4 kasus). Hal ini menunjukkan adanya kemajuan yaitu berkurangnya kematian bayi setiap 1000 KH dan telah terselamatkan 4 bayi. Menurunnya Angka Kematian Bayi ini, diharapkan mencapai maksimal 9,98/1000KH.

a. Permasalahan :

1. Rendahnya peran petugas terhadap pemantauan / deteksi dini kesehatan pada bayi baru lahir;

2. Rendahnya kemampuan petugas dalam penatalaksanaan komplikasi pada bayi;
3. Penanganan kasus resiko / komplikasi pada bayi tidak sesuai standar;
4. Proses persalinan ditangani oleh tenaga yang tidak berkompoten atau non nakes (dukun bersalin);
5. Rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang komplikasi yang dapat terjadi pada bayi.

b. Solusi :

1. Membangun kerjasama bidan dan perawat terhadap kunjungan dan perawatan bayi;
 2. Pelatihan petugas dalam penanganan asfiksia dan BBLR serta PONEC;
 3. Penyuluhan kesehatan bayi kepada keluarga dan masyarakat.
 4. Pelaksanaan AMP (Audit Maternal Prenatal).
2. Angka Kematian balita per 1000 kh dengan target 0,65/1000 kh, realisasi 2,41/1000 KH (47 kasus) dari 5.399 Kelahiran Hidup, capaian kinerja 26,97%. Jika dibandingkan dengan persentase realisasi tahun 2016 0,67/1000 KH (2 kasus) dari 6.180 kelahiran hidup . Terjadinya peningkatan Angka kematian Balita di tahun 2017 sebesar 1,74/1000 KH (45 Kasus) Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kematian balita setiap 1000 KH dan tidak terselamatkan 45 Balita. Angka Kematian Balita ini, diharapkan mencapai maksimal 0,65/1000KH.

a. Permasalahan :

1. Rendahnya peran petugas terhadap pemantauan/deteksi dini kesehatan pada balita
2. Rendahnya kemampuan petugas dalam penatalaksanaan komplikasi pada balita
3. Penanganan kasus resiko/komplikasi pada balita belum sesuai standar
4. Rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang komplikasi pada balita

b. Solusi :

1. Membangun kerjasama bidan dan perawat terhadap kunjungan dan perawatan bayi dan balita dan Pelatihan petugas dalam penanganan asfiksia dan BBLR serta PONEC;
 2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi melalui program PMT(Pemberian Makanan Tambahan) bagi balita gizi buruk dan bagi ibu hamil KEK(Kekurangan Energi Kronis)
 3. Penyuluhan kesehatan bayi dan balita kepada keluarga dan masyarakat.
3. Angka Kematian ibu per 100.000 KH dengan target 160/100.000 KH, realisasi 186/100.000 KH (11 kasus) dari 5.399 Kelahiran Hidup, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 162/100.000KH (10 kasus) dari 6.180 kelahiran Hidup, Indikator ini mengalami peningkatan Angka Kematian Ibu walaupun jumlah kasus yang meningkat tetapi jumlah kelahiran hidup

berkurang di Tahun 2017, dimana tahun 2016 di antara 100.000 KH ada 161 ibu yang meninggal dan di tahun 2017 di antara 100.000 KH ada 161 ibu yang meninggal. Angka kematian ibu di Manggarai Timur masih tinggi terutama disebabkan oleh:

a. Permasalahan :

- 1. Proses persalinan masih ditangani oleh tenaga yang tidak berkompoten atau non tenaga kesehatan;
- 2. Rendahnya kemampuan petugas terhadap deteksi resiko komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas;
- 3. Rendahnya kemampuan petugas dalam penanganan kompilkasi obstetri;
- 4. Rendahnya peran serta masyarakat terhadap ibu hamil/bersalin.

b. Solusi :

- 1. Menggalakan Revolusi KIA;
- 2. Meningkatkan 7H2;
- 3. Melaksanakan kunjungan rumah oleh nakes;
- 4. Pemberdayaan masyarakat (Toma,toga, dukun dan kader) dalam mendukung revolusi KIA serta menghindari 3 terlambat;
- 5. Menggalakan P4K (program perencanaan persalinan dan penanganan Komplikasi).

Penggunaan anggaran APBD untuk pencapaian kinerja dari 3 sarana strategis ini adalah sebesar Rp. 79.907.689,- atau 77,6% dari total anggaran Rp.102. 959.100.174,-

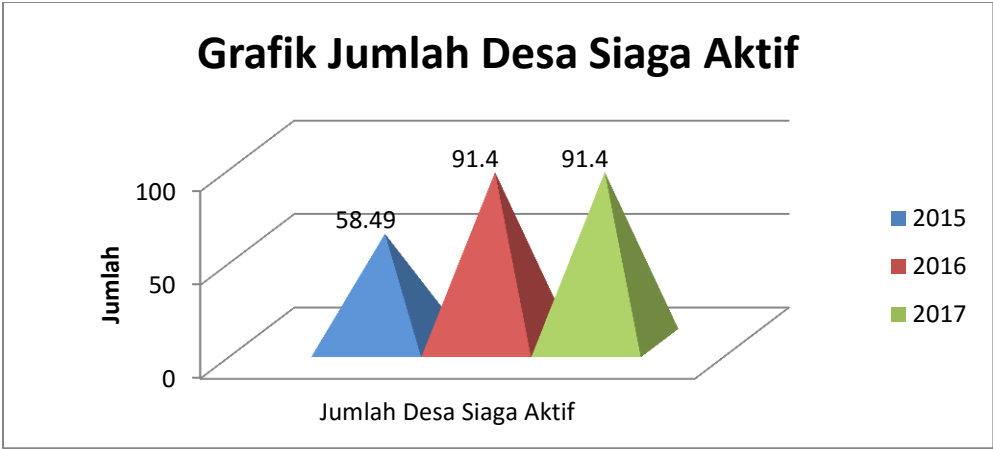
6. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Melalui Promosi, Pemberdayaan dan Peyehatan Lingkungan

Tabel 3.8 Persentase Desa Siaga Aktif dalam pemberantasan penyakit

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
6.	Persentase Desa Siaga Aktif dalam pemberantasan penyakit	91,4	91,4	91,4	100	100	91,4

Mengukur kesuksesan sasaran ini dapat dilihat dari IKU yang terdiri dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut.

- a. Cakupan desa siaga aktif dengan target 91,4%, Realisasi mencapai 91,4%. Capaian kinerja 100% dibandingkan dengan data realisasi tahun 2016, data realisasi tahun 2017 meningkat.



Gambar 3.6 Grafik Jumlah Desa Siaga Aktif
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

b. Permasalahan :

- 1. Tim desa siaga masih kurang aktif dalam mengelola desa siaga aktif;
- 2. Masih ada petugas kesehatan yang belum memahami program desa siaga aktif;
- 3. Belum optimalnya kerjasama lintas sektor antar petugas kesehatan dan pemerintah dan Pemerintah Desa tentang pengembangan desa siaga aktif;
- 4. Sarana dan prasarana yankes yang tidak memadai.

c. Solusi :

- 1. Bimbingan teknis desa siaga;
- 2. Melakukan pelatihan terhadap tenaga kesehatan di desa siaga;
- 3. Melakukan advokasi pada tokoh masyarakat dan kepala desa;
- 4. Melakukan komunikasi dan informasi tentang penyelenggaraan desa siaga.

7. Terkendalinya Jumlah Penduduk

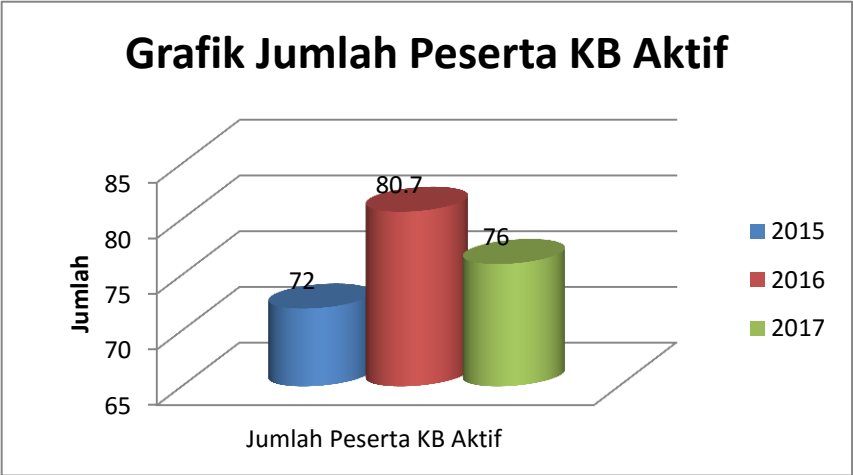
Tabel 3.9 Persentase Peserta KB Aktif

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
7.	Persentase Peserta KB Aktif	80,7	65	76	116	62,5	116

- a. Mengukur kesuksesan sasaran ini dapat dilihat dari IKU yang terdiri dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut.
 - Target kinerja indikator Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif pada tahun 2017 adalah 55%. Cakupan ini dihitung berdasarkan jumlah akseptor KB aktif yang ada dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur riil pada periode yang

sama. Capaian target kinerja indikator ini pada tahun 2016 adalah sebesar 80,7% (34.885 akseptor KB aktif dari Pasangan Usia Subur sejumlah 43.204 PUS). Sedangkan capaian untuk tahun 2017 adalah sebesar 76,13% (33.624 akseptor KB aktif dari total PUS 44.161 PUS) atau ada penurunan sebesar 4 %. Selain itu jika diukur dari target kinerja 55% maka realisasi atau capaian kinerja untuk indikator ini pada tahun 2017 adalah 138%. Pencapaian indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan target pada RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2014-2019 adalah pencapaian tahun 2017 sudah melebihi target akhir RPJMD yaitu 60%.

- Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung terutama jumlah PKB/PLKB yang memadai dan kemampuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Timur dalam memajemen PKB/PLKB secara optimal. Namun demikian di balik capaian kinerja yang baik persoalan yang berkaitan dengan indikator kinerja ini adalah masih rendahnya jumlah akseptor KB jangka panjang (MKJP) dan masih tingginya angka DO yang mencapai 7.044 akseptor. Untuk mengatasi persoalan ini permasalahan ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Timur berupaya mengoptimalkan kerja kegiatan Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) dengan menjadikan pelayanan akseptor MKJP sebagai prioritas.



- *Gambar 3. 7 Grafik Jumlah Peserta KB Aktif*
- *Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017*

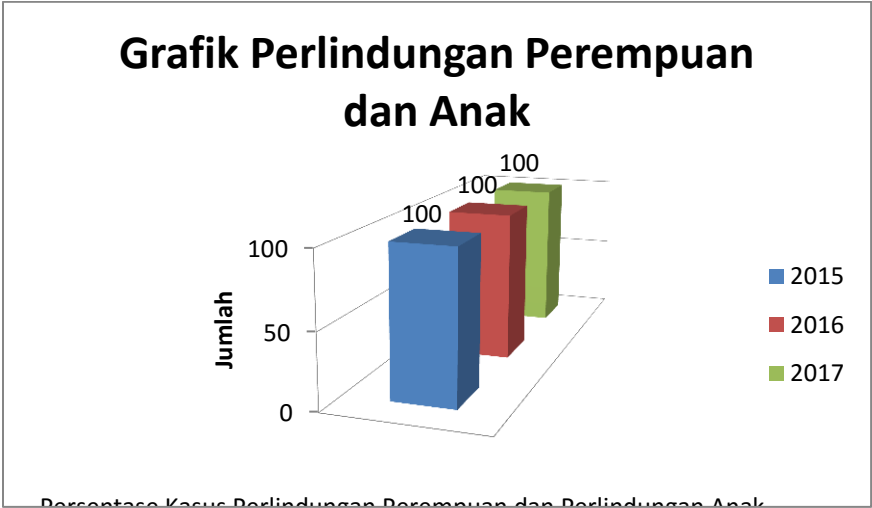
- b. **Permasalahan.** Masyarakat belum memahami betul manfaat dari program KB.
- c. **Solusi.** Perlu dilakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KB.

8. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3. 10 Persentase Kasus Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
8.	Persentase Kasus Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100	100	100	100	80

- a. Mengukur kesuksesan sasaran ini dapat dilihat dari IKU yang terdiri dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:
- Capaian indikator ini diukur dengan perhitungan jumlah kasus yang diselesaikan dibagi jumlah kasus yang dilaporkan dikalikan dengan 100. Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah 100%. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2017 dimana kasus yang dilaporkan semuanya dapat ditangani oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Timur dan Unit Penanganan Kasus KDRT terkait. Keberhasilan indikator ini disebabkan oleh kompetensi dan kerja sama fasilitator pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



Gambar 3.8 Grafik Perlindungan perempuan dan Anak
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

- b. Permasalahan.
1. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah sehingga kasus – kasus kekerasan jarang diselesaikan oleh pihak berwajib.

2. Alokasi anggaran yang minim untuk kegiatan fasilitasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini bisa dilihat dari total fasilitasi yang dianggarkan untuk tahun 2017 hanya 7 kegiatan fasilitasi

c. **Solusi.**

- 1.Perlu mendorong masyarakat agar lebih dekat dengan aparat penegak hukum dan sadar hukum.
2. Melakukan advokasi untuk penambahan anggaran dan juga melakukan kordinasi dan komunikasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait.

9. Meningkatnya Pemahaman Anggota Keluarga Terhadap Bahaya Narkoba

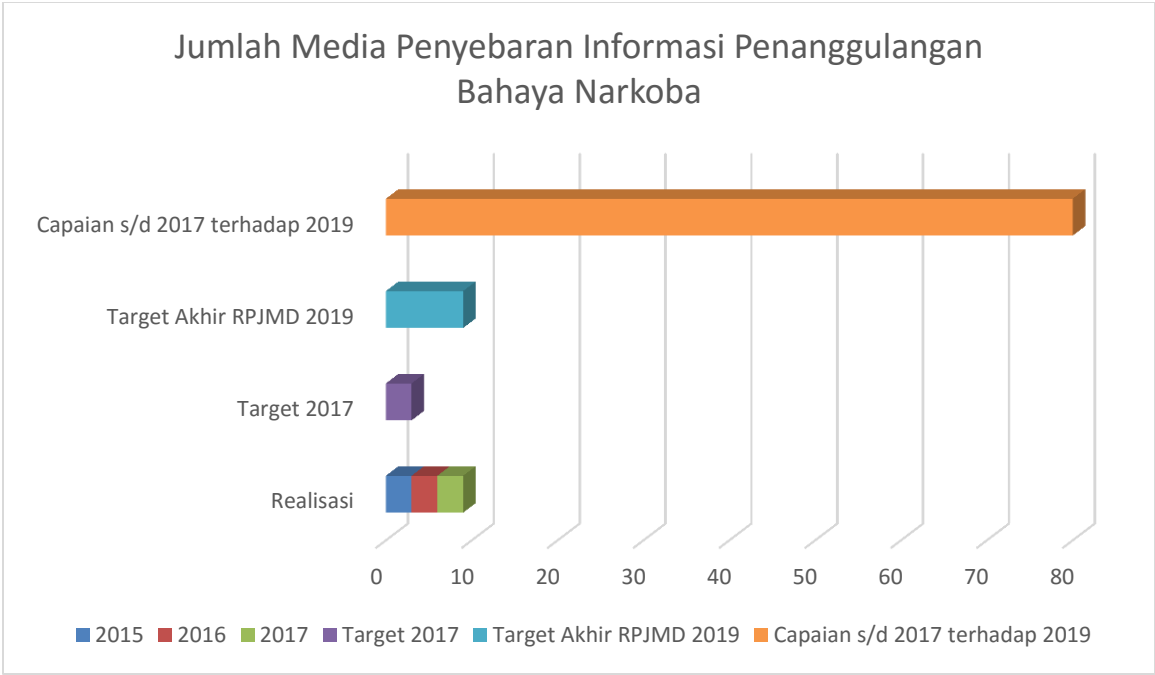
Tabel 3.11 Jumlah Media Penyebaran Informasi Penanggulangan Bahaya Narkoba

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
9.	Jumlah Media Penyebaran Informasi Penanggulangan Bahaya Narkoba	3	1	1	100	9/15 (100)	80

Mengukur kesuksesan sasaran ini dapat dilihat dari IKU yang terdiri dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut.

- a. Target 1, realisasi 1 atau 100 %. Peran media informasi dalam upaya penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS. Jumlah sosialisasi Lewat Media Masa, Baliho, Stiker, Spanduk, Kalender yang tersedia. Target yang direncanakan yaitu 1 paket dengan rincian Spanduk 9 Lembar, 1000 stiker 1000 lembar dan sosialisasi radio 5 bulan. Telah dijalankan sesuai dengan target yang di rencanakan, dengan demikian tingkat capaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 100 %.
- Jumlah remaja siswa/i (SLTP/SLTA) yang memperoleh pengetahuan tetang bahaya penyalahgunaan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDSdengan target awal sebanyak 3750 siswa/i yang tersebar pada 75 sekolah SLTP/ SLTA di Kabupaten Manggarai Timur telah dilaksanakan. Hasil yang dicapai yaitu meningkatnya pengetahuan remaja (Siswa/i) tentang pengaruh bahaya penyalahgunaan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.Dari target 3750 siswa yang direncanakan, jumlah siswa/i yang berhasil memperoleh pengetahuan Penanggulangan Bahaya Narkoba PMS termasuk HIV/AIDS berjumlah 3940 siswa/i yang berada di 75 sekolah yang tersebar di seluruh kabupaten Manggarai Timur. Dengan demikian capaian Kinerja dari kegiatan ini sebesar 105 %.

- Penyuluhan Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS Bagi Guru Sekolah Dasar. Jumlah guru sekolah dasar yang memperoleh pembekalan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS dengan target awal sebanyak 50 Guru Sekolah Dasar yang tersebar pada Sekolah Dasar telah dilaksanakan. Hasil yang dicapai yaitu meningkatnya pengetahuan Guru Sekolah Dasar tentang pengaruh bahaya penyalahgunaan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS. Dari target 50 orang guru yang direncanakan, jumlah Guru SD yang berhasil memperoleh pengetahuan Penanggulangan Bahaya Narkoba PMS termasuk HIV/AIDS berjumlah 50 Guru SD yang berada di pusat kota Kabupaten Manggarai Timur. Dengan demikian capaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 100%.
- Penyuluhan Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS bagi Calon Tenaga Kerja. Jumlah calon tenaga kerja yang memperoleh pembekalan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS. Dilaksanakan di 9 Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur, dengan target awal yang ditetapkan 300 Calon Tenaga Kerja. Target yang akan dijalankan Badan Narkotika Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017 sebanyak 300 calon Tenaga Kerja yang berada di 9 (sembilan) Kecamatan. Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 100 %.
- Jumlah tokoh masyarakat yang memperoleh pembekalan pengetahuan bahaya penyalahgunaan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS dengan target awal yang ditetapkan sebanyak 250 orang, telah dilaksanakan dengan jumlah realisasi sebanyak 250 orang. Hasil yang dicapai meningkatnya pemahaman tokoh masyarakat tentang kegiatan penyuluhan pencegahan/ penggunaan narkoba dan minuman keras. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 100 %.



Gambar 3.9 Grafik Media Penyebaran Informasi Penanggulangan Bahaya Narkoba
Sumber: Badan Narkotika Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

- b. **Permasalahan.** Masyarakat masih asing dan merasa abstrak dengan NARKOBA.
- c. **Solusi.** Tetap dilaksanakan sosialisasi untuk mencegah bahaya NARKOBA.

10. Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin

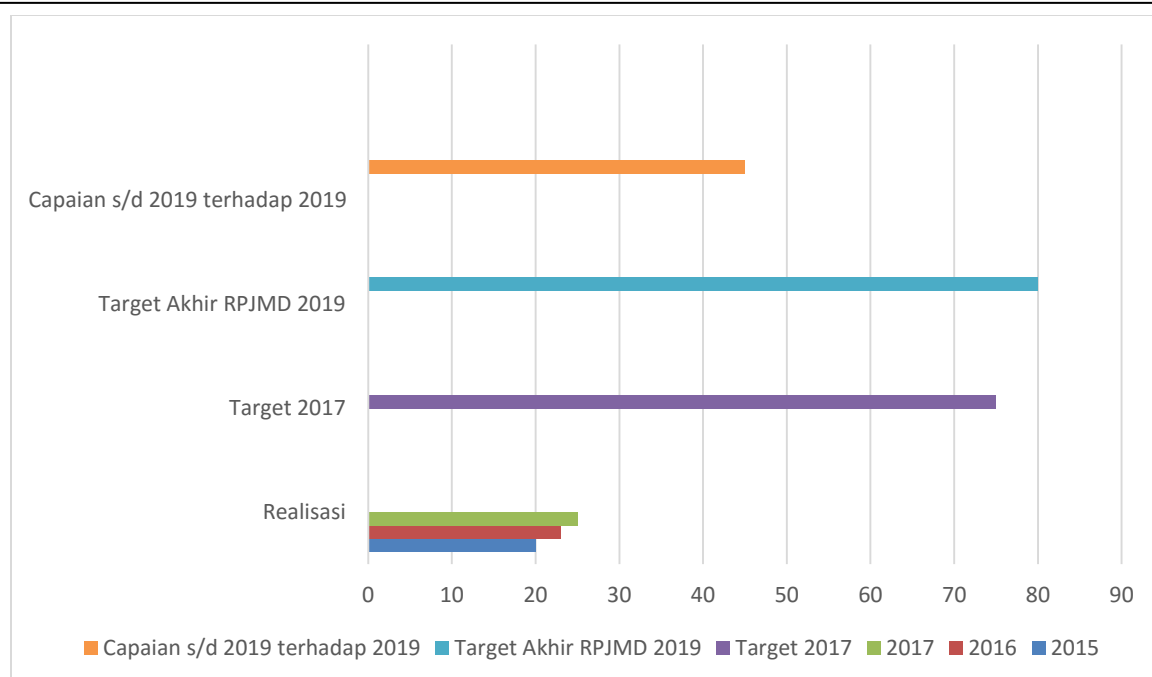
Tabel 3.12 Persentase PMKS Skala Kab./Kota yang menerima program Pemberdayaan Sosial

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
10.	Persentase PMKS Skala Kab./Kota yang menerima program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis lainnya	23	75	25	25	80	45

- a. Target 75, realisasi 25 atau pencapaian sebesar 25 %. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Rencana Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2017 yang diukur berdasarkan tingkat Capaian sebagai berikut :
 - 1. Jumlah tenaga pendamping KUBE untuk memfasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin target tahun 2017 sebanyak 12 orang realisasi 12 orang atau 100 %, dengan jumlah KUBE sebanyak 135 KUBE dan jumlah anggota KUBE sebanyak 1.330 Orang.

2. Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya target tahun 2017 sebanyak 58 orang, realisasi 58 orang atau 100 %. Kegiatan ini dianggarkan melalui dana APBN dengan sasaran bantuan diberikan pada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang tersebar di Kabupaten Manggarai Timur. Adapun realisasi KSM tahun 2017 sebanyak 11.972 KSM dengan sasaran penerima/ Individu sebanyak 71.230 Orang. Rincian KSM per kecamatan sebagai berikut :
 Kecamatan Borong : 1.117 KSM, Kecamatan Kota Komba : 2.068 KSM, Kecamatan Poco Ranaka : 1.612, Kecamatan Elar 739 KSM, Kecamatan Sambi Rampas : 960 KSM, Kecamatan Lamba Leda : 1.607 KSM, Kecamatan Rana Mese : 1.422 KSM, Kecamatan Elar Selatan : 1.076 KSM, Kecamatan Poco Ranaka Timur : 1.371 KSM.
 - a) Persentase (%) PMKS Skala Kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 75 %. Pemenuhan Kebutuhan Dasar disini adalah kebutuhan akan Pangan, Sandang dan Papan. Keterbatasan anggaran pada tahun 2017 berdampak pada tidak dianggarkan kegiatan pada indikator ini.
 - b). PMKS yg memperoleh bantuan sosial target tahun 2017 sebesar 70 % dan realisasi sebesar 50 % dengan rincian : Jumlah keluarga sangat miskin di kabupaten Manggarai Timur sebanyak 24.010 KSM, yang sudah menerima bantuan sejumlah 11.972 KSM dengan total individu penerima bantuan sebesar 71.230 Orang pada tahun 2017 melalui dana APBN program Keluarga Harapan (PKH).
3. Jumlah masalah-masalah strategis yang mencakup cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa(KLB)/penanganan masalah-masalah sosial lainnya: jumlah orang terlantar yang difasilitasi target tahun 2017 sebanyak 17 orang, realisasi 12 orang atau 70 % sesuai kejadian riil orang terlantar tahun 2017.
4. Jumlah bantuan yang diberikan kepada korban meninggal yang membutuhkan cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa (peti mayat) target 8 unit peti tahun 2017 dan realisasi 6 unit Peti mati atau 75 %.
5. Jumlah bantuan yang diberikan kepada Orang dengan Penyakit Kejiwaan berupa perawatan/rehabilitasi sebanyak 25 orang
6. Jumlah TAGANA (Taruna Siaga Bencana) dalam menangani bencana target tahun 2017 sebanyak 30 Orang, realisasi 30 orang atau 100 %.

Grafik Persentase PMKS Skala Kabupaten/ Kota yang menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis lainnya.



*Gambar 3.10 Grafik Persentase PMKS Skala Kabupaten/ Kota yang menerima Program Pemberdayaan Sosial
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017*

b. Permasalahan :

1. Kurangnya SDM yang berlatar belakang pendidikan profesi pekerjaan sosial, hukum dan perburuan.
2. Masih rendahnya mutu/ profesionalitas pelayanan usaha – usaha Sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.
3. Masih lemahnya koordinasi dan keterpaduan antara unit / instansi terkait dan antar pemerintah dan orsos/ LSM bidang Sosial dalam penanganan permasalahan sosial.

c. Solusi :

1. Mengusulkan penambahan staf yang berlatar belakang pendidikan profesi pekerjaan sosial, hukum dan perburuan.
2. Mengikutsertakan pegawai dalam berbagai diklat, khususnya diklat teknis fungsional bidang pekerjaan sosial
3. Melakukan studi banding dan menjalin kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan dan penanganan masalah-masalah sosial.
4. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi program dan kegiatan baik dengan instansi pemerintah terkait maupun dengan lembaga – lembaga swasta dan masyarakat.
5. Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka penambahan anggaran untuk program dan kegiatan yang diperoleh melalui dana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

6. Mempertajam prioritas masalah dan penanganan, memperbesar alokasi anggaran yang langsung dirasakan manfaatnya oleh sasaran garapan / masyarakat.

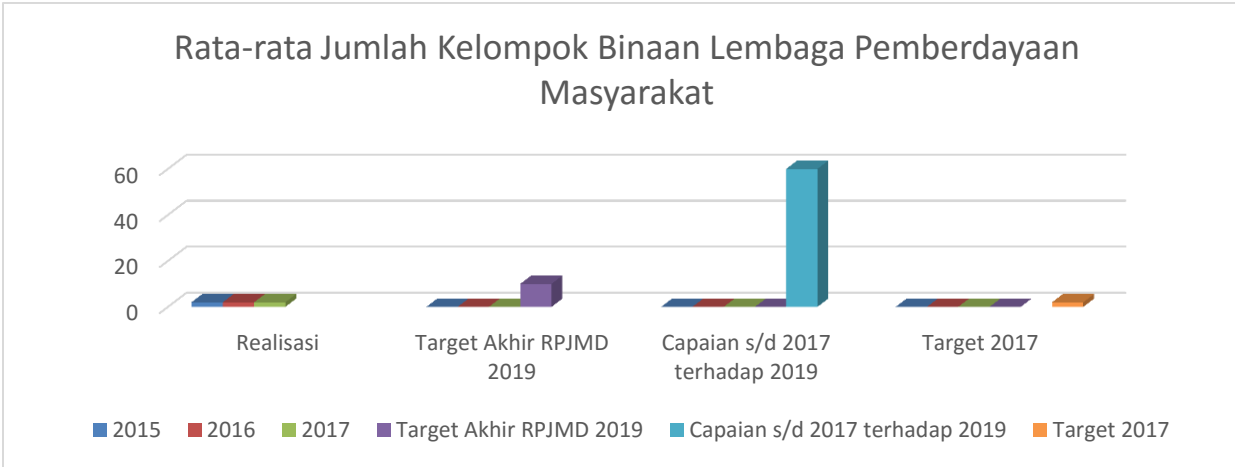
11. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

Tabel 3.13 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
11.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	2	2	2	100	10	60

Mengukur kesuksesan sasaran ini dapat dilihat dari IKU yang terdiri dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut.

- a. Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ditargetkan pada setiap desa/kelurahan akan terdapat dua kelompok binaan yang dibina dan didampingi secara intensif pada setiap tahun, sehingga akumulasi kelompok yang dibina sampai dengan tahun 2017 berjumlah 1172 Kelompok sedangkan target pada tahun 2016 ditargetkan akan dibina/didampingi secara intensif kepada 879 kelompok yang diambil dari total Kelompok yang terdata berjumlah 1425 Kelompok SPKP dan UEP.



Gambar 3.11 Grafik Jumlah Kelompok Binaan LPM
 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

- b. Permasalahan.
 1. Jumlah personil yang terbatas sehingga cukup sulit untuk menjangkau dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pelaksana kegiatan di Desa.
 2. Peralatan kerja yang belum mendukung seperti komputer dan tenaga operator yang belum memadai.

3. Ruang kerja / kantor yang masih bergabung dengan OPD lain, menyebabkan ruangan terbatas sehingga menyulitkan saat pelayanan kepada masyarakat dan aparat desa yang datang berkonsultasi, serta posisi staf dan bidang yang berdesakan dalam ruangan yang terbatas
4. Mental masyarakat kita yang malas, suka yang caritatif dan seringkali menunggu belaskasih dari pemerintah atau pihak terkait lainnya.
5. Keterbatasan penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang langsung menyentuh kebutuhan real masyarakat dan desa.
6. Kapasitas Sumber Daya Desa dan Masyarakat Desa yang masih belum memadai sehingga masih terjadi keterlambatan dalam setiap proses pengelolaan dana desa.

c. Solusi.

1. Perlu adanya penambahan personil yang berkompeten dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan siap turun langsung ke desa.
2. Dalam rangka percepatan pengelolaan Keuangan Desa, internal DPMD dibentuk tim khusus untuk masing-masing menangani dan bertugas mengkoordinir wilayah kerja masing-masing dalam pembagian tugas perwilayah Kecamatan.
3. Pada tahun yang akan datang diupayakan agar pengeloalaan keuangan desa dilaksanakan pendampingan secara insentif ke desa melalui pemberdayan langsung dan dimungkinkan untuk berkantor di Desa.

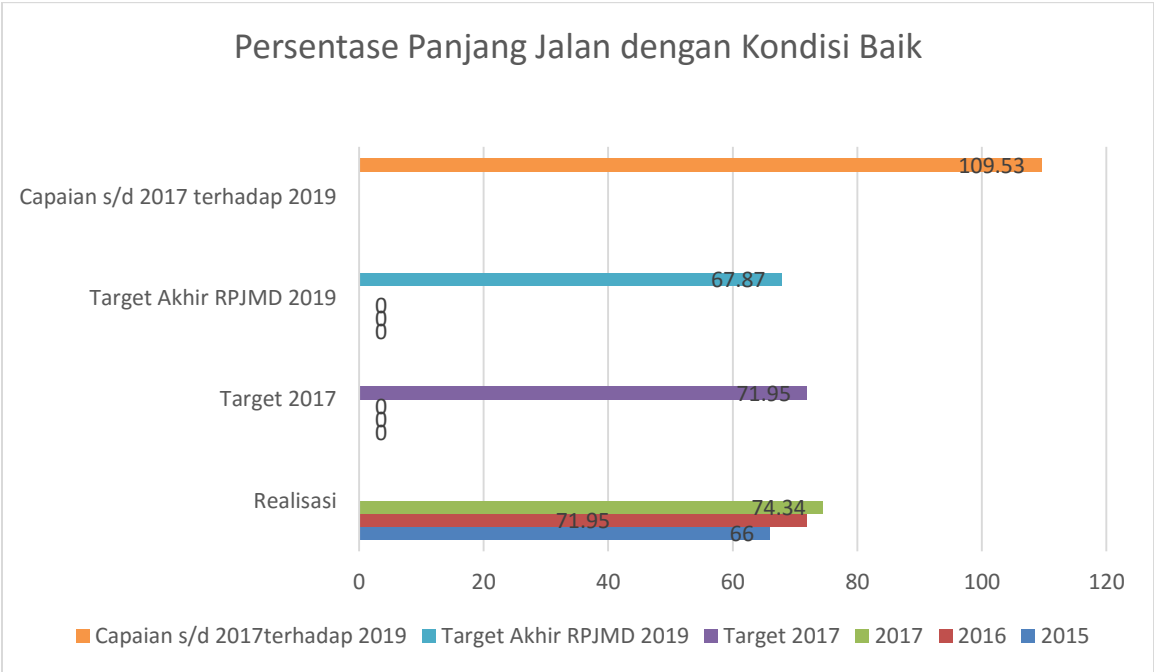
12. Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata

Tabel 3.14 Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
12.	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	71,95	71,95	74,34	103,33	67,87 (869,61K M)	109,53

- a. Mengukur kesuksesan sasaran ini dapat dilihat dari IKU yang terdiri dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut.
Indikator prosentase tingkat kondisi jalan kabupaten / kota dalam kondisi baik dan sedang digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan kabupaten/kota. Indikator ini dihitung dengan menghitung panjang jalan kabupaten dalam

kondisi baik dibagi dengan panjang seluruh jalan kabupaten di Kabupaten Manggarai Timur dikali dengan 100%. Total panjang jalan Kabupaten Manggarai Timur adalah 1.281,29 KM. Dari target pencapaian tahun 2017 sebesar 71,95% telah dilakukan peningkatan jalan sehingga panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik menjadi 74,34% dengan capaian 103,33%. Capaian kinerja yang dicapai menunjukkan kinerja yang baik dengan predikat Sangat Baik.



Gambar 3.12 Grafik Persentase Jalan Dengan Kondisi Baik
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

- b. **Permasalahan.** Kondisi topografi daerah yang sulit dan keterbatasan anggaran sehingga pembukaan jalan baru dan peningkatan jalan yang ada tidak dapat dipenuhi semuanya.
- c. **Solusi.** Anggaran infrastruktur perlu ditambah lebih besar lagi dan pengerjaan jalan sebaiknya diperhatikan dengan baik sehingga berkualitas.

13. Terwujudnya Infrastruktur Air Bersih, Drainase dan Sanitasi yang Berkualitas dan Merata

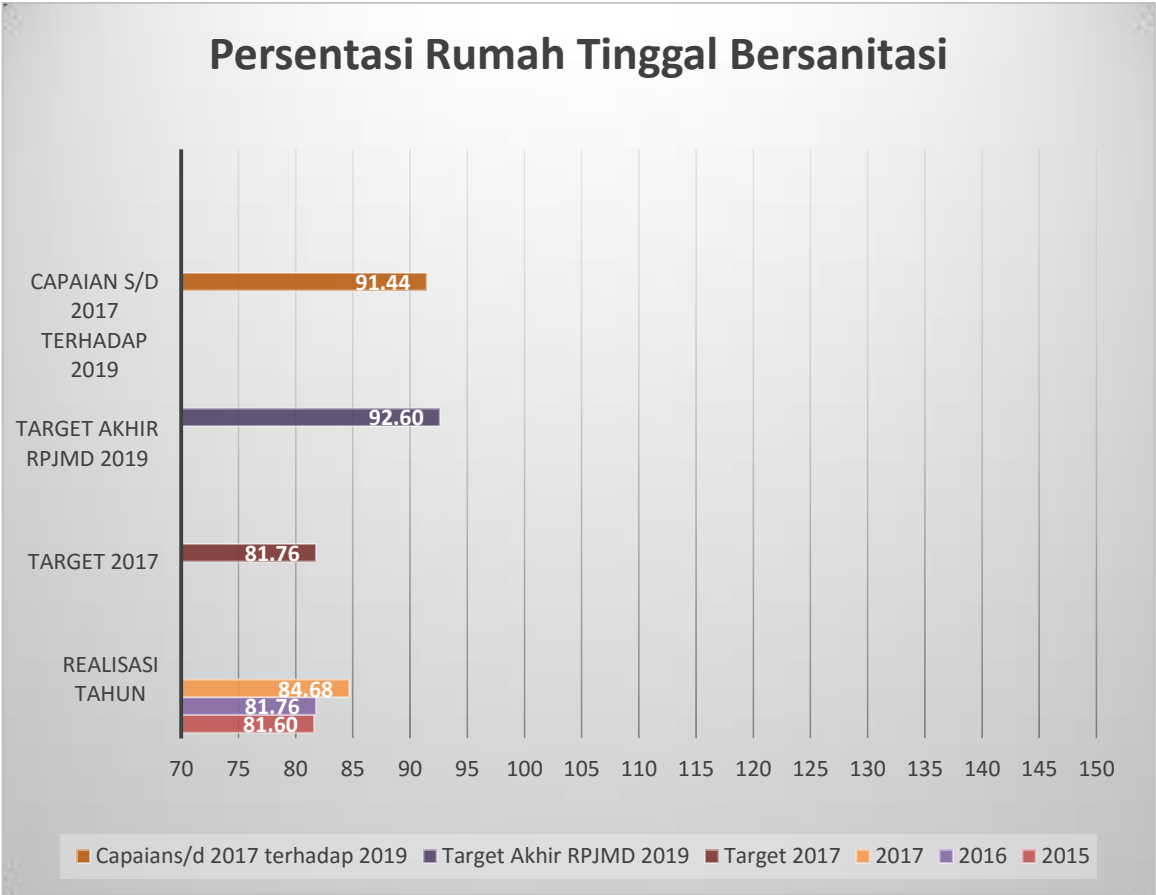
Tabel 3. 15 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
13.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	81,76	81,76	84,68	103,58	92,6	91,44
	Persentase Tersedianya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari – hari	55,20	55,20	55,24	100,08	55,20/100	100,07

a. Mengukur kesuksesan sasaran ini dapat dilihat dari IKU yang terdiri dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut.

- Persentase rumah tinggal bersanitasi. Indikator Persentase rumah tinggal bersanitasi digunakan untuk mengidentifikasi Rumah tinggal berakses sanitasi. Indikator yang dipakai adalah sekurang-kurangnya rumah tinggal mempunyai akses untuk memperoleh layanan fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas), pembuangan sampah di Kabupaten Manggarai Timur. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah rumah tinggal bersanitasi dibagi dengan jumlah rumah tinggal seluruh Kabupaten Manggarai Timur dikali dengan 100 %.

Jumlah rumah tinggal di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2017 sejumlah 56.247 Rumah. Dari target yang ditetapkan 81,76% pada tahun 2017, dilakukan pembangunan air MCK sehingga jumlah rumah tinggal bersanitasi 84,68% dengan pencapaian 103,58%. Capaian kinerja yang dicapai menunjukkan kinerja yang baik dengan predikat Sangat Baik.

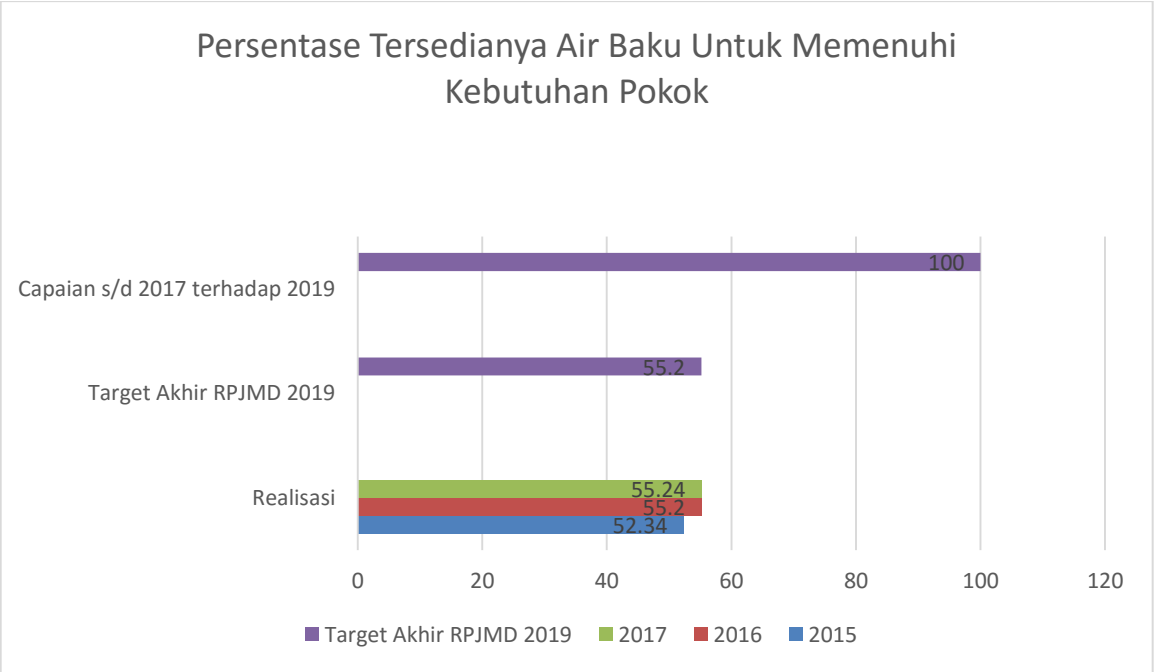


Gambar 3.13 Grafik Persentasi Rumah Tinggal Bersanitasi
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

- Indikator Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam

target MDGs bidang Air Minum secara berkelanjutan yang dapat diakses masyarakat setempat. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah ketersediaan air baku dari instalasi pengolahan air dibagi dengan kebutuhan air baku seluruh Kabupaten Manggarai Timur dikali dengan 100%.

Pada tahun 2016 jumlah ketersediaan air baku di Kabupaten Manggarai Timur sejumlah 3.433.694 M³/tahun dari kebutuhan 4.269.638 M³/tahun, dengan prosentase pemenuhan 52,44%. Dari target yang ditetapkan 52,44% pada tahun 2017, dilakukan pembangunan air Air minum bersih sehingga jumlah ketersediaan air baku 3.621.194 M³/tahun dari kebutuhan air baku 6.560.388 M³/tahun meningkat 187.500 M³/tahun dengan prosentase pemenuhan 55,24% atau pencapaian 100,08%. Capaian kinerja yang dicapai menunjukkan kinerja yang baik dengan predikat Sangat Baik.



Gambar 3.14 Grafik Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

b. **Permasalahan.**

1. Secara teknis data – data yang belum akurat sehingga perencanaan dan pelaksanaan dilapangan tidak mampu menyentuh ke akar rumput.
2. Kesadaran masyarakat di desa – desa masih rendah akan pengetahuan sanitasi.
3. Implementasi pembangunan yang berbasis kinerja belum secara integral menyatu dengan operasional instansi, namun baru pada tahap *output*.
4. Luasnya wilayah Kabupaten Manggarai Timur dan kondisi topografi yang ada membuat laju pembangunan ifrastruktur belum mampu menjangkau seluruhnya.

d. **Solusi.**

1. Perlu pendataan ulang disetiap desa sehingga data yang ada menjadi data yang akurat dan implikasinya perencanaan dan pelaksanaan lebih tepat sasaran.

2. Menyempurnakan metodologi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang mendalam sehingga dapat memberikan pelayanan yang betul-betul mengutamakan prioritas pembangunan yang terpadu dan berpedoman pada RPJMD.
3. Peningkatan kinerja bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur dengan cara :
4. Mengusulkan untuk penambahan SDM yang berkompeten sesuai dengan bidang tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur;
5. Meningkatkan kapasitas aparatur yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur;
6. Mengusulkan untuk penambahan peralatan yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur;
7. Pola pengalokasian anggaran bidang yang sesuai dengan target kinerja yang lebih membutuhkan perhatian serius.
8. Berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian/Lembaga dan Provinsi untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan/jembatan, irigasi yang bukan menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur demi peningkatan kualitas infrastruktur pekerjaan umum.
9. Pengembangan sistem informasi pengukuran data kinerja sampai dengan pencapaian IKU

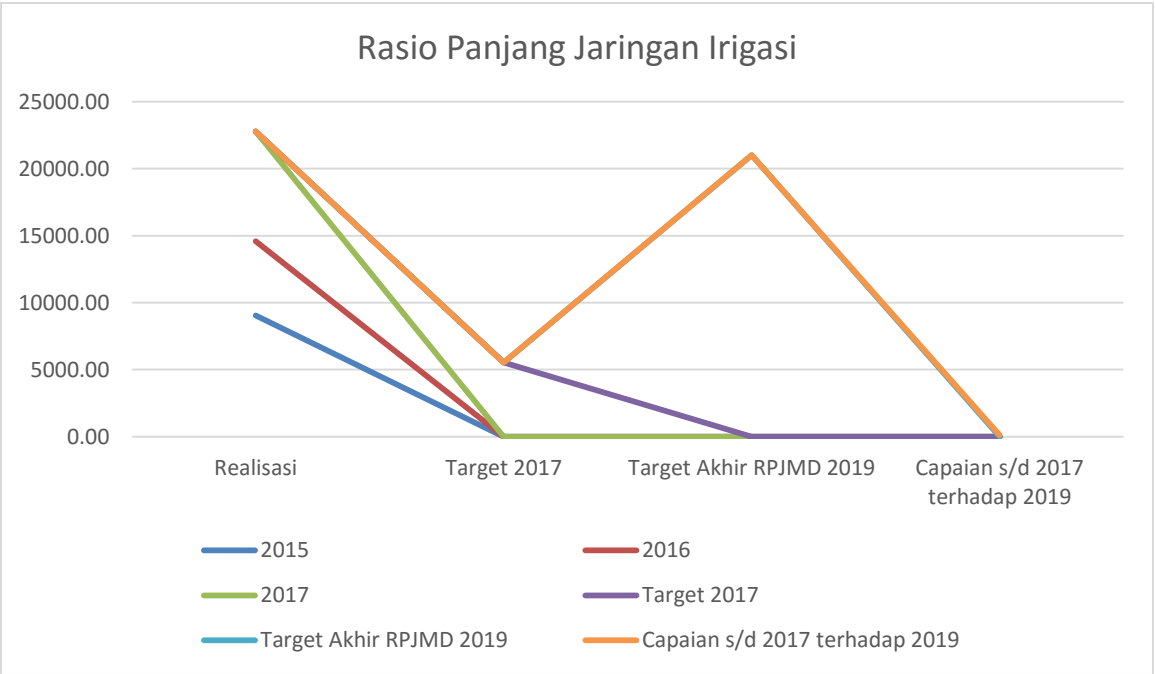
14. Terwujudnya Pengelolaan Irigasi yang Optimal

Tabel 3.16 Rasio Panjang Jaringan Irigasi

No	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
14.	Rasio Panjang Jaringan Irigasi	5540	5540	8194	147,92	210,11	112,05

- a. Mengukur kesuksesan sasaran ini dapat dilihat dari IKU yang terdiri dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :
 - Indikator rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian di Kabupaten Manggarai Timur. Indikator ini dihitung dengan menghitung panjang saluran irigasi dibagi dengan luas lahan budidaya pertanian seluruh Kabupaten Manggarai Timur dikali dengan 100%.
 - Luas area irigasi di Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan tahun 2015 adalah 15.213 Ha.Pada tahun 2015luas area irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah

67,45%. Dari target yang ditetapkan 71,79% pada tahun 2017, dilakukan pembangunan saluran irigasi dan pemeliharaan sehingga luas area irigasi kabupaten yang baik meningkat menjadi 75,04%. Meningkat 3,25% dengan pencapaian 104,53%. Capaian kinerja yang dicapai menunjukkan kinerja yang baik dengan predikat Sangat Baik.



Gambar 3.15 Grafik Rasio Panjang Jaringan Irigasi
 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

- b. **Permasalahan.** Penataan pendataan terkait irigasi masih carut marut dan kualitas irigasi yang ada masih jauh dari harapan. Akses menuju lokasi daerah irigasi belum maksimal sehingga pekerjaan peningkatan saluran irigasi tidak berjalan maksimal.Belum lagi curah hujan di tahun 2016 yang tidak memadai.Begitu juga pembangunan embung yang belum maksimal manfaatnya
- c. **Solusi.** Perlu penataan pendataan data dan selama pengerjaan fisik perlu diawasi secara baik.

15. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tabel 3.17 Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
15.	Terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	402	326	326	100	978	33,33
	Mengurangi luasan kawasan kumuh pada desa dan perkotaan	-	1170	1170	100	1887	62

- a. Pada IKU Terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat yang layak huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Target IKU Dinas Pertanahan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 adalah sebanyak 978 unit Dan hal ini terjadi Jika Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Manggarai Timur Mendapatkan Alokasi Dana DAK / DAU sebesar 4,9 Milyard sebab Target IKU Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Timur setiap Tahunnya adalah sebanyak 326 Unit. Sehingga Realisasi IKU Tahun 2017 terhadap akhir Tahun 2019 adalah sebesar 33,33%.

Mengurangi Luasan Kawasan Kumuh pada Daerah Pedesaan dan Perkotaan. Lingkungan pemukiman kumuh. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Indikator lingkungan pemukiman kumuh adalah perbandingan luas lingkungan pemukiman kumuh dibandingkan dengan luas wilayah secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas lingkungan pemukiman kumuh terhadap keseluruhan luas wilayah. Indikator ini dihitung dengan menghitung luas lingkungan pemukiman kumuh di kabupaten dibagi dengan luas wilayah seluruh di kabupaten dikali dengan 100%. Mengurangi Luasan Kawasan Kumuh pada Daerah Pedesaan dan Perkotaan. Realisasi IKU Tahun 2017 terhadap target Akhir 2019 adalah 33,33% atau 1887 m².

- b. **Permasalahan.** Kebutuhan akan rumah layak huni dan kesehatan lingkungan yang baik menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat. Tetap saja yang menjadi persoalan adalah akurasi data tidak akurat sebagaimana kondisi dilapangan.
- c. **Solusi.** Mendata kembali kebutuhan yang diharapkan warga sehingga tidak terjadi salah sasaran dari program yang akan diturunkan ke masyarakat.

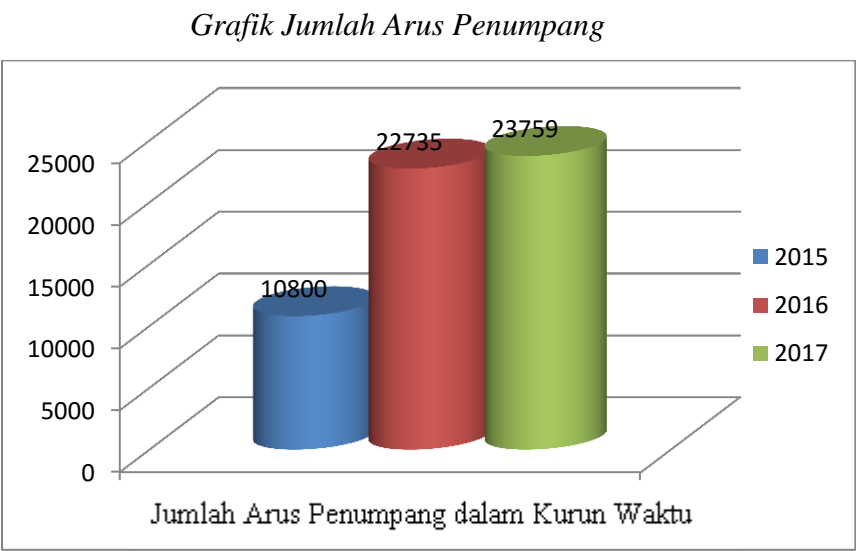
16. **Seluruh Kawasan Dapat Diakses Oleh Sarana Transportasi Publik yang Nyaman dan Lancar**

Tabel 3.18 Jumlah Arus Penumpang dan Angkutan Umum yang Melayani

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
16.	Jumlah Arus Penumpang dalam Kurun Waktu Tertentu	22735	22190	23759	107,07	22750	60,79

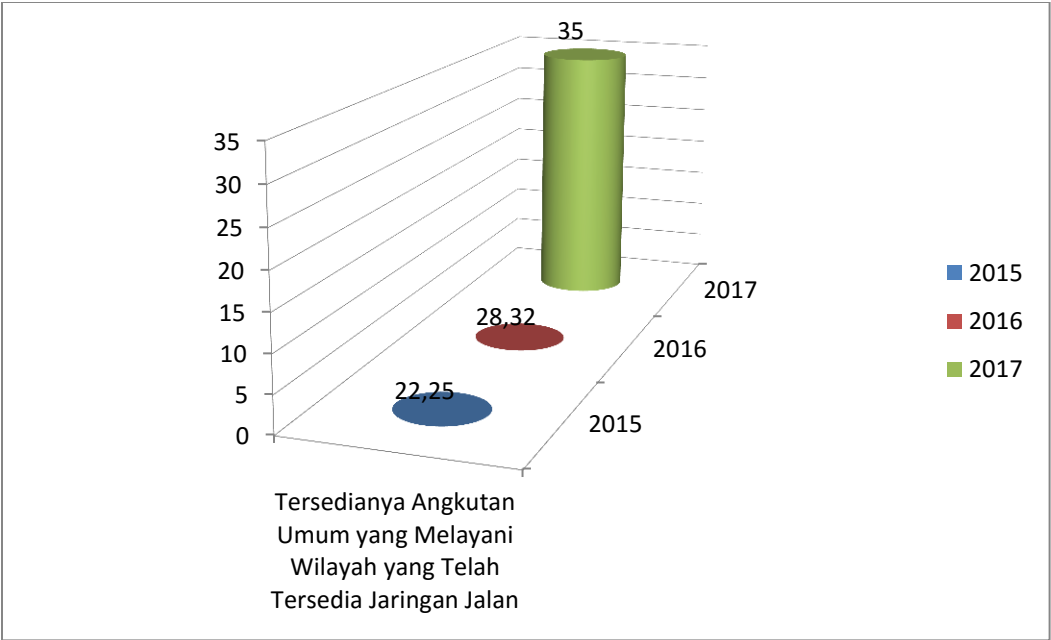
Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang telah Tersedia Jaringan Jalan	28,32	55	35	63,64	75/53,26	46
--	-------	----	----	-------	----------	----

- a. Mengukur kesuksesan sasaran ini dapat dilihat dari IKU yang terdiri dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut.
- Jumlah arus penumpang dalam kurun waktu tertentu dengan target 22190, realisasi 23759 atau 107,7 %. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang keluar masuk terminal khususnya terminal tipe C yang ada di Manggarai Timur. Tingkat capaniannya telah mencapai 100% pada tahun anggaran 2017. Hal ini bisa dipertahankan/ditingkatkan dengan peningkatan infrastuktrur serta peningkatan aksesibilitas antara wilayah.



Gambar 3.16 Grafik Jumlah Arus Penumpang
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang telah Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kab./Kota dengan target 55 %, realisasi 35 % atau 63,64 %.` Perhitungan ini didapat dari Total jaringan trayek di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 71 Trayek. Yang terlayani pada Tahun 2017 sebanyak 40 Trayek. Trayek tersebut dilayani oleh 348 angkutan umum. Angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten belum mencapai target disebabkan oleh infrastruruktur jalan yang kurang baik, yang berpengaruh pada minat masyarakat untuk melakukan usaha di bidang jasa angkutan umum. Indikator ini didukung panjang jalan di suatu kawasan pemukiman yang belum dilalui kendaraan roda 4.



Gambar 3.17 Grafik Angkutan Umum
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

- b. **Permasalahan.** Disebabkan oleh infrastuktur jalan yang kurang memadai di Tahun 2017 dan masih banyak kawasan pemukiman yang belum dibangun jalan yang baik.
- c. **Solusi.** Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini pada tahun berikutnya, maka ditempuh langkah- langkah sebagai berikut: Meningkatkan infrastruktur jalan yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai Timur.

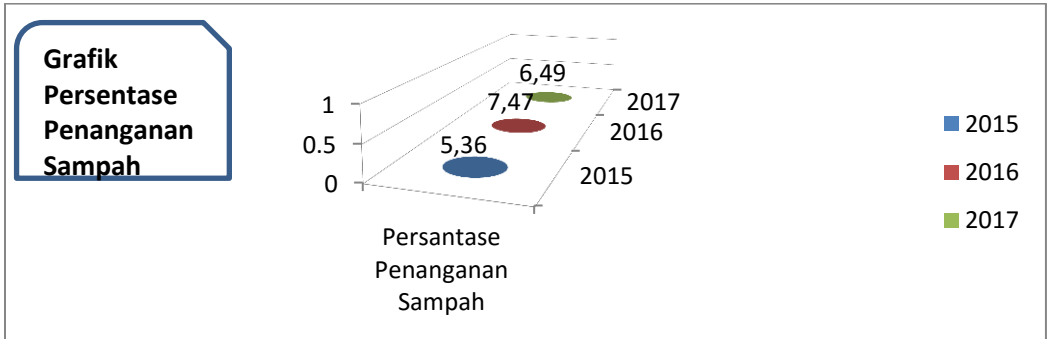
17. Manggarai Timur Menjadi Kabupaten yang Hijau, Bersih, Sehat dan Ramah Lingkungan

Tabel 3. 19 Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pemantauan Status Mutu Air, dan Rasio Ruang Terbuka Hijau

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
17.	Persentase Penanganan Sampah	7,47	8,24	6,49	78,76	5,5/7,47	135,83
	Persentase Pemantauan Status Mutu Air	99,7	100	100	100	100	100
	Rasio Ruang Terbuka Hijau	42,74 (100%)	42,74 (100%)	42,74 (100%)	100	42,74 (100 %)	100

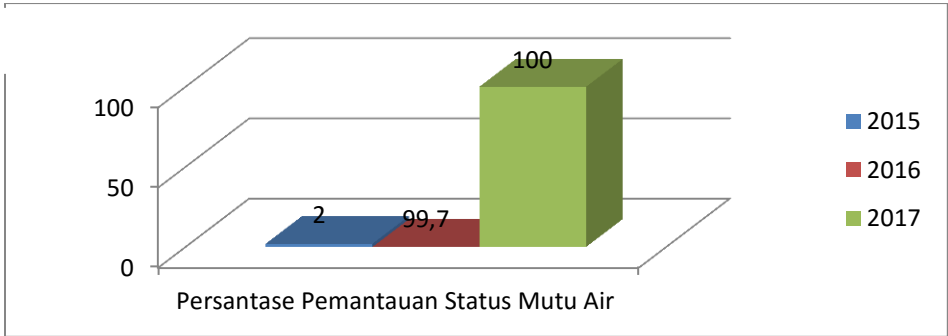
- a. Mengukur kesuksesan sasaran ini dapat dilihat dari IKU yang terdiri dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut.
- Prosentase Penanganan Sampah, dengan target (8,24 %), dengan capaian realisasi sebesar 7,49 %. Produksi sampah yang dihasilkan oleh penduduk di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2017 sebesar 25.033.440.320 M3 dengan asumsi sampah perhari sebanyak 0,232

M3(berdasarkan Permen LH), sedangkan sampah yang tertangani oleh DLH pada tahun 2017 sebesar 1.625.009 M3, yaitu sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Borong terdiri dari 3 Kelurahan dan 2 Desa sebesar 7,49% , atau 96 %.



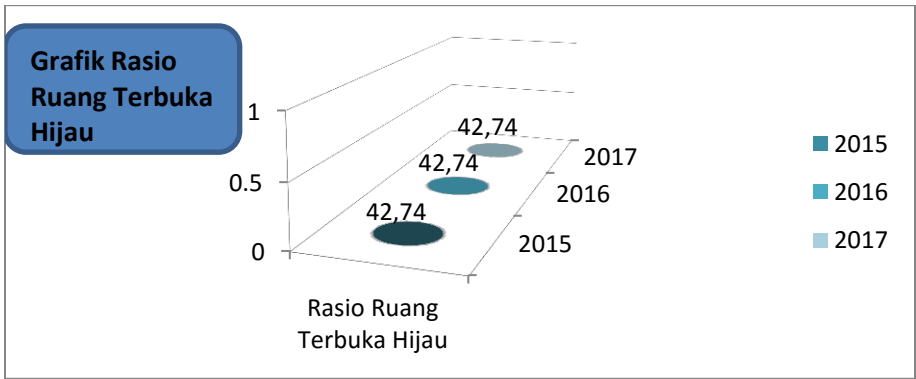
Gambar 3.18 Grafik Persentase Penanganan Sampah
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

Pemantauan Status Mutu Air, dengan target 100 %, capaian 100 % dengan melakukan pemantauan terhadap 2 sungai yang dilakukan pemantauan untuk satu tahun dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pada musim penghujan dan kemarau, dengan hasil data belum ditemukan pencemaran yang berarti.



Gambar 3.19 Grafik Pemantauan Status Mutu Air
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah kota, dengan target 42,74 % dari luas wilayah Kota, ralisasi 42,74%/ 100%, terlaksananya areal taman hijau dalam peningkatan mutu kualitas udara melalui pembangunan RTH pada jalan Bolivar di Kota Borong, serta penanaman pohon dan pembangunan tembok penahan dalam mengurangi tingkat kerusakan lingkungan terhadap bahaya longsor di beberapa daerah aliran sungai di Kota Borong.



Gambar 3.20 Grafik Rasio Ruang Terbuka Hijau
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

b. Permasalahan.

- 1. Penanganan sampah, pemantauan status mutu air, rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah kota masih belum menjadi bagian dari kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- 2. Belum Optimalnya pengangkutan sampah di wilayah kota Borong karena terbatasnya sarana dan prasarana pengangkutan;
- 3. Terbatasnya fasilitas kebersihan karena sebagian besar fasilitas dalam keadaan rusak berat;
- 4. Akses Jalan menuju TPA (Tempat Pembuangan Akhir) masih belum optimal, dan masih memanfaatkan TPA sementara;
- 5. Terbatasnya kelengkapan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup terutama untuk Pengukuran Kimia Air;
- 6. Terbatasnya fasilitas Kerja dan dana Operasional;
- 7. Kurangnya kesadaran masyarakat akan Pentingnya menjaga Lingkungan Hidup.

c. Solusi.

- 1. Sosialisasi, komunikasi dan edukasi perlu dilaksanakan setiap tahun untuk menggugah kesadaran masyarakat.
- 2. Dengan terpenuhinya fasilitas pendukung yang belum optimal tentunya akan memberi dampak terhadap pelayanan yang prima dalam rangka peningkatan kinerja.

18. Tertanggulangnya Bencana Secara Dini dan Komprehensif

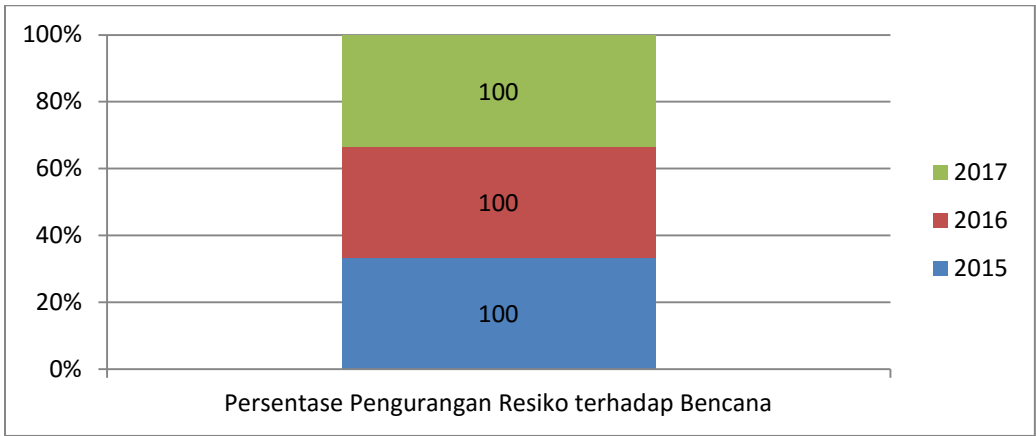
Tabel 3.20 Tertanggulangnya Bencana Secara Dini dan Komprehensif

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
18.	Persentase Pengurangan Resiko terhadap Bencana	100	100	100	100	100	80
	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100	100	100	100	100	80

- a. Mengukur kesuksesan sasaran ini dapat dilihat dari IKU yang terdiri dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:
 - Indikator kinerja utama Persentase pengurangan resiko bencana , indikator turunan :
 - Jumlah tenaga pemantau dan penyebarluasan informasi potensi bencana , dengan target tahun 2017 39 orang, realisasi 39 orang, dengan capaian kinerja 100 %.
 - Jumlah rambu peringatan bencana , dengan target di tahun 2017 8 rambu, realisasi 8 rambu dengan capaian kinerja 100 %.

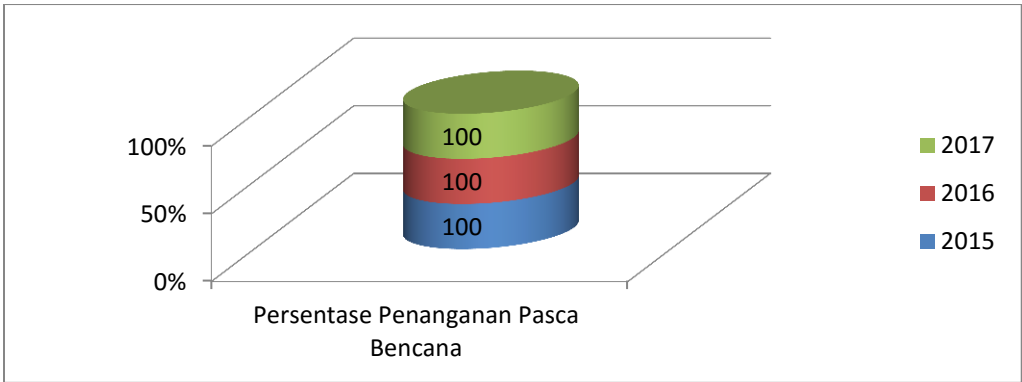
- Jumlah posko bencana dan SDM yang menangani siaga bencana , dengan targetdi tahun 2017 1 posko, realisasi 1 posko dengan capaian kinerja 100 %
- Jumlah brosur atau liflet tentang bencana , dengan target 1000 buah, realisasi 1000 buah dengan capaian kinerja 100 %

Capaian kinerja secara keseluruhan untuk indikator kinerja utama di atas adalah 100 %.



Gambar 3.20 Grafik Persentase Pengurangan Resiko Terhadap Bencana
Sumber BPBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

- Indikator kinerja utama prosentase penanganan pasca bencana dengan indikator turunan:
 - Jumlah bahan bantuan bangunan perumahan , dengan target 1 paket, realisasi 1 paket dengan capaian kinerja 100 %
 - Jumlah penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana , dengan target 10 paket realisasi 42 paket dengan capaian kinerja 420 %



Gambar 3.21 Grafik Persentase Penanganan Pasca Bencana

Capaian kinerja secara keseluruhan untuk indikator kinerja utama di atas adalah 260 %.

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan sasaran dan indikator yang ada di tahun 2017 adalah 180 % atau dengan kategori sangat berhasil.

b. **Permasalahan.** Kondisi cuaca yang tidak mendukung saat pelaksanaan kegiatan yang menghambat proses penanganan bencana dan pasca bencana. Terhambatnya mobilisasi pengiriman bahan bantuan bagi korban bencana di karenakan kurangnya fasilitas operasional.

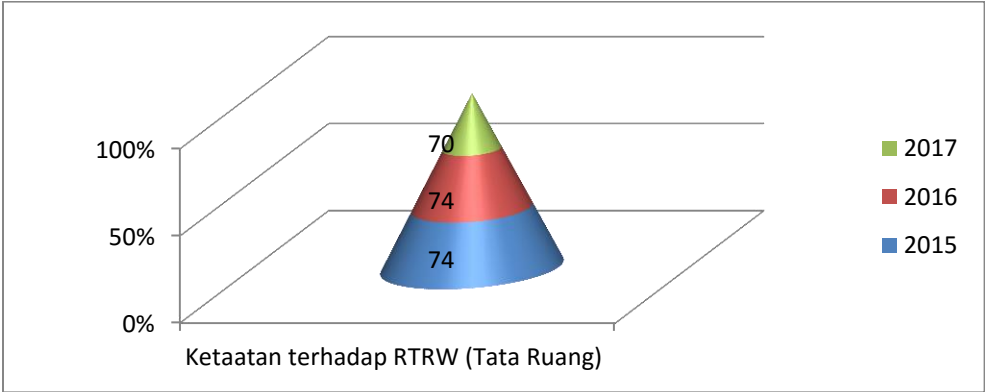
- c. **Solusi.** Penambahan fasilitas operasional untuk mempercepat mobilisasi pengiriman bahan bantuan bagi korban bencana, serta dibutuhkan pemanfaatan perencanaan pada penanganan pasca bencana.

19. Terwujudnya Perencanaan, Pemanfatan dan Pengendalian Tata Ruang

Tabel 3.21 Tabel Ketaatan terhadap RTRW

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
19.	Ketaatan terhadap RTRW (Dokumen Tata Ruang)	74	85,5	70	82	90	77,77

- a. Mengukur kesuksesan sasaran ini dapat dilihat dari IKU yang terdiri dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :
 Target Indikator Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang adalah, 85,5%, Realisasi 70% dan persentase hasil 81,8%. Indikator tidak mencapai target 18,2% karena belum optimalnya koordinasi tingkat OPD teknis yang menangani urusan Penataan Ruang. Solusinya, pada akhir Tahun Anggaran 2018 akan ditingkatkan peran OPD Teknis yang tergabung dalam Badan Koordinasi tingkat Kabupaten Manggarai Timur yang menangani urusan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.



Gambar 3.22 Grafik Ketaatan Terhadap RTRW
 Sumber: BP3 Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

- b. **Permasalahan.** Masih belum berjalannya RTRW dan belum tuntasnya RDTR sehingga ketaatan terkait tata wilayah dan tata ruang belum berjalan maksimal.
- c. **Solusi.** Secepatnya dua dokumen itu ditetapkan diterapkan.

20. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan)

Tabel 3.22 Produksi dan Produktivitas Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan)

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap p 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
20.	Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan	19,75	31,12	19,17	61,60	69,97	72,08
	Luas areal tanaman perkebunan unggulan yang ditingkatkan	7825	350	100	28,57	10500	84,24
	Jumlah produksi perikanan	4250,05	3230,3	4408,34	136,46	3500	125,95
	Jumlah Populasi Ternak	120837	143059	107624	75,23	142870	80,096

- a. Dapat dijelaskan di bawah ini:
- Produktifitas Komoditi Tanaman Pangan. Indikator kinerja ini diintervensi melalui kegiatan laporan produksi pertanian daerah. Melalui kegiatan ini akan diperoleh data produktifitas komoditi tanaman pangan. Targetnya adalah sebagai berikut : Padi sawah target 4,5 ton/ ha realisasi 3,91 ton/ha, jagung 4,5 ton/ha realisasi 3,02 ton/ha, padi ladang 1,25 ton/ha realisasi 1,26 ton/ha, kedelai 1,90 ton/ha realisasi 0,75 ton/ha, kacang hijau 1,15 ton/ha realisasi 0,82 ton/ha, ubi kayu 9 ton/ha realisasi 4,81 ton/ha, ubi jalar 8,2 ton/ha realisasi 4,68 ton/ha. Walaupun angka produksi tanaman pangan tahun 2017 sebagian besar lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 akan tetapi angka produktifitas untuk beberapa komoditi lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa luas panen (dua kali musim tanam dalam satu tahun) lebih kecil dari pada luasan areal tanam. Kondisi terjadi sebagai dampak el nino yang terjadi di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2017. Beberapa komoditi yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 diantaranya adalah: jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, sedangkan beberapa komoditi lainnya seperti padi sawah, padi ladang, ubi kayu dan ubi jalar produksinya lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016.
- Produktifitas Tanaman Pangan. Indikator kinerja ini diintervensi melalui kegiatan Laporan berkala Kondisi Ketahanan Pangan Tanaman Pangan. Melalui kegiatan ini akan diperoleh data produktifitas komoditi tanaman pangan.

1. Produktifitas Tanaman Pangan :

- Padi sawah : 4 ton/ha
- Jagung : 4,5 ton/ha
- Padi Ladang : 1,25 ton/ha
- Kedelai : 1,90 ton/ha
- Kacang Hijau : 1,15 ton/ha
- Ubi Kayu : 9 ton/ha
- Ubi Jalar : 8,2 ton/ha
- Sorghum dan Jelai : 1,12 ton/ha

Indikator ini diintervensi melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan laporan produksi pertanian daerah. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 235.190.000. Dengan realisasi Rp 199.688.000 atau sebesar 84,90 %.

Tabel 3.23 Produksi dan Produktifitas komoditi tanaman pangan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 dan 2017

NO .	JENIS KOMODITI	LUAS TANAM (HA)		LUAS PANEN (HA)		PRODUKSI (TON)		PRODUKTIV ITAS (TON/HA)	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1.	Padi Sawah	23.795,00	21.127,00	20.701,00	22.957,00	81.905,40	89.806,90	3,96	3,91
2.	Padi Ladang	1.909,00	1.527,50	1.395,00	1.618,00	1.839,60	2.044,00	1,32	1,26
3.	Jagung	6.787,00	5.712	3.422,00	6.147,00	10.112,16	18.581,18	2,96	3,02
4.	Kedelai	83,00	165,00	73,00	319,00	43,80	240,10	0,60	0,75
5.	Kacang Hijau	299,00	120,00	158,00	254,00	127,10	207,40	0,80	0,82
6.	Kacang Tanah	46,00	32,00	12,00	61,00	10,80	55,50	0,90	0,91
7.	Ubi Kayu	1.289,00	1.649,00	1.277,00	1.684,00	6.577,53	8.095,86	5,15	4,81
8.	Ubi Jalar	654,00	560,00	557,00	543,00	2.757,30	2.539,90	4,95	4,68

Sumber data : Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Kab. Manggarai Timur

Luas Areal Tanaman Perkebunan Unggulan yang ditingkatkan. Indikator ini diintervensi melalui kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan (Ektensifikasi). Melalui kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan perluasan areal tanam petani yang mendapat bantuan perluasan areal (ekstensifikasi). Target perluasan areal perkebunan pada lahan petani adalah: kopi (50 Ha), kakao (50 Ha), cengkeh (200 Ha), vanili (5 Ha) dan pala (5 Ha). Realisasinya telah disalurkan bantuan bibit tanaman kopi (0 Ha), kakao (50 Ha), cengkeh (0 Ha), vanili (0 Ha) dan pala (5 Ha). Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 627.941.500 dengan realisasi sebesar Rp. 305.436.000 atau 48,64% dari anggaran yang disediakan. Adapun bantuan bibit kopi,

vanili, tidak dapat disalurkan kepada petani karena ketersediaan bibit berlabel sesuai dengan spesifikasi teknis yang diharapkan tidak tersedia pada produsen benih berlabel. Sedangkan benih cengkeh anggarannya ditiadakan pada saat perubahan anggaran karena pada tahun 2017 komoditi cengkeh tidak berproduksi. Pada tahun 2017 juga Kabupaten Manggarai Timur memperoleh tambahan bantuan yang bersumber dari dana APBD I untuk kegiatan perluasan areal kakao (30 Ha), cengkeh (30 Ha) dan kopi arabika (30 Ha). Selain itu juga Kabupaten Manggarai Timur memperoleh bantuan dari APBN untuk kegiatan perluasan areal pengembangan tanaman cengkeh seluas 100 Ha. Realisasi capaian terhadap target perluasan areal tanam komoditi perkebunan adalah sebesar 50% dari target. Pada tahun 2016 Kabupaten Manggarai bantuan perluasan areal tanam dari dana APBD II adalah: kopi (20 Ha), kakao (50 Ha), cengkeh (300 Ha) dan pala (20 Ha) dengan realisasi capaian target 100%, sedangkan dari APBD I: Kopi 50 (Ha), cengkeh 75 (Ha) dan Pala (100 Ha). Dengan demikian persentase realisasi fisik tahun 2017 lebih rendah dari tahun 2016.

Populasi Ternak

Tabel 3.24 Target dan Realisasi Populasi Ternak di Kab. Manggarai Timur Tahun 2017:

NO.	JENIS TERNAK	TARGET (EKOR)	REALISASI (EKOR)	PERSENTASE (%)
1.	Sapi	17.735	15.062	84,93
2.	Kerbau	12.877	7.807	60,63
3.	Kuda	6.722	3.296	49,03
4.	Kambing	34.627	52.232	150,84
5.	Babi	71.098	29.227	41,11

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur 2017

Target Populasi Ternak di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017 adalah seagai berikut: sapi 17.735 ekor realisasi 15.062 ekor, kerbau 12.877 ekor realisasi 7.807 ekor, kuda 6.722 ekor realisasi 3.296 ekor, kambing 34.627 ekor realisasi 52.232 ekor dan babi 71.098 ekor realisasi 29.227 ekor. Populasi ternak di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017 tidak mencapai target RPJMD, hal ini disebabkan sebagai dampak lanjutan kematian ternak yang terjadi pada tahun 2015 di kecamatan sentra peternakan. Sementara data yang ditampilkan merupakan data hasil pendataan di lapangan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan yang hampir tersebar di 176 desa/kelurahan . Pada tahun 2016 populasi ternak di kabupaten Manggarai Timur juga tidak mencapai target, hal ini disebabkan tidak adanya kegiatan pendataan ternak

dilapangan juga sebagai dampak lanjutan dari anomali iklim berupa el nino pada tahun 2015 yang berdampak pada tingginya akan kematian ternak akibat kekurangan pakan. Kecamatan yang paling berdampak adalah kecamatan Kota Komba. Pada tahun 2015 angka kematian ternak di kecamatan kota komba adalah : ternak sapi (1.423 ekor), Kerbau (578 ekor) dan Kuda (195 ekor). Pada tahun 2017 jumlah ternak yang diantarpulaukan dari Kabupaten Manggarai Timur sebagai berikut : Sapi (800 ekor), Kerbau (250 ekor), Kuda (200 ekor) dan Kambing (50 ekor).

Indikator jumlah produksi perikanan dengan target yang ingin dicapai sebesar 3.230,3 ton, realisasi 4.408,34 ton dengan capaian kinerja 136,46 %. Dijabarkan pada program pengembangan perikanan tangkap, kegiatan pengadaan sarana penangkapan ikan dengan anggaran sebesar Rp.1.781.101.000, program pengembangan budidaya perikanan, kegiatan pengembangan bibit ikan unggul dengan anggaran sebesar Rp.142.197.000, kegiatan pengembangan budidaya air payau dengan anggaran Rp.146.925.000, kegiatan pengembangan sistem budidaya intensif melalui kolam percontohan dengan anggaran Rp.1.218.822.000 program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, kegiatan pembangunan UPR dengan anggaran Rp.137.170.000.

Tabel 3.25 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2017

No	Kecamatan	Perikanan Budidaya					
		Tambak	Kolam	Budidaya Laut/Rumput Laut	Sawah	Laut	Jumlah
1	Borong	0,75	12,4	-	11,2	-	24,35
2	Ranamese	-	24,5	-	19,2	-	43,7
3	Kota Komba	-	19,2	-	11,21	-	30,41
4	Elar	2,15	2,92	-	3,8	0,1	8,87
5	Elar Selatan	-	3,25	-	3,9	-	7,15
6	Sambi Rampas	0,75	3,4	-	9,68	-	13,83
7	Poco Ranaka	-	33,5	-	23,8	-	57,3
8	Poco Ranaka Timur	-	40,2	-	20,2	-	60,4
9	Lamba Leda	0,32	3,1	74,925	9,6	0,05	87,945
	Total	3,97	142,47	74,925	112,59	0,15	333,96

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur 2017

Tabel 3.26 Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2017

JENIS IKAN	BORONG	KOTA KOMBA	RANA MESE	LAMBA LEDA	SAMBI RAMPAS	ELAR	TOTAL
Tembang	252,87	84,85	8,51	192,32	92,5	13,5	644,55
Lemuru	43,5	16,5	2,02	41,6	18,5	2,8	124,92
Terbang	50,51	25,07	2,45	109,3	37,1	12,2	197,08
Julung – Julung	39,77	15,2	1,78	47,9	18,4	4,8	109,45
Kembung	110,29	38,6	2,50	92,25	45,24	4,9	291,28
Selar	2,81	1,2	0,80	3,1	1,6	1,4	10,11
Tongkol	486,19	179,2	10,8	419,6	195,2	24,89	1315,88
Layur	3,2	0,92	0,40	4,15	1,8	0,7	10,77
Kakap Merah	20,3	9,7	1,5	34,12	22,9	3,06	91,58
kerapu Karang	10,59	4,15	0,6	17,07	19,36	2,22	53,99
Cakalang	105,3	38,8	2,9	84,29	25,46	5,6	262,35
Cendro	8,77	3,88	0,8	13,2	4,55	0,6	31,8
Layang Anggur	98,53	34,19	2,1	82,38	37,10	3,12	220,32
Kurisi	0,32	0,42	0,8	0,19	1,92	0,98	4,63
Peperek	5,82	2,19	0,7	5,1	1,2	0,2	15,21
Biji Nangka	0,81	0,50	0,2	1,1	1,35	0,60	3,26
Pinjalo	0,3	0,4	0,3	2,24	4,2	1,8	9,24
Lolosi Biru	0,52	0,38	0,40	3,29	3,9	1,2	8,91
Tuna	20,2	44,4	0	68,8	75,9	1,8	211,1
Kuwe	3,2	1,8	0,5	8,7	7,7	0	21,9
Tenggiri	6,5	2,35	0,1	5,34	2,51	0,33	8,95
Lencam	4,2	2,1	0,4	6,42	7,2	2,4	22,72
Teri	0	0	0	382,4	0	0	382,4
Ikan Lainnya	7,2	1,98	0,3	6,4	4,6	1,5	21,98
Total	1281,7	507,9	34,11	1625,92	535,08	89,67	4074,38

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur 2017

b. Permasalahan.

- 1.Pemerintah daerah belum maksimal menggali potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, kehewanan dan perikanan di Manggarai Timur. Potensi pertanian paling potensial untuk dikembangkan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi nelayan, pembudidaya, dan pengolah dan pemasar ikan
3. Masih kurangnya minat masyarakat untuk makan ikan

4. Rendahnya frekuensi pembinaan kepada kelompok-kelompok nelayan
5. Ketersediaan benih ikan yang masih terbatas

c. **Solusi.**

- 1.Pemerintah daerah perlu memberi perhatian lebih pada sektor pertanian.
- 2.Pemberian stimulant untuk usaha
- 3.Penyebarluasan/kampanye/sosialisasi mengkonsumsi ikan di masyarakat
- 4.Mengagendakan kegiatan pelatihan beserta anggaran kegiatan pelatihan
- 5.Mengagendakan kegiatan pengadaan benih dan induk serta calon induk ikan beserta anggarannya

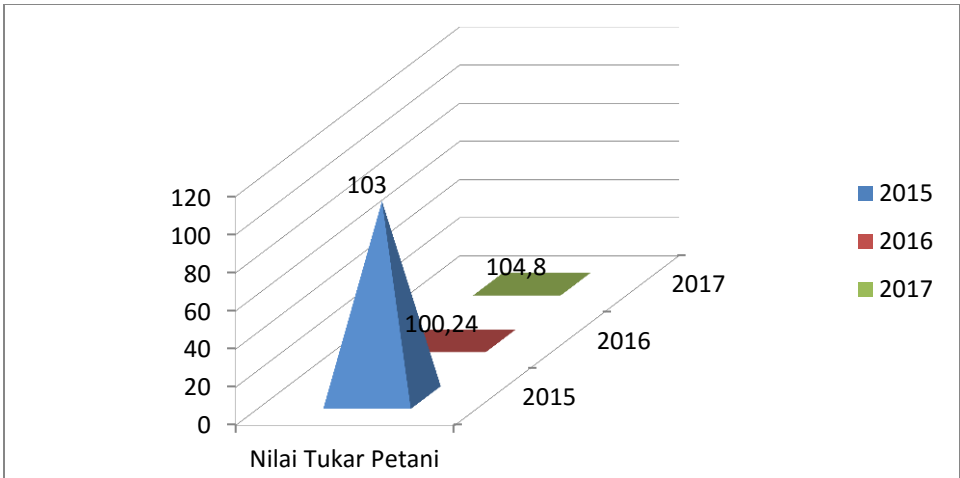
21. Meningkatkan Nilai Tambah Hasil dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)

Tabel 3.27 Nilai Tukar Petani

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
21.	Nilai Tukar Petani	100,24	100,24	104,8	104,55	33,62	97,61

- a. Salah satu indikator untuk menilai naik atau turunnya derajat kehidupan petani dapat dilihat dan dijelaskan dengan indikator Nilai Tukar Petani : 100,24

Indikator ini bertujuan untuk mengukur Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2017. Perhitungan NTP dilakukan oleh Biro Pusat Statistik Pusat. Angka realisasi yang dicantumkan dalam laporan ini merupakan angka kutipan yang bersumber dari Publikasi resmi Biro Pusat Statistik Pusat. Data-data yang dicantumkan merupakan data kondisi bulan Desember 2017 untuk Provinsi NTT. Adapun NTP untuk Provinsi NTT bulan Desember 2017 sebesar 104,80 dari target 100,24. Pada tahun 2016 ditargetkan NTP sebesar 100,24 dengan realisasi sebesar 101,32. Capaian tahun 2017 lebih tinggi dibanding tahun 2017.



Gambar 3.23 Grafik Nilai Tukar Petani
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

- b. **Permasalahan.** Data yang ada hanya menggandakan data dari biro statistik provinsi. Sementara pemerintah daerah belum memiliki data ril sendiri terkait NTP.
- c. **Solusi.** Pemerintah daerah Kab. Manggarai Timur perlu memiliki data sendiri yang lebih *up-to-date*.

22. Meningkatkan Ketahanan Pangan

Tabel 3.28 Ketersediaan Pangan Utama

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
22.	Ketersediaan Pangan Utama	150	117	137	117,09	80 %	417,66

- a. Mengukur kesuksesan sasaran ini dapat dilihat dari IKU yang terdiri dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut.

Ketersediaan Pangan Utama. Ketersediaan pangan utama yang dimaksud adalah ketersediaan beras, Jagung, ubi kayu dan Ubi Jalar yang dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur. Analisis Ketersediaan pangan utama dimaksudkan untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam memenuhi pangan utama bagi masyarakat Manggarai Timur. Jumlah Penduduk yang digunakan dalam perhitungan adalah 288.289 Jiwa.

Ketersediaan Beras. Ketersediaan rata - rata Beras Kabupaten Manggarai Timur yang dikonsumsi sebanyak 433.390 ton. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk maka Persentase ketersediaan pangan beras Kabupaten Manggarai Timur sebesar 150 %.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel analisa berikut :

Ketersediaan Pangan Utama

=

Rata rata Jumlah ketersediaan pangan utama

Jumlah Penduduk

x 100 %

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KAB. MANGGARAI TIMUR TAHUN 201778

Tabel 3.29 Tabel analisa Ketersediaan Pangan Utama

Item		Satuan	2014	2015	2016	2017
1	Produksi gabah (GKG)	Ton	70.000	71.000	84.456	91.851
2	Produksi beras	Ton	43.918	44.545	52.988	57.627
3	Penjualan ke luar daerah	Ton	650	650	650	131
	Jml beras stl penjualan	Ton	43.268	43.895	52.338	57.497
4	Pembelian beras dari luar daerah	Ton	11.692	11.692	8.034	8.535
	Jumlah beras stl pembelian	Ton	54.960	55.587	60.372	66.032
5	Selisih stok awal - stok akhir di Dolog Kab/Kota	Ton	100	100	100	12.995
	Jumlah persediaan beras	Ton	55.060	55.687	60.472	79.027
6	Kecukupan konsumsi beras/kapita/hari	Gram	518	518	484	459
	Jumlah penduduk	Jiwa	283.033	288.289	288.289	294.518
	Total konsumsi beras	Ton	53.513	54.507	50.929	49.374
7	Jumlah Kecukupan Cadangan Beras/Tahun	Ton	1.547	1.181	9.543	29.653
8	Jumlah Ketersediaan Pangan (Kg)	Kg	55.060.000	55.687.400	60.471.694	79.027.387
	Rata rata Kebutuhan Pangan per Hari (KG)	Kg	146.611	149.334	139.532	195.155
	Rata Rata Ketersediaan Pangan Per Hari	Kg	375.551	372.906	433.390	404.946
	% Ketersediaan Pangan	%	133%	129%	150%	137%
	Jumlah Kecukupan Cadangan Beras/Hari	Ton	4,24	3,23	26	81
	% Cadangan Pangan	%	1%	1%	7%	15%

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Manggarai Timur 2017

Tabel di atas menunjukan rata – rata ketersediaan pangan utama Kabupaten Manggarai Timur sebesar 137 %, Yang artinya ketersediaan pangan Kabupaten Manggarai Timur cukup untuk kebutuhan 403.490 Jiwa.

Capaian pada Tahun 2017 turun dari pencapaian pada Tahun 2016. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk yang mencapai 2% sehingga mempengaruhi tingkat kebutuhan konsumsi masyarakat Manggarai Timur secara keseluruhan. Namun pencapaian ini sudah melampoi dari target pada tahun 2017 sebesar 117 %.

Pada akhir Tahun 2019 diharapkan kondisi Ketersediaan pangan utama mencapai 126 %. Namun kondisi ini sudah dapat dicapai pada tahun 2017, sehingga pencapaiann ini perlu dipertahankan mengingat pertumbuhan penduduk selalu meningkat sedangkan luas lahan cendrung tetap bahkan berkurang.

Indikator turunan yang mendukung IKU diatas adalah sebagai berikut :

- Rasio Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Target capaian ketersediaan energi dan protein pada Tahun 2017 sebesar 130 %. Berdasarkan hasil perhitungan, pencapaian ketersediaan energi sebesar 119,54 % dan ketersediaan protein sebesar 115,86 % sehingga tingkat ketersediaan energi dan protein pada Tahun 2017 sebesar 117,69 %. Realisasi ketersediaan energi dan protein pada Tahun 2017 tidak memenuhi target serta turun dari pencapaian pada Tahun sebelumnya (2016) sebesar 14,64 %.

Tabel 3.30 Data Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita per Hari Tahun 2017

NO.	JENIS BAHAN MAKANAN	Ketersediaan Per Kapita Per Hari			
		Energi		Protein	
		Kkal	%	Gram	%
1.	Padi-padian	2.316	105,27	56,89	99,81
2.	Makanan Berpati	176	8,01	1,43	2,51
3.	Gula	4	0,20	0	0,00
4.	Buah Biji berminyak	31	1,40	1,44	2,53
5.	Buah-buahan	38	1,71	0,42	0,74
6.	Sayur-sayuran	3	0,15	0,16	0,28
7.	Daging	13	0,60	0,75	1,32
8.	Telur	15	0,67	1,18	2,07
9.	Susu	0	0,01	0,01	0,02
10.	Ikan	22	1,00	3,76	6,60
11.	Minyak dan Lemak	11	0,52	0,00	0,00
	Total	2.630	119,54	66,04	115,86

Sumber: Neraca Bahan Makanan Kabupaten Manggarai Timur 2017

Turunnya pencapaian ketersediaan energi dan protein pada Tahun 2017 tidak mempengaruhi pemenuhan kebutuhan energi dan protein masyarakat Manggarai Timur. Ketersediaan energi Tahun 2017 sebesar 2.630 kkal lebih tinggi dari ketersediaan energi nasional sebesar 2.400 kkal. Ketersediaan protein 2017 sebesar 66,04 gram lebih tinggi dari ketersediaan protein secara nasional 57 gram.

- Penguatan Cadangan Pangan

Capaian penguatan Cadangan pangan pada Tahun 2017 sebesar 81 % lebih tinggi 20 % dari pencapaian Tahun 2016 dan telah melampaui target pada tahun 2017. Cadangan beras

pada tahun 2017 mencapai 29.684 Ton per tahun, jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat Manggarai Timur 49.342 Ton maka cadangan beras Tahun 2017 hanya mampu menangani 60 % atau mampu menangani 220 Hari.

Tabel 3.31 Jumlah Cadangan Pangan di Kabupaten Manggarai Timur

Item		Satuan	2014	2015	2016	2017
1	Produksi gabah (GKG)	Ton	70.000	71.000	84.456	91.851
2	Produksi beras	Ton	43.918	44.545	52.988	57.627
3	Penjualan ke luar daerah	Ton	650	650	650	131
	Jml beras stl penjualan	Ton	43.268	43.895	52.338	57.496
4	Pembelian beras dari luar daerah	Ton	11.692	11.692	8.034	8.535
	Jumlah beras stl pembelian	Ton	54.960	55.587	60.372	66.031
5	Selisih stok awal - stok akhir di Dolog Kab/Kota	Ton	100	100	100	12.995
	Jumlah persediaan beras	Ton	55.060	55.687	60.472	79.026
6	Kecukupan konsumsi beras/kapita/hari	Gram	362	362	362	459
	Jumlah penduduk	Jiwa	283.033	288.289	288.289	294.518
	Total konsumsi beras per tahun	Ton	37.397	38.092	38.092	49.342
7	Jumlah Kecukupan Cadangan Beras/Tahun	Ton	17.663	17.596	22.380	29.684
	Jumlah Kecukupan Cadangan Beras/Hari	Ton	48,39	48,21	61	81

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Manggarai Timur 2017

- Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

Capaian indikator ketersediaan informasi pasokan pada Tahun 2017 sebesar 93,58 % lebih tinggi pencapaiannya dari pencapaian Tahun 2016 sebesar 85,2 % dan telah melampoi target pada Tahun 2017. Pencapaian ini sebagai akibat dari kerjasama yang baik dengan para sekretaris desa/kelurahan di 176 Desa.

Tabel 3.32 Capaian Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan, dan Akses Pangan Tahun 2017

I	1 = Harga			2 = Pasokan			3 = Akses		
J	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1. Komoditas/indikator	10	10	100	10	10	100	7	7	100
2. Lokasi	9	9	100	9	9	100	9	9	100
3. Waktu (Minggu)	52	43	82,69	52	43	82,69	52	40	76,92
Ki	94,23			94,23			92,30		
Nilai Capaian Ketersediaan Informasi (K)	93.58								

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Manggarai Timur 2017

- Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Indikator stabilisasi harga dan pasokan pangan adalah intrumen ketahanan pangan untuk melihat tingkat kesetabilan harga dan pasokan pangan. Analisis ini dilakukan dnegan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KAB. MANGGARAI TIMUR TAHUN 201781

membandingkan target harga dengan realita mingguaan selama satu Tahun. Pada Tahun Anggaran 2017 Stabilisasi harga dan pasokan pangan 97 %. Pencapaian tahun 2017 lebih tinggi dari pencapaian Tahun 2016 dan target Tahun 2017.

- Skor PPH
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi pangan dan keragaman konsumsi baik pada tingkat ketersediaan maupun pada tingkat konsumsi, sekaligus sebagai perencanaan ketersediaan dan konsumsi pangan. Pada tahun 2017 pencapaian skor PPH sebesar 72,1 meningkat 2,1 skor dari Tahun 2016 sebesar 70. Namun realisasi pada Tahun 2017 belum mencapai target skor PPH 80.

Tabel 3.33 Konsumsi Aktual dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								
		Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Gap Skor AKE dan Skor Maksimal	Skor PPH
1.	Padi-padian	1689.6	70.2	78.6	0.5	35.1	39.3	25.0	14.3	25.0
2.	Umbi-umbian	79.8	3.3	3.7	0.5	1.7	1.9	2.5	-0.6	1.9
3.	Pangan Hewani	117.9	4.9	5.5	2.0	9.8	11.0	24.0	-13.0	11.0
4.	Minyak dan Lemak	171.6	7.1	8.0	0.5	3.6	4.0	5.0	-1.0	4.0
5.	Buah/Biji Berminyak	4.4	0.2	0.2	0.5	0.1	0.1	1.0	-0.9	0.1
6.	Kacang-kacangan	38.8	1.6	1.8	2.0	3.2	3.6	10.0	-6.4	3.6
7.	Gula	16.3	0.7	0.8	0.5	0.3	0.4	2.5	-2.1	0.4
8.	Sayur dan Buah	112.7	4.7	5.2	5.0	23.4	26.2	30.0	-3.8	26.2
9.	Lain-lain	174.1	7.2	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Total	2405.2	100.0	111.9	11.5	77.3	86.4	100.0		72.1

Keterangan : Angka Kecukupan Energi (AKE) Kab. Manggarai Timur 2.405,2 kkal/Kap/hari

Sumber: Hasil Survey Dinas Pangan Tahun 2017

- Pengawasan dan Pembinaan Pangan
Merupakan kegiatan yang menggambarkan suatu kondisi yang menggambarkan presentase pangan aman di Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi ini dijelaskan melalui perbandingan antara sampel pangan aman terhadap seluruh sampel makanan yang diambil. Proses pengambilan sampel makanan dilakukan melalui kegiatan inspeksi mendadak di 9 Kecamatan di kabupaten Mangagrai Timur (pasar). Tahun 2017, Tingkat keamanan Pangan di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 97,59 % meningkat 2,59 % dari tahun 2016 sebesar 95 %. Perhitungan pencapaian realisasi Mutu dan Keamanan

pangan diperoleh dari pengujian hasil dengan menggunakan Uji Cepat Rapid Test Kit Formalin, Boraks, dan Pestisida pada 166 sampel.

Tabel 3.34 Rekapitulasi Hasil Uji Cepat Rapid Test Kit Formalin, Boraks, dan Pestisida

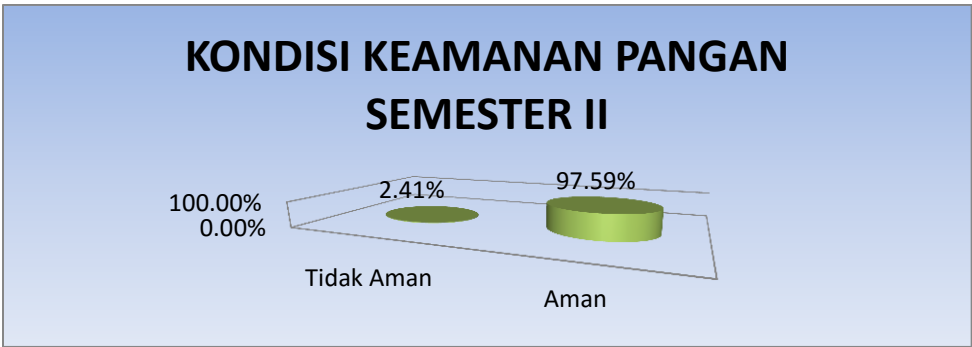
No.	Kecamatan	Jenis Uji			Jumlah Sampel	Hasil Pengujian	
		Formalin	Boraks	Pestisida		Positif	Negatif
1	Borong	18	0	8	26	0	26
2	Rana Mese	8	8	6	22	2	20
3	Kota Komba	8	0	6	14	0	14
4	Poco Ranaka	16	0	0	16	0	16
5	Poco Ranaka Timur	10	10	0	20	2	18
6	Elar	8	0	0	8	0	8
7	Elar Selatan	3	0	5	8	0	8
8	Lamba Leda	12	12	8	32	0	32
9	Sambi Rampas	7	6	7	20	0	20
Jumlah		90	36	40	166	4	162
Kondisi Keamanan Pangan (aman)						2,41%	97,59%

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Manggarai Timur 2017

Berdasarkan Hasil Uji Cepat Rapid Test Kit Formalin, Boraks, dan Pestisida pada tabel diatas, disimpulkan :

1. Dari 90 sampel uji formalin yang tersebar di 9 kecamatan, 4 diantaranya positif mengandung formalin (warna sampel kemerahan) pada mi bihun dan mi kuning.
2. Dari 36 sampel uji Boraks yang tersebar di 6 Kecamatan diperoleh hasil negatif untuk seluruh sampel atau bebas dari cemaran Boraks.
3. Dari 40 sampel uji Pestisida yang tersebar di 7 kecamatan diperoleh hasil negatif untuk seluruh sampel atau bebas dari cemaran Pestisida.

Secara keseluruhan hasil uji terdapat 166 sampel, 4 diantaranya positif tercemar formalin, dengan prosentase aman 97,59%



Gambar 3.24 Grafik Kondisi Keamanan Pangan semester

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Manggarai Timur 2017

- **Penanganan Daerah Rawan Pangan**

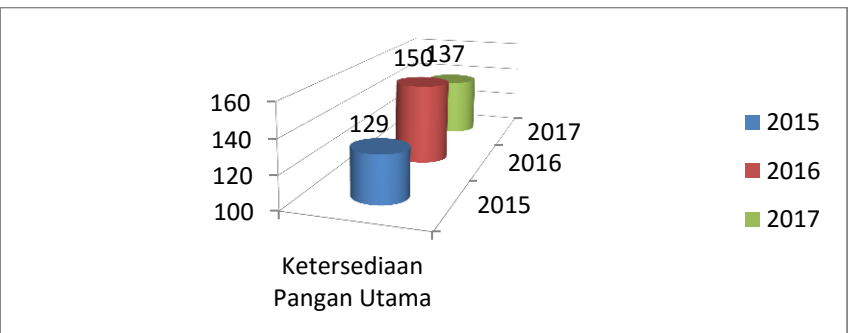
Merupakan kegiatan untuk menangani daerah Rawan pangan di Kabupaten Manggarai Timur. Capaian dari indikator ini 100 % dimana belum terjadi daerah rawan pangan di kabupaten Manggarai Timur. Untuk mengatasi daerah rawan pangan, Dinas pangan melakukan identifikasi wilayah untuk menentukan skala prioritas penanganan daerah rawan pangan. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan diperoleh :

- 1. Prioritas 1 : 0 Desa
- 2. Prioritas 2 : 29 Desa
- 3. Prioritas 3 : 62 Desa
- 4. Prioritas 4 : 85 Desa

Wilayah yang rentan pangan adalah wilayah pada Prioritas 1 dan Prioritas 2 sedangkan wilayah yang tahan pangan adalah wilayah pada Prioritas 3 dan Prioritas 4

- **Regulasi Ketahanan Pangan**

Regulasi Ketahanan Pangan merupakan suatu aturan dalam bentuk PERDA terkait Ketahanan Pangan. Target regulasi Ketahanan Pangan Tahun 2017 adalah 0 Perda dan hingga tahun 2018 diharapkan terdapat 2 Perda terkait dengan Ketahanan pangan. Pada tahun 2017 tidak terdapat Perda yang diusulkan terkait Ketahanan Pangan.



Gambar 3.25 Grafik Ketersediaan Pangan Utama
Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Manggarai Timur 2017

b. **Permasalahan.**

- 1. Jumlah penduduk yang meningkat mempengaruhi ketersediaan pangan di Kabupaten Manggarai Timur;
- 2. Kurangnya koordinasi mengenai program dan kegiatan lintas OPD dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan.

c. **Solusi.**

- 1. Pemilihan pangan alternative lainnya selain beras perlu terus disosialisasikan dan dipromosikan, mengingat jumlah penduduk terus bertambah sedangkan lahan pertanian cenderung bekurang;
- 2. Optimalisasi fungsi kerja dewan ketahanan pangan.

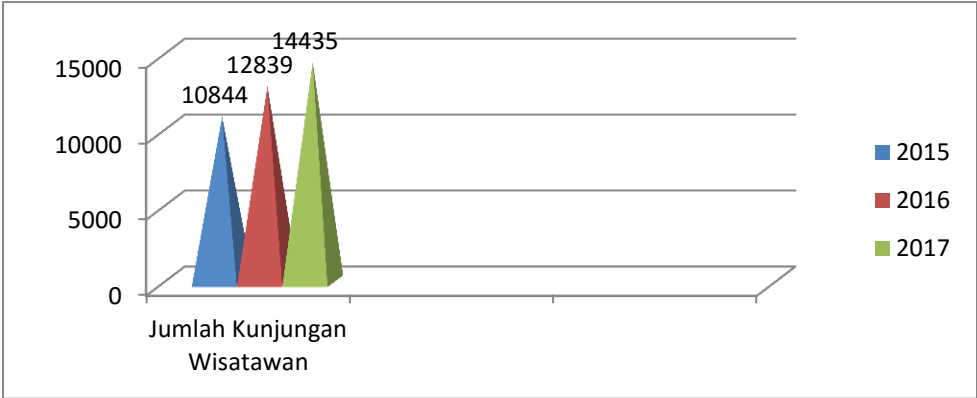
23. Meningkatnya Jumlah Pengunjung Objek Wisata

Tabel 3.35 Jumlah Kunjungan Wisatawan

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
23.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	12839	8000	14435	180	9000 Orang	185

Tahun 2017 target jumlah kunjungan wisatawan adalah 8000 orang. Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan mencapai 14.435 orang dengan Prosentase Pengukuran Kinerjanya 180%.Sasaran ini melampaui target dan melalui:

- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata yakni kegiatan yakni Pembuatan Billborad Pariwisata dan kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata didalam negeri yakni Pemilihan Putri Pariwisata Tingkat Kabupaten, Tour de Flores, Festival Tanjung Bendera dan Kerjasama dengan Media untuk promosi pariwisata.
- Program Pengembangan Kemitraan dengan kegiatan Pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang pariwisata yakni kegiatan sosialisasi sapta pesona dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata yakni kegiatan pendataan potensi desa wisata.
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yakni kegiatan Pembangunan Pagar Tembok, Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak dan pedestian di Obyek Wisata Pantai Cepi Watu; kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata yakni penyusunan Dokumen AMDAL destinasi wisata, serta kegiatan pengembangan obyek pariwisata unggulan yakni pembangunan rabat beton di Compang Mano Kelurahan Mandosawu



Gambar 3.26 Grafik Kunjungan Wisatawan

Sumber: Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga 2017

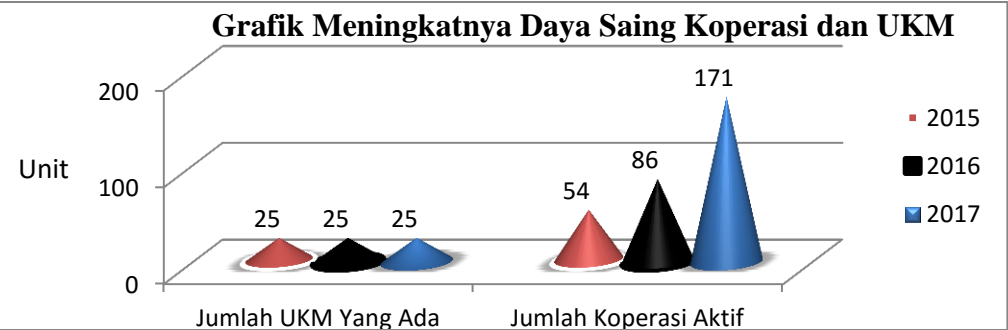
- b. **Permasalahan.**
1. Banyak obyek dan daya tarik wisata yang belum terdata dan dinilai potensinya.
 2. Obyek dan daya tarik wisata yang terdapat di Manggarai Timur yang belum di kenal secara luas baik di dalam maupun di luar negeri.
 3. Belum optimalnya penataan obyek wisata andalan Kabupaten Manggarai Timur baik dari segi fasilitas pendukung maupun infrastruktur.
- c. **Solusi.**
1. Kegiatan monitoring dan evaluasi , sebagai upaya untuk mendata dan menilai potensi obyek dan daya tarik wisata yang ada dan tersebar di Kabupaten Manggarai Timur.
 2. Untuk memperkenalkan obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga melakukan kerjasama media. Selain itu di lakukan penerbitan brosur Pariwisata sebagai media informasi pariwisata Manggarai Timur juga dengan kegiatan Tour de Flores, Pemilihan Putri Pariwisata, Pemasangan Billboard Pariwisata, serta even tahunan Festival Tanjung Bendera.
 3. Pada tahun 2017, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga melalui Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata melakukan penataan di obyek wisata andalan yakni di Pantai Cepi Watu, dan melakukan perencanaan untuk penataan obyek wisata lainnya.

24. **Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM**

Tabel 3.36 Daya Saing Koperasi dan UMKM

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
24.	Jumlah UMKM yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan	100	25	20	80	245	90
	Jumlah Koperasi yang Aktif	86	145	171	117	60/91,9	66,66

- a. Mengukur kesuksesan sasaran ini dapat dilihat dari IKU yang terdiri dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut.



Gambar 3.27 Grafik Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM
Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

- Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan di targetkan 25 orang realisasi 20 orang atau 80%. Kegiatan ini menghadirkan orang-orang yang banyak bergelut dan bergerak di dunia Usaha Kecil dan Menengah. Pelatihan ini dalam rangka memberi pengetahuan dan keterampilan sehingga mempercepat pertumbuhan dan perkembangan UMKM, dikarenakan banyak pelaku UKM yang sangat berantusias untuk mengikuti pelatihan.
- Jumlah Koperasi yang berbadan Hukum di targetkan 145 koperasi realisasi 171 koperasi atau 117%. Didukung oleh kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian yang dihadiri 360 orang, kegiatan pelatihan pengurus Koperasi yang berjumlah 20 Orang, pendamping Koperasi sebanyak 45 orang, dan Jumlah koperasi yang memiliki program Aplikasi Komputerisasi sebanyak 2 koperasi.

- b. **Permasalahan.** Meskipun sudah berhasil tapi masih memerlukan pembenahan lebih lanjut.
- c. **Solusi.** Memerlukan intervensi lebih banyak lagi.

25. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Berinvestasi

Tabel 3.37 Jumlah Investasi yang Masuk

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
25.	Jumlah Investasi yang Masuk	5.100.000.000	5.000.000.000	13,7 M	274	20 Milyard	75,73

- a. Jumlah investor berskala nasional pada tahun 2017 ditargetkan 1 investor dari total 3 investor pada akhir periode RPJMD. Realisasi di tahun 2017 1 investor (100%).
- Jumlah nilai investasi berskala nasional di tahun 2017 sebesar 13,7 M, Jika diakumulasikan dari tahun 2014, realisasi nilai investasi telah mencapai ± 40 M dan telah melebihi yang ditargetkan di tahun 2014-2019 yakni sebesar 20 M. Kondisi ini didukung realisasi PMDN di tahun 2017 sebesar -10,37% .Realisasi PMDN pada tahun 2017 hanya sebesar Rp 39.123.000,00 yang mengakibatkan realisasi target indikator menurun menjadi -10,37%. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan berinvestasi juga didukung oleh indikator turunan berikut :

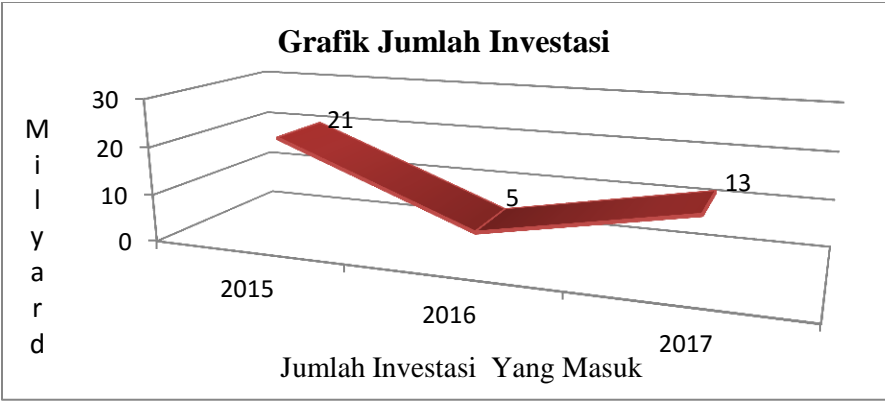
Tabel 3.38 Indikator Turunan Pendukung Iku Jumlah Investasi Yang Masuk

NO	INDIKATOR TURUNAN PENDUKUNG IKU	TARGET RPJMD	REALISASI 2017
1	Jumlah Investor Berskala Nasional	3 orang	0
2	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	12,76%	-10,68%
3	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang	5 sektor	1 sektor

	unggulan		
4	Terselenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 kali	1 kali
5	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDKPM di tingkat Kabupaten: Pendaftaran Penanaman Modal Daerah Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Daerah Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di satu Kabupaten/Kota sesuai Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	83,33%
6	Lama proses perizinan	5,4 hari	6,24 hari
7	Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan jumlah permohonan yang diajukan	100%	100%

Sumber: Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

- Jumlah investor berskala nasional pada tahun 2017 ditargetkan 1 investor dari total 3 investor pada akhir periode RPJMD. Target ini tidak terealisasi, dengan demikian realisasi di tahun 2017 sebesar 0%.
- Nilai realisasi PMDN di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar -10,68% dari yang ditargetkan pada akhir periode RPJMD yakni sebesar 12,76%.
- Target tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan pada tahun 2017 tercapai yaitu 1 sektor. Jika dibandingkan dengan total target RPJMD (5 sektor), pencapaian tahun 2017 sebesar 20% .
- Target terselenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal Kabupaten/Kota, dari 3 kali target pelaksanaan, pada tahun 2017 tidak terlaksana. Dengan demikian realisasi pencapaian target RPJMD pada tahun 2017 sebesar 0%.
- Pencapaian target indikator pada akhir periode RPJMD sebesar 83,33%.
- Lama proses perizinan yang ditargetkan di akhir periode RPJMD adalah 5,4 hari. Pada tahun 2017 realisasi target sebesar 6,24 hari (86,54%)
- Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan jumlah permohonan yang dimasukan yang dicapai di tahun 2017 sebesar 100%.
- Terselenggaranya Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha terealisasi 1 kali dari yang ditargetkan 3 kali pada akhir periode RPJMD
- Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal kepada Masyarakat Dunia usaha yang terselenggara di tahun 2017 sebanyak 9 kali yang ditargetkan sebanyak 45 kali. Berdasarkan target pada RPJMD, realisasi capaian tahun 2017 sebesar 20%.



Gambar 3.28 Grafik Jumlah Investasi Yang Masuk
Sumber: Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

b. **Permasalahan.**

- Kurangnya promosi dan informasi serta optimalisasi pemanfaatan potensi dan peluang investasi daerah yang berdampak pada kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Manggarai Timur.
- Kurangnya koordinasi dari OPD teknis terkait izin-izin yang telah dilimpahkan kepada DPMPTSP dan lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan dari OPD teknis dalam mengevaluasi pelaksanaan perda-perda sebagai upaya meningkatkan PAD.

c. **Solusi.**

- Mengoptimalkan kinerja badan penanaman modal dalam menginformasikan semua potensi daerah yang mampu menarik investor untuk berinvestasi.
- Mengadakan koordinasi dengan SKPD teknis dalam rangka penyamaan persepsi dalam rangka upaya penyederhanaan proses perizinan (penyederhanaan persyaratan, waktu dan biaya) dan proaktif untuk terus mendorong OPD teknis mengajukan rancangan peraturan daerah berkaitan dengan izin yang menjadi kewenangan daerah.

26. **Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja**

Tabel 3.39 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
26.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1 : 85	1 : 100	1:87,5	97,36	1:150	58,33

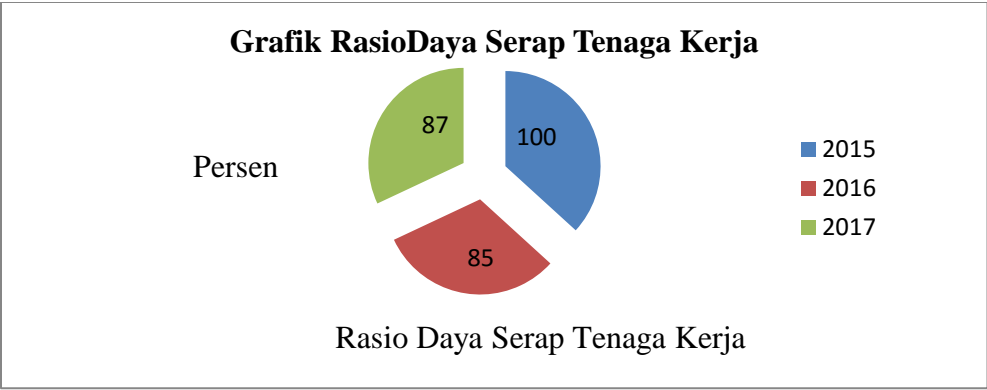
- a. Mengukur indikator dapat dilihat pada Rasio daya serap tenaga kerja di targetkan 1:100 pada 2017 dari total 1 : 150 pada akhir periode RPJMD. Capaian tahun 2017, 1:87,5 atau pencapaian 58,33 %. Sasaran strategis terlaksananya program ini adalah *Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja*. Untuk memenuhi sasaran

strategis tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 3 (Tiga) kegiatan yaitu :

- Penyusunan Data Base Tenaga Kerja dengan indikator kinerja mengetahui *Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan* dengan target sebesar 176 (Seratus Tujuh Puluh Enam) Desa/ Kelurahan dan terealisasi sebesar 5 (Lima) Desa/ Kelurahan atau sebesar 2,84 %. Alokasi anggaran sebesar Rp.147.324.300,- terealisasi sebesar Rp. 147.224.300,- dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 96,94 %. Adapun Desa tersebut adalah Desa Ngampang Mas, Desa Balus Permai, Desa Sita, Desa GoloLobos, Desa Sano Lokom dan Desa Bea Waek.
- Fasilitasi Bagi Pencari Kerja dengan indikator kinerja mengetahui *Besaran Terserapnya Tenaga Kerja* dengan target sebesar 45 (Empat Puluh Lima) orang dan terealisasi sebesar 265 (Dua Ratus Enam Puluh Lima) orang atau sebesar 588,89 %. Alokasi anggaran sebesar Rp. 231.679.150,- terealisasi sebesar Rp. 217.825.000,- dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 94,02 %. Adapun rincian besaran tenaga kerja yang terserap adalah sebagai berikut :
 - Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 166 orang;
 - Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 84 orang;
 - Pelamar umum sebanyak 15 orang.
- Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi dengan tujuan memenuhi indikator kinerja mencapai *Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi* dengan target sebesar 30 (Tiga Puluh) orang dan terealisasi sebesar 30 (Tiga Puluh) orang atau sebesar 100 %. Alokasi anggaran sebesar Rp. 147.324.300,- terealisasi sebesar Rp. 147.224.300,- dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,93 %. Adapun pelatihan berbasis kompetensi tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 15 Desember tahun 2017 bertempat di Borong dengan materi pelatihan kompetensi pertukangan.
- Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industiral dengan indikator kinerja mencapai *Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)* dengan target sebesar 9 (Sembilan) kasus dan terealisasi sebesar 2 (Dua) kasus atau sebesar 22,22 %. Alokasi anggaran sebesar Rp. 67.931.540,- terealisasi sebesar Rp. 24.130.790,- dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 35,52 %.
- Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan indikator kinerja mencapai *Besaran Sosialisasi Undang – Undang Ketenagakerjaan* dengan target sebesar 9 (Sembilan) kali dan tidak terealisasi, namun alokasi anggaran sebesar Rp. 117.981.000,- terealisasi sebesar Rp. 115.906.000,- dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,24 %, dimana anggaran

tersebut dimanfaatkan untuk melakukan pendataan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan – perusahaan penyerap tenaga kerja di 4 (Empat) Kecamatan di wilayah Kabupaten Manggarai Timur yaitu Kecamatan Borong, Kecamatan Kota Komba, Kecamatan Rana Mese dan Kecamatan Poco Ranaka, dengan hasil; jumlah buruh yang didata sebanyak 893 orang namun belum menjadi anggota peserta BPJS Ketenagakerjaan.

- Angka partisipasi angkatan kerja pada tahun 2017 ditargetkan dalam RPJMD adalah sebesar 44,09 % dan realisasi sebesar 70 %. Hal ini menggambarkan adanya kemajuan penanganan angkatan kerja yang berpartisipasi aktif dalam berbagai program pembangunan terutam melalui program PNPM.
- Tingkat partisipasi angkatan kerja ditargetkan dalam RPJMD adalah sebesar 77 % dan realisasi nya sebesar 70 %. Hal ini juga menunjukan adanya peningkatan kesadaran angatan kerja dalam setiap aspek pembangunan.
- Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 ditargetkan dalam RPJMD 9 % dan realisasinya sebesar 13,6 %, ini menggambarkan masih tingginya tingkat pengangguran terutama pengangguran musiman yang diakibatkan oleh kondisi darurat, misalnya karena panas panjang maka para petani beralih profesi menjadi buruh bangunan, Namun apabila tidak memiliki ketrampilan maka terjadi pengangguran musiman, begitu pula halnya dengan para nelayan yang terpaksa tidak bias melaut akibat gelombang dll dan apabila mereka tidak memiliki ketrampilan lain maka terjadilah pengangguran.
- Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2017 ditargetkan dalam RPJMD 11,30 % dari total angkatan kerja. Pada tahun 2017 terdapat Tenaga kerja yang terdaftar sebanyak 106 Orang Tenaga kerja dan realisasi nya sebesar 106 tenaga kerja atau 100 %.
- Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat dan Kewirausahaan pada tahun 2017 ditargetkan dalam RPJMD 25 % dan realisasi nya sebesar 45 Orang atau 100 % karena yang terdaftar sebanyak 45 orang.
- Besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) pada tahun 2017 ditargetkan dalam RPJMD 50% dari kasus yang dilaporkan dan pada tahun 2017 dapat diselesaikan 3 kasus yang dilaporkan atau sebesar 60 % dari target 5 Kasus.
- Besaran pemeriksaan perusahaan pada tahun 2017 ditargetkan dalam RPJMD 45% dari total perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja dari Kabupaten Manggarai Timur, dan pada tahun 2017 terdapat 76 perusahaan terdaftar yang mempekerjakan tenaga kerjra dari Kabupaten Manggarai Timur.



Gambar 3.29 Grafik RasioDaya Serap Tenaga Kerja
Sumber: Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

- b. **Permasalahan.**
- Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang prosedur perekrutan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
 - Masih rendahnya tingkat kesadaran pekerja tentang perlindungan hukum dalam kasus perselisihan hubungan Industrial
 - Masih rendahnya tingkat kesadaran pekerja dan perusahaan tentang K3 dan penerapan JAMSOSTEK
- c. **Solusi.**
- Meningkatkan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan tentang prosedur perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
 - Meningkatkan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan tentang perlindungan hukum dalam kasus perselisihan hubungan Industrial
 - Meningkatkan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan tentang K3 dan penerapan JAMSOSTEK
 - Pemerintah daerah perlu membuka balai latihan kerja untuk tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri atau ke daerah lain di Indonesia.

27. **Meningkatnya Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Sinergis dan Terarah**

Tabel 3.40 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
27	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	ADA	ADA	ADA	100	ADA	ADA

- a. Untuk mengetahui capaian IKU ini dapat dilihat penjelasan di bawah ini :
- Target tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA adalah ADA, realisasi ADA dan persentase hasil 100%. PERDA

dan PERKADA yang ditangani Bappeda yang wajib ada setiap Tahun Anggaran, sehingga Bappeda memprioritaskan program dan kegiatan ini. Didukung oleh :

- Target Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD adalah, 90%, realisasi 85% dan persentase hasil 94%, Program ini tidak mencapai target karena ada program yang tidak masuk dalam RKPD.
- Target Penjabaran Program dan Kegiatan KUA dan PPAS kedalam APBD adalah, 90%, realisasi 90% dan persentase hasil 100%, Target indikator ini mencapai 100% karena semua aspek kepegawaian dan anggaran yang ada mendukung tercapainya indikator ini.

b. **Permasalahan.** Banyak data dalam RPJMD tidak sinkron dengan data perencanaan di OPD. OPD seringkali tidak berpedoman pada RPJMD khusus yang terkait dengan indikator kinerja.

c. **Solusi.** Baik Pemerintah Daerah maupun OPD perlu mensinkronkan kembali data perencanaannya.

28. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Tabel 3.41 Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
28.	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen LAKIP yang terintegrasi dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
	Opini BPK dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	WDP	WTP	Dalam Proses	Dalam Proses	WTP	WDP

- a. Dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Nilai LAKIP tahun 2016 adalah CC/50,11. LAKIP tahun anggaran 2017 masih dalam proses penyusunan. Untuk menyikapi masalah ini maka perlu dilakukan BIMTEK dan pembenahan LAKIP 2016 berdasarkan rekomendasi dari BPKP Pusat.
Persentase OPD yang menyampaikan LAKIP adalah sebanyak 100 % atau dengan kata lain semua OPD di Kabupaten Manggarai Timur telah menyampaikan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah secara terintegrasi dan tepat waktu.
 - Pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mendapat opini BPK dengan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dalam manajemen pengelolaan keuangan

- daerah. Untuk mendapat nilai baik atau wajar tanpa pengecualian (WTP) maka pemerintah daerah berupaya meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan, tata kelola keuangan dan manajemen organisasi. Sementara untuk tahun anggaran 2017 masih dalam proses audit oleh BPK.
- b. **Permasalahan.** Data LAKIP tidak sejalan dengan Indikator kinerja di RPJMD dan manajemen aset di daerah masih lemah (data aset jarang diikuti dengan bukti fisik, seperti tanah penyerahan dari masyarakat).
 - c. **Solusi.** Data LAKIP perlu disinkronkan kembali oleh tim teknis. Pemerintah daerah perlu lakukan Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan, tata kelola keuangan BIMTEK tenaga auditor daerah dan manajemen organisasi. Manajemen aset daerah perlu dibenahi.

29. Meningkatnya Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Daerah

Tabel 3.42 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	IKU	2016	2017			Target Akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2017 Terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
29.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19.678.696.908,90	24.000.000.000	85.117.394.766,71	354,66	27.000.000.000	315,24

IKU ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah dengan target tahun 2017 RPJMD-nya 24.000.000.000,- realisasi 85.117.394.766,71 sehingga capaian kinerjanya adalah 354,66 % dan pada tahun 2016 realisasinya 129%.
 Peningkatan pendapatan asli daerah dengan target tahun 2017 24.000.000.000,- realisasi 19.678.696.908,90,- sehingga capaian kinerjanya adalah 93,71% dan pada tahun 2016 realisasinya 116,38%. Didukung pajak dan Retribusi dengan target tahun 2016 RPJMD-nya : Hotel dengan target tahun 2017 RPJMD-nya 1 buah realisasi 1 buah, sehingga capaian kinerjanya 100% dan pada tahun 2016 realisasinya 100%; Restoran dengan target tahun 2017 RPJMD-nya 5 buah realisasi 5 buah sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dan pada tahun 2017 realisasinya tahun 2016adalah 100%; Reklame dengan target tahun 2017 RPJMD-nya 15 buah realisasi 15 buah sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dan pada tahun 2016 realisasinya 100%; PBB dengan target tahun 2017 RPJMD-nya 750 obyek realisasi 750 obyek sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dan pada tahun 2016 realisasinya 100%; dan Retribusi dengan target tahun 2017 RPJMD-nya 150 obyek

realisasi 150 obyek sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dan pada tahun 2016 realisasinya 100%.

- b. **Permasalahan.** Potensi daerah belum dikelola maksimal untuk meningkatkan PAD.
- c. **Solusi.** Pemerintah daerah perlu melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam kaitan upaya meningkatkan PAD.

3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan pembiayaan maka, perkembangan target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.43 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Bertambah / (Berkurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	934,957,641,753.11	916,931,538,716.82	(18,026,103,036.29)	98.07
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	11,132,796,498.00	11,141,191,998.00	8,395,500.00	100.08
4	Pendapatan Retribusi Daerah	2,146,000,000.00	1,781,729,458.00	(364,270,542.00)	83.03
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,498,720,325.00	7,498,720,325.00	-	100.00
6	Lain-lain PAD yang Sah	69,275,403,117.00	64,695,752,985.71	(4,579,650,131.29)	93.39
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	90,052,919,940.00	85,117,394,766.71	(4,935,525,173.29)	94.52
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	8,756,872,477.00	7,611,790,921.00	(1,145,081,556.00)	86.92
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1,606,867,826.00	751,566,552.00	(855,301,274.00)	46.77
12	Dana Alokasi Umum	499,269,564,000.00	499,269,564,000.00	-	100.00
13	Dana Alokasi Khusus	188,294,916,431.00	176,623,272,941.00	(11,671,643,490.00)	93.80
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	697,928,220,734.00	684,256,194,414.00	(13,672,026,320.00)	98.04
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
16	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	-	
17	Dana Penyesuaian	126,092,079,000.00	126,092,079,000.00	-	100.00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	126,092,079,000.00	126,092,079,000.00	-	100.00

19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	18,523,232,479.11	19,089,627,933.11	566,395,454.00	103.06
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			-	
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	18,523,232,479.11	19,089,627,933.11	566,395,454.00	103.06
23	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	20,884,422,079.11	21,465,870,536.11	581,448,457.00	102.78
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	2,361,189,600.00	2,376,242,603.00	15,053,003.00	100.64
26	Pendapatan Dana Darurat	0	0	-	
27	Pendapatan Lainnya	0	0	-	
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	2,361,189,600.00	2,376,242,603.00	15,053,003.00	100.64
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)			-	
30	BELANJA	805,707,490,481.38	740,341,998,994.01	(65,365,491,487.37)	91.89
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	308,014,929,987.38	293,172,666,381.00	(14,842,263,606.38)	95.18
33	Belanja Barang	246,212,929,519.00	226,676,988,679.01	(19,535,940,839.99)	92.07
34	Bunga			-	
35	Subsidi			-	
36	Hibah	30,219,305,550.00	29,135,667,500.00	(1,083,638,050.00)	96.41
37	Bantuan Sosial	500,000,000.00	201,055,000.00	(298,945,000.00)	40.21
38	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	584,947,165,056.38	549,186,377,560.01	(35,760,787,496.37)	93.89
39	BELANJA MODAL	220,460,325,425.00	191,155,621,434.00	(29,304,703,991.00)	86.71
40	Belanja Tanah	0	0	-	
41	Belanja Peralatan dan Mesin	31,244,207,229.00	19,398,459,831.00	(11,845,747,398.00)	62.09
42	Belanja Gedung dan Bangunan	73,135,875,610.00	65,486,927,274.00	(7,648,948,336.00)	89.54
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	105,213,279,947.00	98,060,956,935.00	(7,152,323,012.00)	93.20
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	10,866,962,639.00	8,209,277,394.00	(2,657,685,245.00)	75.54
45	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	220,460,325,425.00	191,155,621,434.00	-29,304,703,991.00	86.71
46	BELANJA TAK TERDUGA				
47	Belanja Tak Terduga	300,000,000.00	0	(300,000,000.00)	0.00
48	Jumlah Belanja Tak Terduga (55)	300,000,000.00	0	(300,000,000.00)	0.00
49	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)			-	
50	TRANSFER	181,791,827,031.30	180,424,934,926.00	(1,366,892,105.30)	

51	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1,000,449,000.00	974,918,356.00	(25,530,644.00)	97.45
52	Transfer Bagi Hasil Pajak	850,000,000.00	828,308,658.00	(21,691,342.00)	97.45
53	Transfer Bagi Hasil Lainnya	150,449,000.00	146,609,698.00	(3,839,302.00)	97.45
54	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	180,791,378,031.30	179,450,016,570.00	(1,341,361,461.30)	
55	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	178,142,970,791.30	176,868,214,770.00	(1,274,756,021.30)	99.28
56	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2,648,407,240.00	2,581,801,800.00	(66,605,440.00)	97.49
57	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL (61 s/d 63)	180,791,378,031.30	179,450,016,570.00	(1,341,361,461.30)	99.26
58	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)			-	
59	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	(52,541,675,759.57)	(3,835,395,203.19)	48,706,280,556.38	7.30
60	PEMBIAYAAN	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-	100.00
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
62	Pengunaan SILPA	62,179,797,757.57	62,179,797,757.57	-	100.00
63	Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Lainnya	361,878,002.00	275,451,321.00	(86,426,681.00)	76.12
64	Jumlah Penerimaan (72 s/d 73)	62,541,675,759.57	62,455,249,078.57	(86,426,681.00)	99.86
65	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			-	
66	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-	100.00
67	Pemberian Pinjaman (dana bergulir)	0	0	-	
68	Jumlah Pengeluaran (77 s/d 78)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-	100.00
69	PEMBIAYAAN NETTO (74 - 79)	52,541,675,759.57	52,455,249,078.57	(86,426,681.00)	99.84
70	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 80)	(0.00)	48,619,853,875.38	48,619,853,875.38	

Adapun Realisasi dari Anggaran Indikator Kinerja Utama Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.44 Anggaran dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

No.	Sasaran	IKU	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1.	Meningkatnya Akses Pendidik Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang Merata Kepada Masyarakat	Meningkatnya Angka Melek Huruf	150,000,000,00	35,232,000,00	23,48
2.	Meningkatnya Mutu Pendidikan, dan Tenaga Kependidikan	Prosentase PTK yang S – 1	24,873,737,350,00	24,769,488,180,00	99,58
3.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dan Meningkatnya Prestasi Olah raga	Jumlah Kompetisi Olah Raga yang Diselenggarakan	939,321,684,00	889,191,600,00	94,66
4.	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat yang Bermutu, Merata dan Terjangkau	Angka Usia Harapan Hidup	101,047,213,874,00	79,291,426,452,00	78,46
5.	Menurunnya Kematian Ibu Baru Melahirkan dan Anak Baru Lahir	Angka Kematian Bayi per 1.000KH	281,025,000,00	273,775,000,00	97,42
		Angka Kematian Ibu per 1000 KH			
		Angka Kematian Balita per 1.000KH	36,725,000,00	36,725,000,00	100
6.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Melalui Promosi, Pemberdayaan dan Penyehatan Lingkungan	Presentase Desa Siaga Aktif dalam Pemberantasan Penyakit	916,346,000,00	828,083,150,00	90,36
7.	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Presntase Peserta KB Aktif	5,011,409,634,00	4,998,936,200,00	99,75
8.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Presentase Kasus Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	248,292,500,00	244,913,500,00	98,63
9.	Meningkatnya Pemahaman Anggota Keluarga terhadap Bahaya Narkoba	Jumlah Media Penyebaran Informasi Penanggulangan Bahaya Narkoba	20,000,000,00	20,000,000,00	100

10.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin	Persentase PMKSSkalaKabupaten/Kota yang menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usia Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenisnya	1,103,201,549,00	1.064.951.365,00	96,53
11.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	3,832,723,250,00	3,725,602,253,00	97,20
12.	Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata	Presentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	56,948,946,187,00	50,849,218,310,00	89,28
13.	Terwujudnya Infrastruktur Air Bersih, Drainase dan Sanitasi yang Berkualitas dan Merata	Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi	6,856,861,750,00	6,839,011,732,00	99,73
		Presentase Tersedianya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari	17,568,591,263,00	10,762,202,562,00	61,25
14.	Terwujudnya Pengelolaan Irigasi yang Optimal	Rasio Panjang Jaringan Irigasi	24,174,506,000,00	23,531,783,662,00	97,34
15.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	5,847,124,500,00	5,839,575,500,00	99,87
		Mengurangi luasan kawasan kumu pada desa dan perkotaan	582,683,750,00	578,181,750,00	99,22
16.	Seluruh Kawasan Dapat Diakses Oleh Sarana Transportasi Publik yang Nyaman dan Lancar	Jumlah Arus Penumpang dalam Kurun Waktu Tertentu	215,700,000,00	212,468,100,00	98,50
		Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan	4.109.225.000,00	4.078.182.000,00	99,24

17.	Manggarai Timur Menjadi Kabupaten yang Hijau, yang Bersih, Sehat dan Ramah Lingkungan	Persentase Penanganan Sampah	1,777,686,000,00	1,777,686,000,00	100
		Pemantauan Status Mutu Air	178,859,000,00	178,806,500,00	99,97
		Rasio Ruang Terbuka Hijau	427,288,300,00	427,238,000,00	99,98
18.	Tertanggulanginya Bencana Secara Dini dan Komprehensif	Persentase Pengurangan Resiko terhadap Bencana	927,646,000,00	918,723,000,00	99,03
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	18,037,000,000,00	18,019,350,339,00	99,90
19.	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfatan dan Pengendalian Tata Ruang	Ketaatan terhadap RTRW (Tata Ruang)	259,326,500,00	238,330,198,00	91,90
20.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan)	Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan	235,190,000,00	199,688,000,00	84,90
		Jumlah Produktivitas Produk Perkebunan	358,337,500,00	333,555,000,00	93,08
		Jumlah Produksi Perikanan	1,781,101,000,00	1,776,467,000,00	99,73
		Jumlah Populasi Ternak	1,305,338,000,00	1,292,307,000,00	99,00
21.	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)	Nilai Tukar Petani	-	-	-
22.	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	1,958,762,050,00	1,939,747,750,00	99,02
23.	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Objek Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2,521,099,500,00	1,290,799,284,00	51,19
24.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	76,500,000,00	75,950,000,00	99,28
		Jumlah Koperasi Aktif	1,162,425,000,00	1,162,425,000,00	100
25.	Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Investasi Yang Masuk	1,058,969,000,00	840,711,800,00	79,38
26.	Meningkatnya Kompetensi dan	Rasio Daya Serap	597,114,275,00	576,484,825,00	96,54

	Daya Saing Tenaga Kerja	Tenaga Kerja			
27.	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Sinergis dan Terarah	Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.051.457.921,00	974,156,293,00	92,65
28.	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menyampaikan dokumen LAKIP yang Terintegrasi dan Tepat Waktu dalam Kerangka Peningkatan Nilai LAKIP	109,892,000,00	107,120,000,00	97,47
		Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan	5,261,720,000,00	5,229,318,386,00	99,38
29.	Meningkatnya Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,721,269,000,00	1,707,508,576,00	99,20

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan ini bertujuan memberikan informasi tingkat pencapaian kinerja instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang menandakan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua komponendiharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut: Pencapaian sasaran pembangunan yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan diawal tahun 2017. Dari analisis 29 sasaran pembangunan, ada 42 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih sebagai tolak ukur penilaian Kinerja tahun 2017. Pada tahun 2017, sebanyak 33,33 % dari total IKU yang ada atau sebanyak 14 IKU yang pencapaiannya lebih besar (>) dari nilai 90 % (90-100). IKU dimaksud sebagai berikut :

1. Jumlah Kompetisi yang diselenggarakan;
2. Persentase Desa Siaga Aktif dalam Pemberantasan Penyakit;
3. Persentase Kasus Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Jumlah Media Penyebaran Informasi Penanggulangan Bahaya Narkoba;
5. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
6. Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
7. Mengurangi Luasan Kawasan Kumuh pada Desa dan Perkotaan;
8. Pemantauan Status Mutu Air;
9. Rasio Ruang Terbuka Hijau;
10. Persentase Pengurangan Resiko Terhadap Bencana;
11. Persentase Penanganan Pasca Bencana;
12. Jumlah UMKM yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan;
13. Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
14. Persentase OPD yang menyampaikan dokumen LAKIP yang terintegrasi dan tepat waktu.

Dan sebanyak 38,10 % dari total IKU yang ada atau sebanyak 16 IKU yang pencapaiannya lebih besar (>) dari nilai 100 % (lebih dari seratus). IKU dimaksud sebagai berikut :

1. Meningkatnya Angka Melek Huruf;

2. Persentase PTK S-1
3. Angka Kematian Balita Per 1000 KH;
4. Persentase Peserta KB Aktif;
5. Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik;
6. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi;
7. Persentase Tersedianya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari;
8. Rasio Panjang Jaringan Irigasi;
9. Jumlah Arus Penumpang dalam Kurun Waktu Tertentu;
10. Jumlah Produksi Perikanan;
11. Nilai Tukar Petani;
12. Ketersediaan Pangan Utama;
13. Jumlah Kunjungan Wisatawan;
14. Jumlah Koperasi Aktif;
15. Jumlah Investasi Yang Masuk ; dan
16. Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Sementara sebanyak 23,80 % dari total IKU yang ada atau sebanyak 10 IKU yang pencapaiannya lebih kecil (<) dari nilai 90 %. IKU dimaksud sebagai berikut :

1. Angka Kematian Bayi per 1.000 KH;
2. Angka Kematian Ibu per 100.000 KH;
3. Persentase PMKS Skala Kab/Kota yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya;
4. Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan;
5. Persentase Penanganan Sampah;
6. Ketaatan Terhadap RTRW (Dokumen TataRuang);
7. Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan;
8. Luas Areal Tanaman Perkebunan Unggulan yang Ditingkatkan;
9. Jumlah Populasi Ternak; dan
10. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Sebanyak 04,77 % IKU dari total IKU yang ada atau sebanyak 2 IKU yang pencapaiannya belum bisa diketahui hasilnya dikarenakan sedang dalam proses. IKU tersebut diantaranya :

1. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai Timur belum dapat diperoleh

dikarenakan Badan Pusat Statistik (BPS) selaku instansi terkait belum merilis Angka Usia Harapan Hidup terbaru untuk tahun 2017.


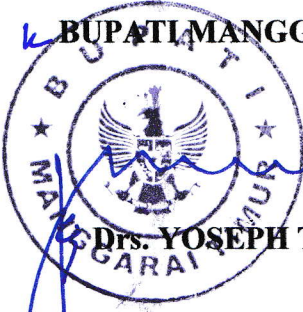
2. Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan

Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan untuk tahun anggaran 2017 masih dalam proses audit oleh BPK

IKU dan Indikator yang belum mencapai target disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Kondisi ini menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang. Di sisi lain menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pemangku kepentingan, penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program, dan kegiatan serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan di tahun – tahun berikutnya. Sementara pencapaian indikator kinerja lainnya yang turut mendukung pencapaian IKU tetap disajikan dalam pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017. Pencapaian IKU tahun 2017 sebesar 102,33%, sementara pencapaian tiga tahun terakhir terhadap RPJMD sebesar 98,20 %. Pencapaian terhadap RPJMD sudah sesuai dengan target. Masih ada sebagian IKU dan Indikator belum mencapai target dan ada sebagian sudah mencapai atau bahkan sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja 29 sasaran dan 42 IKU tetap dikawal terus sehingga tetap memenuhi target dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha berupa regulasi, situasi sosial yang kondusif, pajak, dan sistem perijinan yang baik. Iklim usaha yang baik sebagai salah satu aspek yang memancing dunia usaha membuka, membangun dan mengembangkan usaha ekonomi di daerah kita. Sementara masyarakat perlu diberi informasi yang tepat akan peran dan fungsinya ketika berada bersama dua pilar lain pembangunan dalam kehidupan sehari - hari.

Borong, 12 Maret 2018

BUPATI MANGGARAI TIMUR, 

Drs. YOSEPH TOTE, M.Si

